

# PEREKONOMIAN INDONESIA

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta  
Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**

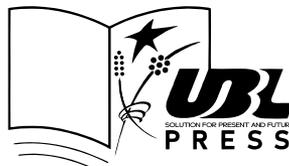
Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana Pasal 113**

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# PEREKONOMIAN INDONESIA

Prof. Dr. Iskandar Ali Alam, S.E., M.M.  
Dr. Tuti Hairani, S.E., M.M.



Perpustakaan Nasional RI:  
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

## **PEREKONOMIAN INDONESIA**

### **Penulis:**

Prof. Dr. Iskandar Ali Alam, S.E., M.M.

Dr. Tuti Hairani, S.E., M.M.

Desain Cover : Tim AURA Creative

Layout: Tim AURA Creative

### **Penerbit**

Universitas Bandar Lampung

(UBL) Press

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.26,  
Labuhan Ratu, Kedaton, Kota Bandar  
Lampung, Lampung 35142

x + 190 hal : 15 x 23 cm

Cetakan Agustus 2022

ISBN: 978-623-99365-6-3

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atau karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan bahan ajar Perekonomian Indonesia ini dengan baik. Penyusunan diktat ini sebagai salah satu prasyarat penyusunan Laporan Kinerja Dosen.

Keberhasilan dalam penyusunan Diktat Bahan Ajar ini berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Yusuf Barusman, selaku Rektor Universitas Bandar Lampung.
2. Prof Dr. Iskandar Ali Alam selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung, dan selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.
3. Rekan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung.

Penulis menyadari atas berbagai kekurangan dalam penyusunan Bahan Ajar ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Diktat Bahan Ajar ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah Perekonomian Indonesia.

Bandar Lampung, Oktober 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
1. Sistem Ekonomi Indonesia.....	1
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	41
3. Penduduk.....	59
4. Tenaga Kerja.....	71
5. Konsumsi.....	86
6. Investasi.....	89
7. Pertanian.....	114
8. Industrialisasi.....	122
9. APBN dan Peran Pemerintah.....	128
10. Neraca Pembayaran Indonesia.....	151
11. Ketimpangan Ekonomi.....	160
12. Utang Luar Negeri.....	174
Daftar Pustaka.....	188

# RINGKASAN MATA KULIAH

## 1. SIFAT, BOBOT, PRASYARAT MATA KULIAH

Sifat Mata Kuliah Perekonomian Indonesia adalah mata kuliah wajib untuk Jurusan Pembangunan dan Jurusan Manajemenn, Mata Kuliah ini termasuk kelompok mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK).

Bobot Mata Kuliah Perekonomian Indonesia sebesar 3 SKS (Satuan Kredit Semester).

Sistem Kredit adalah suatu cara penyelenggaraan program pendidikan tinggi yang menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) sebagai cara menyatakann beban studi mahasiswa, beban tugas tenaga pengajar, dan beban penyelenggaraan program.

1 (satu) SKS adalah usaha atau beban studi 3 jam (150 menit) per minggu untuk satu semester yang terdiri dari :

- a. 1 Jam (50 menit) tatap muka yang terjadwal dengan staf pengajar
- b. 1 jam (50 menit) kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh staf pengajar
- c. 1 jam (50 menit) kegiatan akademik mandiri jadi apabila saudara ingin lulus dengan nilai yang memuaskan untuk mata kuliah yang berbobot 3 SKS, maka saudara harus konsisten, yaitu setiap minggu (selama satu semester)
  - a. Mengikuti kuliah dengan baik selama 150 menit = 2,5 jam

- b. Mengerjakan tugas yang diberikan dosen (misalnya PR, menulis makalah, paper, kegiatan lab.) selama 150 menit = 2,5 jam
- c. Membaca catatan kuliah, buku wajib, artikel atau mencari adat-adata yang berkaitan dengan mata kuliah selama 150 menit = 2,5 jam.

(SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ri No. 0211/U/82 tanggal 26 Juni 1982 sebagai pengganti SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 0124/U/79 tanggal 8 Juni 1979).

Prasyarat Mata Kuliah Perekonomian Indonesia harus telah lulus Mata Kuliah teori Ekonomi Makro I.

Namun pembahasan materi perekonomian menyangkut banyak aspek yang berkaitan dengan mata kuliah lain, selain mata kuliah Teori Ekonomi Makro, seperti Ekonomi Pembangunan, Ekonomi Internasional, Ekonomi Moneter dan Perbankan, Keuangan Negara dan lain-lain.

Karena itu perlu dipahami atau dipelajari kembali teori atau konsep-konsep yang berkaitan dengan pembahasan ke 10 topik Mata Kuliah Perekonomian Indonesia.

Beberapa konsep yang perlu dipahami atau dipelajari kembali antara lain konsep- konsep:

Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Bruto, Pendapatan Nasional, Pendapatan Per Kapita, Sistem Konomi, Incremental Capital Output Ratio (ICOR), Dualisme Teknologis, Fungsi APBN, Struktur APBN, Defisit APBN, Struktur Neraca Pembayaran, Transaksi Berjalan, Defisit Negara Pembayaran, Cadangan Devisa, Sistem Kurs Valuta Asing, Devaluasi, Jumlah Uang Beredar (JUB), Infrlasi, Fungsi Perbankan, Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR), Giro Wajib Minimum (GWM) Tingkat Kesehatan Bank, Pasar Modal, Garis Kemiskinan, Kemiskinan Absolut, Kemiskinan Relatif/ Kesenjangan, Ekonomi Kerakyatan, Globaliasi Ekonomi, Ethnocentric Approach, Geocentric Apporach, Regeocentric Approach, Teori Konspirasi, Teori Contagion, Teori Business Cyccle (Konjungtur).

## 2. TUJUAN MATA KULIAH

Tujuan Mata Kuliah Perekonomian Indonesia adalah untuk memperkenalkan mahasiswa pada pengetahuan tentang tahap-tahap dan permasalahan-permasalahan pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembahasan dimulai dengan beberapa proses yang menyertai pembangunan ekonomi: proses akumulasi, alokasi, demografi dan distribusi. Kemudian dilanjutkan dengan strategi, peran serta kebijakan-kebijakan dalam dan luar negeri pemerintah.

Dari rumusan tujuan tersebut di atas, setiap mahasiswa setelah mempelajari Mata Kuliah Perekonomian Indonesia diharapkan dapat memahami dan menjelaskann :

1. Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi ekonomi Indonesia dan masalah- masalah ekonomi yang dihadapi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia.
2. Sistem ekonomi yang dianut Indonesia dan membandingkan sistem-sistem ekonomi yang dianut dunia.
3. Pelaku-pelaku ekonomi di Indonesia dan peran masing-masing dalam perekonomian
4. Perubahan-perubahan struktural yang dialami ekonomi Indonesia setelah Indonesia melaksanakan pembangunan ekonomi.
5. Kebijakan pemerintah pada APBN yang berjalan dan pengaruh APBN pada Perekonomian Indonesia.
6. Posisi hubungan ekonomi luar negeri dan saldo transaksi berjalan serta perubahan cadangan devisa.
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju inflasi, jumlah uang beredar (JUB) serta kebijakan pemerintah di bidang moneter dan perbankan.
8. Kondisi kesejahteraan dan kemiskinan rakyat Indonesia serta kebijakan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat.
9. Posisi dan persiapan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi ekonomi serta langkah strategis apa yang dilakukan.
10. Apa yang terjadi setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi tahun 1997/1998 dan program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah.

### 3. PEMBAHASAN MATERI PEREKONOMIAN INDONESIA

Kerangka pembahasan Perekonomian Indonesia dilihat dalam lingkup politik ekonomi. Politik ekonomi merupakan bagian dari politik nasional, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan tujuan politik ekonomi yang dilakukan pemerintah adalah mengarahkan bagaimana tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu bisa dicapai (Suroso, 1994).

Oleh karena itu pembahasan Perekonomian Indonesia di sini ditekankan pada :

1. Mengidentifikasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar yang sedang membangun.
2. Menganalisis masalah-masalah tersebut : latar belakangnya, faktor-faktor penyebabnya dan dampak serta pengaruhnya.
3. Kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dan mengevaluasi efek hasilnya.
4. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibahas terutama yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam APBN, kebijakan perdagangan dan pembayaran dalam NERACA PEMBAYARAN, kebijakan stabilisasi harga (inflasi), nilai tukar (kurs) rupiah, suku bunga, kredit bank dalam MONETER dan PERBANKAN serta kebijakan penurunan kemiskinan dalam PENGENTASAN KEMISKINAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

# SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA 1

## A. Pengertian Sistem Ekonomi

Masalah ekonomi yang bersifat fundamental (*what, how dan for whom*) setiap masyarakat mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkannya sesuai dengan sistem ekonomi yang dianutnya. Tujuan pembangunan bukan hanya menginginkan adanya perubahan dalam arti peningkatan PDB tapi juga adanya perubahan struktura. Perubahann struktur ekonomi berkisar pada segi akumulasi (pengembangan sdp secara kuantitatif dan kualitatif), segi alokasi (pola penggunaan sdp), segi institusional (kelembagaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat), segi distribusi (pola pembagian pendapatan nasional) (Soemitro Djojohadikusumo, 1993). Cara suatu masyarakat mengatur kehidupan ekonominya disebut sistem ekonomi atau tata ekonomi. Ada pula yang mengartikan bahwa sistem ekonomi itu merupakan keseluruhan lembaga ekonomi yang dilaksanakan atau dipergunakan oleh suatu bangsa atau negara dalam melakukan kegiatan ekonominya. Lembaga ekonomi yang dimaksudkan adalah berupa pedoman, aturan atau kaidah yang dipergunakan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi dan konsumsi). Lembaga ekonomi tersebut ada yang bersifat tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, instruksi presiden, dan sebagainya. Ada yang bersifat tidak tertulis seperti kebiasaan, adat-istiadat, cara-cara yang biasa dilakukan suatu masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perangkat kelembagaan ini meliputi cara kerja, mekanisme hubungan hukum, peraturan-peraturan perekonomian, dan norma-norma lain yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan kegiatan ekonominya. Suatu sistem ekonomi merupakan bagian dari kesatuan ideologi kehidupan bermasyarakat pada suatu negara atau bangsa. Sistem ekonomi yang dianut suatu negara biasanya bersifat khas. Untuk membedakannya dengan sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara lain, bisa digunakan sudut pandangan yang menyangkut:

1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
2. Kebebasan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain
3. Peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan ekonomi

### **1. Sistem Ekonomi Sosialis**

Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis, telah menyebabkan munculnya paham baru yang menentang paham tersebut. Paham baru ini dikenal dengan sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem ekonomi di mana sebagian besar barang-barang modal/faktor-faktor produksi, dikuasai oleh negara yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai keseluruhan.

Berbeda dengan kapitalisme yang menitik beratkan pada pandangan hidup individualisme, sosialisme menitik beratkan pada pandangan kolektivisme. Kolektivisme adalah pandangan yang mengajarkan bahwa di samping setiap orang sebagai warga masyarakat, masyarakat sebagai keseluruhan merupakan satuan tersendiri yang mempunyai kepentingan yang hendaknya dipenuhi terlebih dahulu daripada kepentingan perseorangan. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis tersebut antara lain :

- Semua alat-alat produksi (tanah, mesin-mesin, pabrik) produksi dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah/negara. Tidak ada hak milik pribadi atas alat-alat produksi.
- Seluruh kegiatan produksi dilakukan oleh negara. Tidak ada usaha swasta, semua perusahaan adalah perusahaan negara.

- Jumlah dan jenis barang yang harus diproduksi ditentukan oleh Badan Perencana Ekonomi Pusat yang dibentuk pemerintah.
- Harga dan distribusi barang ditentukan dan dikendalikan oleh pemerintah.
- Semua warga masyarakat adalah tenaga kerja/karyawan yang wajib ikut memproduksi sesuai dengan kemampuannya, yang kemudian diberi upah/gaji oleh negara sesuai dengan kebutuhannya.

Sistem ekonomi ini dipraktekkan di negara-negara komunis, di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Perencanaan dilakukan meliputi hampir semua aspek kehidupan ekonomi. Karena itu, sistem ini sering juga disebut ekonomi komando (command economy) atau sistem ekonomi yang diatur oleh perintah dari pusat. Sekalipun sistem ekonomi ini dapat lebih menjamin adanya pemerataan pembagian pendapatan, namun sistem ekonomi ini telah mengorbankan kemerdekaan manusia secara pribadi. Hak milik pribadi atas alat-alat produksi tidak ada, sehingga menyebabkan kurangnya dorongan untuk bekerja secara produktif.

## **2. Sistem Ekonomi Campuran**

Dalam kenyataanya, kedua bentuk sistem ekonomi tersebut (kapitalis maupun sosialis), tidak ada yang murni, yang ada adalah bentuk campuran dari kedua sistem tersebut. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah ikut campur dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Namun demikian, campur tangan tersebut tidak menghapus kegiatan ekonomi yang diselenggarakan oleh pihak swasta. Sistem ekonomi campuran yang diterapkan oleh banyak negara tidak selalu sama. Ada yang kadar kapitalismenya lebih tinggi seperti Amerika Serikat, Hongkong, Singapura. Ada pula yang bobot sosialismenya lebih besar seperti India. Untuk mengetahui apakah suatu negara condong ke arah sistem ekonomi liberal atau sebaliknya, terdapat ukuran yang disebut “indeks kebebasan ekonomi” yang dikembangkan oleh Milton Friedman dkk yang tergabung dalam “Economic Freedom Network”.

Indeks ini dibangun atas 17 komponen, diantaranya menyangkut aspek operasi (campur tangan) pemerintah dan struktur ekonomi. Skala indeks bergerak dari 0 sampai 10. Negara dengan indeks lebih tinggi menunjukkan konsistensi yang kuat pada sistem ekonomi liberal. Dengan menggunakan indeks kebebasan ekonomi dari Milton Friedman, sistem ekonomi yang paling liberal di dunia adalah Hongkong (9,3), disusul oleh Singapura (8,2), Selandia Baru (8,0) dan Amerika Serikat (7,6). Sementara itu di tingkat ASEAN, tercatat Thailand (7,2), Filipina (7,0), Malaysia (7,0), Indonesia (6,3). Perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 1975-1995 tampak semakin liberal dengan Bergeraknya indeks kebebasan ekonomi dari 5,2 pada tahun 1975 menjadi 6,3 pada tahun 1995. Apakah negara dengan indeks kebebasan ekonomi yang tinggi menunjukkan pertumbuhan yang baik dalam perekonomiannya? Secara empirik terbukti bahwa memang ada korelasi positif antara kebebasan ekonomi dengan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Liberal Institut pada tahun 1997 menunjukkan bahwa selama kurun 1985-1996, pendapatan per kapita di negara-negara yang perekonomiannya sangat bebas mencapai US \$ 14.829, sedangkan di negara yang kurang bebas mencapai US \$ 12.369, dan di negara yang paling kurang bebas hanya mencapai US \$ 2.541. Demikian pula dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara yang perekonomiannya sangat bebas, tingkat pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 2,9 % per tahun, sedangkan di negara yang perekonomiannya kurang bebas mencapai 1,8 % per tahun, dan di negara yang paling kurang bebas, tingkat pertumbuhan ekonomi hanya 1,0 % per tahun. Sayangnya hasil studi ini tidak melaporkan bagaimana hubungan kebebasan ekonomi dengan pemerataan tingkat kesejahteraan. Dalam sistem ekonomi campuran, pemerintah dapat mengatur, mengawasi, menstabilkan dan memajukan ekonomi nasional secara keseluruhan, dengan mendorong atau menumbuhkan inisiatif swasta.

Namun, yang masih menjadi persoalan adalah : bagaimana sebaiknya cara yang ditempuh pemerintah dan apakah campur tangan pemerintah tersebut harus bersifat langsung atau tidak langsung, apakah cukup dengan peraturan saja? Secara garis besar, keterlibatan pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dapat dibedakan dalam tiga bentuk:

- Membuat peraturan-peraturan, dengan tujuan pokok agar kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi berjalan secara wajar dan tidak merugikan masyarakat. Misalnya, peraturan mengenai upah minimum ditetapkan agar para pekerja diberikan upah yang wajar dan layak sehingga dapat mencukupi berbagai kebutuhan yang pokok. Peraturan mengenai lokasi pengembangan dibuat, agar industri-industri yang didirikan tidak mengganggu masyarakat di sekitarnya dengan berbagai polusi (pencemaran) yang dihasilkannya.
- Menjalankan berbagai kebijaksanaan ekonomi, antara lain kebijaksanaan fiskal dan moneter.
- Secara langsung menjalankan berbagai kegiatan ekonomi, sehingga dapat memaksimalkan keuntungan sosial (keuntungan yang diperoleh masyarakat secara keseluruhan). Kegiatan ekonomi yang dilakukan pihak swasta pada umumnya dapat menghasilkan keuntungan yang besar sekali bagi individu yang bersangkutan (keuntungan perseorangan). Akan tetapi, masyarakat belum tentu mendapat keuntungan, bahkan mengalami kerugian, akibat tindakan individu yang bersangkutan, misalnya dengan menetapkan harga yang tidak wajar. Karena itulah pemerintah ikut campur secara langsung, dengan mendirikan perusahaan-perusahaan negara untuk bidang-bidang yang vital dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Ikut campur pemerintah tersebut, diharapkan dapat memaksimalkan keuntungan sosial.

### **3. Sistem Ekonomi Indonesia**

Seperti dikemukakan oleh Partadiredja (1983), seorang pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, sebagian besar negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia, menganut sistem

ekonomi campuran. Terdapat pemilikan swasta perseorangan atas alat-alat produksi yang berdampingan dengan pemilikan negara, dan bahkan pemilikan kelompok-kelompok persekutuan adat. Mekanisme harga dan pasar bebas, hidup berdampingan dengan perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebagian besar harga barang dan jasa dan faktor produksi ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Pemerintah juga mempengaruhi kekuatan permintaan dan penawaran tersebut melalui kebijaksanaan harga, termasuk penetapan upah minimum. Mengenai turut campurnya pemerintah dalam kehidupan ekonomi, dapat dilihat ketentuan pada ayat 2 dan 3 pasal 33 UUD 1945. Ayat 2 tersebut berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara“. Menurut Mohammad Hatta, yang merumuskan pasal 33 tersebut, dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri yang menjadi pengusaha, usahawan atau ondernemer. Selanjutnya dikatakan bahwa kekuasaan negara terdapat pada membuat peraturan-peraturan guna kelancaran jalan ekonomi, peraturan yang melarang penghisapan orang lemah oleh orang yang bermodal. Demikian pula negara mempunyai kewajiban supaya ketentuan yang termuat pada pasal 27 ayat 2 dapat terlaksana. Ketentuan itu berbunyi “ tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “. Dalam dokumen GBHN pada masa Orde Baru, sistem ekonomi Indonesia dinamakan sebagai demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri positif sebagai berikut.

- Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat serta pengawasan terhadap kebijakannya ada pada Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat pula

- Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- Hak milik perorangan diakui sedangkan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
- Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara  
Sebaliknya dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan timbulnya ciri-ciri negatif berikut ini.
- Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural poisisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
- Sistem etatisme dalam mana negara beserta aparatur ekonomi negara mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Pada dekade 1980-an terdapat suatu polemik dari para pakar ekonomi tentang sistem ekonomi yang diinginkan (ideal) untuk masyarakat Indonesia. Sistem ekonomi tersebut kemudian dinamai Sistem Perekonomian Pancasila (SPP). Menurut Mubyarto, salah seorang penggagasnya, Sistem Perekonomian Pancasila tersebut memiliki 5 ciri pokok sebagai berikut.

1. Koperasi sebagai soko guru perekonomian, karena koperasi merupakan bentuk yang paling kongkrit dari sebuah usaha bersama.
2. Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomis, sosial dan moral. Rangsangan (dorongan) sosial dan moral ini sangat ditekankan, karena rangsanganrangsangan inilah yang membedakan Sistem Perekonomian Pancasila dengan sistem ekonomi kapitalis yang menekankan rangsangan ekonomi semata.

3. Adanya kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah pemerataan sosial. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang hanya punya rasa individual dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bagi dirinya dalam kegiatan ekonomi.
4. Nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi
5. Adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.

## **B. Sejarah Ringkas Perekonomian Indonesia**

Secara sederhana sejarah perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua periode utama, yaitu :

1. Periode Pra Kemerdekaan
  - Periode pra kolonialisme
  - Periode kolonialisme
2. Periode Kemerdekaan
  - Periode Orde Lama (ORLA)
  - Periode Orde Baru (ORBA)
  - Periode Orde Reformasi

### **1. Periode Pra Kemerdekaan**

- Periode Pra Kolonialisme

Yang dimaksud dengan periode Pra-Kolonialisme adalah masa-masa berdirinya kerajaan – kerajaan di wilayah Nusantara (sekitar abad ke – 5) ampai sebelum masa masuknya penjajah yang secara sistematis menguasai kekuatan ekonomi dan politik di wilayah nusantara (sekitar abad k-15 sampai 17). Pada masa itu RI belum berdiri. Daerah – daerah umumnya dipimpin oleh kerajaan – kerajaan.

Indonesia terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang

ke teluk Persia, melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).

➤ Periode Kolonialisme

Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai system yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian Indonesia, rasanya perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode, berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).

➤ Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)

Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), sebuah perusahaan yang didirikan dengan tujuan untuk menghindari persaingan antar sesama pedagang Belanda, sekaligus untuk menyaingi perusahaan imperialis lain seperti EIC (Inggris). Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang antara lain meliputi :

- a. Hak mencetak uang
- b. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai
- c. Hak menyatakan perang dan damai
- d. Hak untuk membuat angkatan bersenjata sendiri
- e. Hak untuk membuat perjanjian dengan raja-raja

Hak-hak itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Namun walau demikian, tidak berarti bahwa seluruh ekonomi Nusantara telah dikuasai VOC. Kenyataannya, sejak tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah.

➤ Pendudukan Inggris (1811-1816)

Inggris berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah berhasil di India, dan Thomas Stamford Raffles mengira sistem ini akan berhasil juga di Hindia Belanda. Selain itu, dengan landrent, maka penduduk pribumi akan memiliki uang untuk membeli barang produk Inggris atau yang diimpor dari India. Inilah imperialisme modern yang menjadikan tanah jajahan tidak sekedar untuk dieksplorasi kekayaan alamnya, tapi juga menjadi daerah pemasaran produk dari negara penjajah. Sesuai dengan teori-teori mazhab klasik yang saat itu sedang berkembang di Eropa, antara lain:

- 1) Pendapat Adam Smith bahwa tenaga kerja produktif adalah tenaga kerja yang menghasilkan benda konkrit dan dapat dinilai pasar, sedang tenaga kerja tidak produktif menghasilkan jasa dimana tidak menunjang pencapaian pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Inggris menginginkan tanah jajahannya juga meningkatkan kemakmurannya, agar bisa membeli produk- produk yang di Inggris dan India sudah surplus (melebihi permintaan).
- 2) Pendapat Adam Smith bahwa salah satu peranan ekspor adalah memperluas pasar bagi produk yang dihasilkan (oleh Inggris) dan peranan penduduk dalam menyerap hasil produksi.
- 3) The quantity theory of money bahwa kenaikan maupun penurunan tingkat harga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar.

Akan tetapi, perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, dan bahkan mengalami kegagalan di akhir kekuasaan Inggris yang cuma seumur jagung di Hindia Belanda. Sebab-sebabnya antara lain :

- 1) Masyarakat Hindia Belanda pada umumnya buta huruf dan kurang mengenal uang, apalagi untuk menghitung luas tanah yang kena pajak
- 2) Pegawai pengukur tanah dari Inggris sendiri jumlahnya terlalu sedikit.
- 3) Kebijakan ini kurang didukung raja-raja dan para bangsawan, karena Inggris tak mau mengakui suksesi jabatan secara turun-temurun.

➤ **Cultuurstelstel**

Cultuurstelstel (sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh, kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi (monopoli ekspor). Setelah penerapan kedua sistem ini, seluruh kerugian akibat perang dengan Napoleon di Belanda langsung tergantikan berkali lipat.

Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

➤ **Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)**

Adanya desakan dari kaum Humanis Belanda yang menginginkan perubahan nasib warga pribumi ke arah yang lebih baik, mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mengubah kebijakannya. Dibuatlah peraturan-

peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Hal ini nampaknya juga masih tak lepas dari teori-teori mazhab klasik, antara lain terlihat pada:

- Keberadaan pemerintah Hindia Belanda sebagai tuan tanah, pihak swasta yang mengelola perkebunan swasta sebagai golongan kapitalis, dan masyarakat pribumi sebagai buruh penggarap tanah.
- Prinsip keuntungan absolut: Bila di suatu tempat harga barang berada diatas ongkos tenaga kerja yang dibutuhkan, maka pengusaha memperoleh laba yang besar dan mendorong mengalirnya faktor produksi ke tempat tersebut.
- *Laissez faire laissez passer*, perekonomian diserahkan pada pihak swasta, walau jelas, pemerintah Belanda masih memegang peran yang besar sebagai penjajah yang sesungguhnya.

Pada akhirnya, sistem ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak diperlakukan layak.

#### 1) Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor. Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dai Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

## 2. Periode Kemerdekaan

a. Periode Orde Lama (ORLA) : periode 1945-1966

1) Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan:

- Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada waktu itu, untuk sementara waktu pemerintah RI menyatakan tiga mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda, dan mata uang pendudukan Jepang. Kemudian pada tanggal 6 Maret 1946,
- Panglima AFNEI (Allied Forces for Netherlands East Indies/ pasukan sekutu) mengumumkan berlakunya uang NICA di daerah-daerah yang dikuasai sekutu. Pada bulan Oktober 1946, pemerintah RI juga mengeluarkan uang kertas baru, yaitu ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang Jepang.
- Berdasarkan teori moneter, banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga.
- Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negeri RI. - Kas negara kosong.-Eksplotasi besar-besaran di masa penjajahan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
- Program Pinjaman Nasional dilaksanakan oleh menteri keuangan Ir. Surachman dengan persetujuan BP-KNIP, dilakukan pada bulan Juli 1946. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mengadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.
- Konferensi Ekonomi Februari 1946 dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, yaitu : masalah produksi dan distribusi makanan, masalah sandang, serta status dan administrasi perkebunan-perkebunan.

- Pembentukan Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.
- Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948. yaitu dengan mengalihkan tenaga bekas angkatan perang ke bidang-bidang produktif. - Kasimo Plan yang intinya mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dengan swasembada pangan, diharapkan perekonomian akan membaik

## 2) Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Usaha- usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

- Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun.
- Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha non-pribumi.
- Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha nonpribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada

pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

- Pembatalan sepihak atas hasil-hasil KMB, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

### 3) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, maka Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan membawa pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi (Mazhab Sosialisme).

Akan tetapi, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah di masa ini belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia, antara lain:

- Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang sebagai berikut :Uang kertas pecahan Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.
- Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961- 1962 harga barang-barang naik 400%.
- Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1000 menjadi Rp 1. Sehingga uang rupiah baru mestinya dihargai 1000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

- Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.
- Sekali lagi, ini juga salahsatu konsekuensi dari pilihan menggunakan system demokrasi terpimpin yang bisa diartikan bahwa Indonesia berkiblat ke Timur (sosialis) baik dalam politik, ekonomi, maupun bidang-bidang lain.

b. Periode Orde Baru (ORBA) : periode Maret 1966 - Mei 1998.

Orde baru memiliki perhatian kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air. Orde baru menjalin kerjasama dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ideologi komunis. Sebelum melakukan pembangunan Repelita, dilakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran kebijakan terutama untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada Orde Lama. Penyusunan rencana Pelita secara bertahap dengan target- target yang jelas sangat dihargai oleh negaranegara Barat.

Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi, seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.

Terjadi perubahan struktural dalam perekonomian Indonesia selama masa Orde Baru jika dilihat dari perubahan pangsa PDB (Produk Domestik Bruto), terutama dari sektor industri. Kontribusi sektor industri sekitar 8% (1960) menjadi 12% (1983). Hal ini menunjukkan terjadinya proses industrialisasi atau transformasi ekonomi dari negara agraris menuju semiindustri.

Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat pada paruh dekade 80-an, di mana pemerintah mengeluarkan berbagai

deregulasi di sektor moneter maupun riil dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Deregulasi menyebabkan terjadinya pergeseran dari semula tersentralisasi menjadi desentralisasi dan peranan sektor swasta semakin besar. Pada level meso (tengah) dan mikro, pembangunan tidak terlalu berhasil : jumlah kemiskinan tinggi, kesenjangan ekonomi meningkat di akhir 90-an.

Perkembangan ekonomi masa Orde Baru lebih baik dari Orde Lama disebabkan oleh beberapa faktor:

- 1) Kemauan Politik yang kuat dari pemerintah untuk melakukan pembangunan atau melakukan perubahan kondisi ekonomi.
- 2) Stabilitas politik dan ekonomi yang lebih baik daripada masa Orde Lama. Pemerintah Orde Baru berhasil menekan inflasi. Mereka juga berhasil menyatukan bangsa dan kelompok masyarakat serta meyakinkan mereka bahwa pembangunan ekonomi dan sosial adalah jalan satu-satunya agar kesejahteraan masyarakat di Indonesia dapat meningkat.
- 3) Sumber daya manusia yang lebih baik. SDM di masa ORBA memiliki kemampuan untuk menyusun program dan strategi pembangunan dengan kebijakan-kebijakan yang terkait serta mampu mengatur ekonomi makro secara baik.
- 4) Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat. Hal ini sangat membantu khususnya dalam mendapatkan pinjaman luar negeri, PMA dan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan.
- 5) Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik. Selain terjadi oil boom (tingkat produksi minyak dan harganya yang meningkat), juga kondisi ekonomi dan politik dunia pada era ORBA khususnya setelah perang dingin berakhir, jauh lebih baik daripada semasa ORLA.

Pemerintahan Transisi, ciri-cirinya :

Diawali dengan melemahnya nilai tukar baht Thailand terhadap USD pada Mei 1997, sehingga para investor mengambil keputusan jual baht untuk beli USD. Melemahnya baht merambah sampai ke mata uang Asia lainnya (Ringgit Malaysia hingga Rupiah).

Hal ini menyebabkan terjadinya krisis keuangan di Asia. Nilai tukar Rupiah terus melemah terhadap USD, pemerintah melakukan intervensi dengan memperluas rentang intervensi. Namun hal itu tidak banyak membantu pemulihan nilai tukar rupiah thd USD. Pada Oktober 1997, pemerintah memutuskan meminta bantuan keuangan pada IMF.

Paket bantuan I sebesar USD 40 Milyar diturunkan pada akhir Okt 1997. Bantuan tersebut diikuti dengan persyaratan penutupan atau pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat. Setelah paket bantuan, justru nilai tukar Rp semakin melemah. Akhirnya pemerintah membuat kesepakatan dengan IMF dalam bentuk Letter of Intent (LoI) pada Januari 1998. LoI berisi 50 butir kebijakan mencakup ekonomi makro (fiskal dan moneter), restrukturisasi sektor keuangan, dan reformasi struktural. Di bidang fiskal : penegasan penggunaan prinsip anggaran berimbang pada APBN, usaha pengurangan pengeluaran pemerintah (menghilangkan subsidi BBM dan listrik), membatalkan sejumlah proyek infrastruktur yang besar, serta peningkatan pendapatan pemerintah. Setelah gagal dengan kesepakatan pertama, dibuat lagi kesepakatan baru pada Maret 1998 dengan nama Memorandum Tambahan tentang Kebijakan Ekonomi dan Keuangan (MTKEK).

c. Periode Orde Reformasi: Periode 1998-Sekarang

1) Pemerintahan presiden BJ.Habibie

Pemerintahan presiden BJ.Habibie Yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.

2) Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid

Pada masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun

belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat. Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.

### 3) Masa Kepemimpinan Megawati Soekarnoputri

Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan - persoalan ekonomi antara lain :

- Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
- Kebijakan privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing.

### 4) Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono

Kebijakan kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan kontroversial pertama itu menimbulkan kebijakan kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin. Kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan

yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial.

Kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Salah satunya adalah diadakannya Indonesian Infrastructure Summit pada bulan November 2006 lalu, yang mempertemukan para investor dengan kepala-kepala daerah. Menurut Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja. Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah revisi undangundang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.

### **C. Pelaku Ekonomi Dalam Sistem Perekonomian Indonesia**

#### **1. Sistem Ekonomi Demokrasi**

Indonesia mempunyai landasan idiil yaitu Pancasila dan landasan konstitusional yaitu UUD 1945. Oleh karena itu, segala bentuk kegiatan masyarakat dan negara harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian yang ada di Indonesia juga harus berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem perekonomian nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disusun untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan ekonomi. Sistem perekonomian Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 disebut sistem ekonomi demokrasi. Dengan demikian sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah.

- Ciri-Ciri Positif Sistem Ekonomi Demokrasi. Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
  - 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
  - 3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
  - 4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
  - 5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
  - 6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  - 7) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
  - 8) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- Ciri-Ciri Negatif Sistem Ekonomi Demokrasi
- Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus dihindarkan.
- 1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
  - 2) Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
  - 3) Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

## 2. Sistem Ekonomi Kerakyatan

Sistem ekonomi kerakyatan berlaku di Indonesia sejak terjadinya Reformasi di Indonesia pada tahun 1998. Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan.

Sistem ekonomi kerakyatan mempunyai ciri-ciri berikut ini.

- Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
- Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
- Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
- Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

## 3. Pelaku Utama dalam Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem ekonomi kerakyatan sendi utamanya adalah UUD 1945 pasal 33 ayat (1), (2), dan (3). Bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (1) adalah koperasi, dan bentuk usaha yang sesuai dengan ayat (2) dan (3) adalah perusahaan negara. Adapun dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang”. Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia.

### 1. Pemerintah (BUMN)

Pada semester 1 kalian telah mempelajari mengenai pelaku-pelaku ekonomi, di mana negara atau pemerintah termasuk dalam pelaku ekonomi. Selain sebagai pelaku ekonomi negara juga berperan sebagai pengatur kegiatan ekonomi.

a. Pemerintah sebagai Pelaku Kegiatan Ekonomi

Peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi berarti pemerintah melakukan kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi.

1) Kegiatan produksi

Pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi, mendirikan perusahaan negara atau sering dikenal dengan sebutan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN dapat berbentuk Perjan (Perusahaan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum), dan Persero (Perusahaan Perseroan). Mengenai ciri-ciri dari ketiga bentuk perusahaan negara di atas telah kalian pelajari di kelas VII semester 2. BUMN memberikan kontribusi yang positif untuk perekonomian Indonesia. Pada sistem ekonomi kerakyatan, BUMN ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha hampir di seluruh sektor perekonomian, seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, dan perdagangan serta konstruksi.

Secara umum, peran BUMN dapat dilihat pada hal-hal berikut ini.

- Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
- Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya secara efektif dan efisien.
- Sebagai alat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
- Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

## 2) Kegiatan konsumsi

Seperti halnya yang telah kalian pelajari pada bab 8 mengenai pelaku-pelaku ekonomi, pemerintah juga berperan sebagai pelaku konsumsi. Pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa untuk menjalankan tugasnya. Seperti halnya ketika menjalankan tugasnya dalam rangka melayani masyarakat, yaitu mengadakan pembangunan gedung-gedung sekolah, rumah sakit, atau jalan raya.

## 3) Kegiatan distribusi

Selain kegiatan konsumsi dan produksi, pemerintah juga melakukan kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang yang telah diproduksi oleh perusahaan-perusahaan negara kepada masyarakat. Misalnya pemerintah menyalurkan sembilan bahan pokok kepada masyarakat-masyarakat miskin melalui BULOG. Penyaluran sembako kepada masyarakat dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah harus lancar. Apabila kegiatan distribusi tidak lancar akan memengaruhi banyak faktor seperti terjadinya kelangkaan barang, harga barang-barang tinggi, dan pemerataan pembangunan kurang berhasil. Oleh karena itu, peran kegiatan distribusi sangat penting.

### b. Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di bidang ekonomi tidak hanya berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi, akan tetapi pemerintah juga berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan terhadap jalannya roda perekonomian demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Dalam rangka melaksanakan perannya tersebut pemerintah menempuh kebijaksanaan- kebijaksanaan berikut ini.

- 1) Kebijakan dalam dunia usaha Usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha, pemerintah melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan berikut ini.

- Pemerintah mengeluarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
  - Pemerintah mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1992 mengatur tentang Usaha Perbankan.
  - Pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara agar tidak menderita kerugian, seperti Perum Pos dan Giro diubah menjadi PT Pos Indonesia, Perjan Pegadaian diubah menjadi Perum Pegadaian.
- 2) Kebijakan di bidang perdagangan
- Di bidang perdagangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa kebijakan ekspor dan kebijakan impor. Pemerintah menetapkan kebijakan ekspor dengan tujuan untuk memperluas pasar di luar negeri dan meningkatkan daya saing terhadap barang-barang luar negeri.
- 3) Kebijakan dalam mendorong kegiatan masyarakat
- Kebijakan pemerintah dalam mendorong kegiatan masyarakat mencakup hal-hal berikut ini.
- Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.
  - Kebijakan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani.
  - Kebijakan untuk memperlancar distribusi hasil produksi.

## 2. Swasta (BUMS)

BUMS adalah salah satu kekuatan ekonomi di Indonesia. BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan BUMS adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. BUMS didirikan dalam rangka ikut mengelola sumber daya alam Indonesia, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan UUD 1945.

Kebijakan pemerintah ditempuh dengan beberapa pertimbangan berikut ini.

- a. Menumbuhkan daya kreasi dan partisipasi masyarakat dalam usaha mencapai kemakmuran sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia.

- b. Terbatasnya modal yang dimiliki pemerintah untuk menggali dan mengolah sumber daya alam Indonesia sehingga memerlukan kegiaan usaha swasta.
- c. Memberi kesempatan agar perusahaan-perusahaan swasta dapat memperluas kesempatan kerja.
- d. Mencukupi kebutuhan akan tenaga ahli dalam menggali dan mengolah sumber daya alam.

Perusahaan-perusahaan swasta tersebut sangat memberikan peran penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran yang diberikan BUMS dalam perekonomian Indonesia seperti berikut ini.

- Membantu meningkatkan produksi nasional.
- Menciptakan kesempatan dan lapangan kerja baru.
- Membantu pemerintah dalam usaha pemerataan pendapatan.
- Membantu pemerintah mengurangi pengangguran.
- Menambah sumber devisa bagi pemerintah.
- Meningkatkan sumber pendapatan negara melalui pajak.
- Membantu pemerintah memakmurkan bangsa.

### 3. Koperasi

#### a. Sejarah singkat Koperasi

Koperasi pertama di Indonesia dimulai pada penghujung abad ke-19, tepatnya tahun 1895. Pelopor koperasi pertama di Indonesia adalah R. Aria Wiriaatmaja, yaitu seorang patih di Purwokerto. Ia mendirikan sebuah bank yang bertujuan menolong para pegawai agar tidak terjerat oleh lintah darat. Usaha yang didirikannya diberi nama Bank Penolong dan Tabungan (Hulp en Spaarbank). Perkembangan koperasi yang didirikan oleh R. Aria Wiriaatmaja semakin baik. Akibatnya setiap gerak-gerik koperasi tersebut diawasi dan mendapat banyak rintangan dari Belanda. Upaya yang ditempuh pemerintah kolonial Belanda yaitu dengan mendirikan Algemene Volkscrediet Bank, rumah gadai, bank desa, serta lumbung desa.

Pada tahun 1908 melalui Budi Utomo, Raden Sutomo berusaha mengembangkan koperasi rumah tangga. Akan tetapi koperasi yang didirikan mengalami kegagalan. Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi. Pada sekitar tahun 1913, Serikat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Serikat Islam, mempelopori pula pendirian koperasi industri kecil dan kerajinan. Koperasi ini juga tidak berhasil, karena rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya penyuluhan kepada masyarakat, dan miskinnya pemimpin koperasi pada waktu itu. Setelah dibentuknya panitia koperasi yang diketuai oleh Dr. DJ. DH. Boeke pada tahun 1920, menyusun peraturan koperasi No. 91 Tahun 1927. Peraturan tersebut berisi persyaratan untuk mendirikan koperasi, yang lebih longgar dibandingkan peraturan sebelumnya, sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mendirikan koperasi. Setelah diberlakukannya peraturan tersebut, perkembangan koperasi di Indonesia mulai menunjukkan tanda-tanda yang menggembirakan.

#### b. Pengertian Koperasi

Keberadaan koperasi di Indonesia berlandaskan pada pasal 33 UUD 1945 dan UU No. 25 Tahun 1992. Pada penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat (1), koperasi berkedudukan sebagai “soko guru perekonomian nasional” dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Adapun penjelasan dalam UU No. 25 Tahun 1992, menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berdasarkan pada pengertian koperasi di atas, menunjukkan bahwa koperasi di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai bentuk perusahaan yang mempunyai asas dan prinsip yang khas, namun koperasi juga dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian Indonesia.

### c. Landasan, Asas, dan Tujuan Koperasi

Landasan koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Koperasi Indonesia mempunyai beberapa landasan berikut ini.

- Landasan idiil: Pancasila.
- Landasan struktural: UUD 1945.
- Landasan operasional: UU No. 25 Tahun 1992 dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- Landasan mental: kesadaran pribadi dan kesetiakawanan. UU No. 25 Tahun 1992 pasal 2 menetapkan bahwa kekeluargaan sebagai asas koperasi. Semangat kekeluargaan inilah yang menjadi pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

### d. Fungsi dan Peran Koperasi

Sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa fungsi dan peran koperasi seperti berikut ini.

- Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.
- Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### e. Perangkat Organisasi Koperasi

Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Penjelasan tentang ketiga perangkat organisasi koperasi ini seperti berikut ini.

## 1) Rapat anggota

Rapat anggota merupakan perangkat yang penting dalam koperasi. Rapat anggota ialah rapat yang dihadiri oleh seluruh atau sebagian besar anggota koperasi. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Melalui rapat anggota, seorang anggota koperasi akan menggunakan hak suaranya. Rapat anggota berwenang untuk menetapkan hal-hal berikut ini.

- Anggaran dasar (AD).
- Kebijakan umum di bidang organisasi.
- Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas.
- Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas.
- Pembagian sisa hasil usaha (SHU).
- Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

## 2) Pengurus

Pengurus dipilih oleh rapat anggota dari kalangan anggota. Pengurus adalah pemegang kuasa rapat anggota. Masa jabatan paling lama lima tahun. Berikut ini tugas pengurus koperasi.

- Mengelola koperasi dan bidang usaha.
- Mengajukan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi.
- Menyelenggarakan rapat anggota
- Mengajukan laporan pelaksanaan tugas dan laporan keuangan koperasi.
- Memelihara buku daftar anggota, pengurus, dan pengawas.

Adapun wewenang pengurus koperasi terdiri atas hal-hal berikut ini.

- Mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan.
- Memutuskan penerimaan atau penolakan seseorang sebagai anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi.

- Melakukan tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya sebagai pengurus.

### 3) Pengawas

Pengawas koperasi adalah salah satu perangkat organisasi koperasi, dan menjadi suatu lembaga/badan struktural koperasi. Pengawas mengemban amanat anggota untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi. Koperasi dalam melakukan usahanya diarahkan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan kepentingan anggota untuk mencapai kesejahteraan anggota. Tugas-tugas koperasi seperti berikut ini.

- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan koperasi oleh pengurus.
- Membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan yang telah dilakukannya.

Supaya para pengawas koperasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, mereka harus diberi wewenang yang cukup untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Pengawas koperasi mempunyai wewenang berikut ini.

- Meneliti catatan atau pembukuan koperasi.
- Memperoleh segala keterangan yang diperlukan.

### f. Modal Koperasi

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.

#### 1) Modal Sendiri Koperasi

- Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang sama banyaknya dan wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- Simpanan wajib, adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama dan wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih

menjadi anggota.

- Dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha. Dana cadangan digunakan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi.
- Hibah, yaitu sumbangan pihak tertentu yang diserahkan kepada koperasi dalam upayanya turut serta mengembangkan koperasi. Hibah tidak dapat dibagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan.

## 2) Modal pinjaman koperasi

Modal pinjaman dapat berasal dari simpanan sukarela, pinjaman dari koperasi lainnya, pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sumber pinjaman lainnya yang sah.

### **D. Pelapukan Struktur Ekonomi**

Struktur ekonomi yang kokoh sekurangnya ditopang oleh dua pondasi yang kuat. Pertama, pada level mikro, relasi antarpelaku ekonomi berpadu padan dalam interaksi yang sejajar sehingga nisbah ekonomi dibagi secara proporsional sesuai dengan pengorbanan yang dipikul. Apabila pelaku ekonomi yang memikul ongkos terbesar mendapatkan nisbah yang paling kecil, maka berarti menandakan terbentuknya struktur ekonomi yang tidak sehat. Kedua, pada level makro, sektor ekonomi yang berkaitan langsung dengan kegiatan produksi yang dapat diperjualbelikan (sektor riil/tradeable sector) seyogyanya menjadi lokomotif pergerakan kegiatan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi lebih banyak disokong oleh sektor ekonomi yang tidak menghasilkan pertambahan produksi yang dapat diperdagangkan, maka struktur ekonomi itu juga sudah lapuk. Celakanya, kerap kali kinerja ekonomi yang mengkilap tidak selalu beralas dari struktur ekonomi yang liat. Kesepakatan yang Mematikan Sistem ekonomi pasar dianggap superior karena diandaikan memiliki mekanisme yang komplet untuk memfasilitasi kesepakatan (arrangements) antarpelaku ekonomi, baik dalam konteks kompetisi (competition) maupun kerjasama (co-operation). Tetapi, kesepakatan yang dibuat berdasarkan tata kerja mekanisme pasar tersebut abai dalam hal

identifikasi kekuatan antarpelaku ekonomi. Kesepakatan yang terjadi di antara para pelaku ekonomi yang memiliki posisi tawar sepadan tentu akan menghasilkan kontrak yang ideal. Sebaliknya, kesepakatan yang berdiri di atas ketidakseimbangan kekuatan antarpelaku ekonomi dipastikan menghasilkan kontrak yang pincang. Di sinilah persoalan pada level mikro ini bermula, sebab dalam realitasnya pertemuan antarpelaku ekonomi itu lebih banyak berlangsung dalam situasi kekuasaan antarpelaku yang timpang. Implikasinya, seluruh pergerakan kegiatan ekonomi terkonsentrasi kepada pelaku ekonomi yang kuat.

➤ Prinsip Nilai Tambah

Perangkap yang sering menjebak para pengelola negara adalah kesilapannya mengejar nilai akhir kegiatan/transaksi ekonomi dengan mengabaikan prinsip nilai tambah. Secara teoritis, jika proses nilai tambah menjadi penopang aktivitas ekonomi, maka nilai akhir dari kegiatan ekonomi tersebut berpotensi besar. Tapi, dalam banyak hal hasil yang besar dari aktivitas ekonomi bisa dicapai tanpa bersandarkan kaidah nilai tambah. Misalnya, pemanfaatan lahan pertanian bagi kegiatan pemukiman (real estate) pasti akan menghasilkan nilai akhir ekonomi yang lebih besar, setidaknya dalam jangka pendek. Lainnya, sektor keuangan yang memetik laba dari permainan valuta asing atau transaksi derivatif menjanjikan hasil yang lebih banyak ketimbang meraup profit dari penyaluran kredit ke sektor industri/pertanian. Kedua contoh itu merupakan sampel dari fakta perolehan hasil akhir kegiatan ekonomi (yang besar) dengan mengabaikan prinsip nilai tambah.

### **E. Bagaimana Membaca Dinamika Perekonomian ?**

Sebagai pelaku bisnis kita sebaiknya dapat mengikuti perkembangan perekonomian Indonesia secara umum, sehingga mampu untuk mengantisipasi kemungkinan pengaruh buruk yang dihasilkan; atau memanfaatkan peluang-peluang bisnis dari perkembangan perekonomian tersebut. Memang sebagai orang awam yang tidak mengerti atau kurang menguasai seluk beluk dalam ilmu ekonomi makro kemampuan untuk mengerti

perkembangan perekonomian merupakan tuntutan yang berat untuk dapat dipenuhi. Sebenarnya membaca perkembangan perekonomian dapat diikuti dengan mudah, asalkan kita mengerti dasar-dasar bagaimana satu sistem perekonomian nasional bekerja dan berinteraksi. Langkah berikutnya akan menjadi lebih mudah karena kita tinggal memonitor perkembangan dari berbagai perubahan variabel agregat ekonomi.

Sistem Perekonomian: Konsep Dasar Setiap mahasiswa atau lulusan Fakultas Ekonomi dari Universitas Negeri dan Swasta di Indonesia diharapkan telah mengenal Konsep Perputaran Roda Perekonomian (Circular Flow). Siapakah yang tidak mengenal Prof Samuelson, Prof Lipsey maupun para teknokrat ekonom dunia lainnya. Ide paling dasar untuk mengerti dan menguasai sistem perekonomian di suatu masyarakat atau negara adalah mengelompokkan kegiatan perekonomian menurut kepentingan pelaku-pelaku utama, masing-masing:

- Produsen atau Pengusaha: Yaitu perseorangan atau kelompok perseorangan yang berkumpul secara hukum, dalam bentuk Perseroan Terbatas, CV, koperasi, atau bentuk formal lainnya, yang bertujuan untuk memproduksi barang/produk atau jasa untuk dilempar ke pasar guna memenuhi kebutuhan konsumen. Kegiatan pelaku ini disebut dengan kegiatan produksi.
- Konsumen: Yaitu perseorangan, rumah tangga atau kelompok organisasi yang memiliki kemampuan dari pendapatannya (biasa disebut dengan daya beli) dan memiliki pilihan-pilihan atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan (human wants) mereka di pasar. Kegiatan pelaku konsumen ini disebut dengan kegiatan konsumsi.
- Lembaga Perbankan dan Keuangan: Merupakan organisasi formal, dapat juga berbentuk kelompok perseorangan, yang memiliki tujuan untuk memfasilitasi kegiatan perekonomian dengan mengumpulkan dana yang ada dimasyarakat, mengelolanya dan kemudian menyalurkannya dalam bentuk pemberian pinjaman maupun produk jasa keuangan lainnya.
- Badan Publik dan Pemerintah: Dalam sistem perekonomian suatu negara Lembaga Publik dan Pemerintah berfungsi untuk

menjaga kepentingan masyarakat secara umum, menjadi wasit dalam sistem perekonomian pasar, dan mungkin juga memberikan pelayanan publik yang tidak ditangani oleh sektor swasta.

a. Model Perekonomian Tertutup.

Para pelaku perekonomian ini, khususnya Produsen dan Konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Untuk memfasilitasi kegiatan produksi dan kegiatan konsumsi ini secara efektif maka sistem perekonomian kita memerlukan Lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya seperti pasar modal, lembaga asuransi, lembaga penjamin, pegadaian atau lembaga keuangan mikro yang terdapat di daerah pedesaan. Lembaga Perbankan peranannya sangat vital untuk mengumpulkan dana-dana yang ada di masyarakat, yang selanjutnya mereka akan melakukan pengalokasian dana tersebut melalui pemberian fasilitas perkreditan atau jasa perbankan lainnya.

b. Model Perekonomian Terbuka.

Sejauh ini kita masih memperlakukan sistem kegiatan ekonomi pasar secara tertutup. Artinya kita belum memasukkan peran luar negeri dalam sistem ekonomi tersebut. Memang banyak model ekonomi yang membagi sistem ekonomi tersebut ke dalam “sistem ekonomi tertutup” dan “sistem ekonomi terbuka”. Pada sistem ekonomi yang terbuka, kita melihat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara.

c. Mengukur Kinerja Perekonomian

Melalui pemahaman konsep sistem perekonomian circular flow seperti diatas kita kemudian dapat segera mengetahui sejauh mana kegiatan perekonomian di suatu masyarakat memang secara nyata telah menunjukkan perkembangannya dengan baik atau sebaliknya.

d. Sebagai analogi dalam konteks perusahaan, kita mengenal Laporan Rugi Laba (income statement) yang dipublikasikan oleh perusahaan pada awal akhir triwulan pertama. Laporan Rugi Laba ini merupakan potret kinerja perusahaan dalam melakukan kegiatannya selama satu tahun berjalan. Jika perusahaan memperoleh laba, sebagian dapat dibagikan dalam bentuk pembagian deviden dan sisanya dapat ditahan sebagai tambahan modal perusahaan dalam Neraca Kekayaan Perusahaan (balance sheet).

Demikian pula halnya pada perekonomian suatu negara. Perkembangan kegiatan ekonomi di negara tersebut dapat dinilai kinerjanya untuk satu tahun fiskal tertentu. Seperti halnya dengan analogi Laporan Rugi Laba, para ekonom kemudian sering menggunakan konsep Produk Domestik Bruto (PDB) untuk melihat dan mengukur sejauh mana kinerja para pelaku ekonomi tersebut (produsen, konsumen, lembaga perbankan dan pemerintah) telah sukses menghasilkan nilai tambah atau memberikan kontribusi positif pada sistem perekonomian nasional dalam satu tahun, khususnya dalam kerangka sistem perekomian tertutup.

Sebagai contoh di indonesia, BPS mengeluarkan secara rutin buku laporan pendapatan nasional ini dalam publikasinya. Para ahli ekonomi umumnya membaginya lebih lanjut komponen pendapatan nasional ke dalam komponen pengeluaran agregat (AD) seperti:

- Kegiatan konsumsi ( C )
- Investasi (I)
- Pengeluaran pemerintah (G)
- Ekspor (x)

Komponen penyeimbangannya yang disebut dengan penerimaan agregat (Y) terdiri dari komponen agregat berikut ini:

- Kegiatan konsumsi ( C )
- Tabunga (S), Pajak (T) dan
- Impor (M)
- Akurasi sistem penghitungan pendapatan nasional akan menjadi lebih baik jika kantor statistik memperkirakan tehnik perhitungan atas dasar pendekatan penerimaan agregat seperti yang dilakukan oleh sebagian besar negara negara maju
- Sedangkan di negara berkembang termasuk indonesia, pendapatan nasionalnya dihitung dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Alasannya kita belum memiliki data yang lengkap tentang laporan pendapatan dari masing masing rumah tangga di seluruh penjuru tanah air.

## PEMBAHASAN MATERI

### A. PENDAHULUAN

- Sejarah menguraikan rangkaian-rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu, sehingga tergambar dengan jelas perubahan-perubahan yang terjadi dalam satu kurun waktu. Perubahan-perubahan tersebut bisa melahirkan keadaan sekarang lebih baik ataupun lebih buruk dari keadaan masa lalu. Apakah setelah sekian tahun dilakukan pembangunan ekonomi, keadaan ekonomi sekarang lebih maju atau lebih mundur. Hal ini perlu kita nilai berdasarkan tolok ukur atau kriteria kemajuan ekonomi.
- Dalam kontek sejarah, satu peristiwa yang terjadi tidak berdiri sendiri dalam arti peristiwa tersebut tidak berkaitan dengan peristiwa-peristiwa lain sebelumnya. Ada hubungan sebab akibat, ada hubungan saling mempengaruhi antara satu peristiwa dengan peristiwa lain. Untuk mengetahui bagaimana sifat hubungan itu, bagaimana akibat peengaruh hubungan itu, kita perlu memahami beberapa peralatan analisis ekonomi.

(1) Kriteria Kemajuan Ekonomi

a. Bagi negara-negara maju/ industri

1. Tingkat pendapatan per kapita

1. Distribusi pendapatan nasional

1) Tingkat inflasi

2) Tingkat pengangguran

Sejauh yang merupakan obyek perhatian adalah ekonomi negara-negara yang masih berkembang maka perlu diperhatikan beberapa aspek lagi (B.S. Mulana, 1983).

b. Bagi negara-negara sedang berkembang

- Kriteria yang bersifat struktural:

1) Tingkat pendapatan per kapita

2) Distribusi pendapatan nasional

3) Peranan sektor industri/ manufaktur dan jasa

4) Keterpaduan antar industri, antar sektor ekonomi, dan antar daerah

- Kriteria yang bersifat tahunan :

5) Tingkat inflasi

6) Tingkat pengangguran

- Yang diinginkan negara-negara sedang berkembang adalah keadaan yang dapat dan telah mengalami proses yang membawa perubahan-perubahan struktural yang berarti. Maka dalam kriteria struktural ditambah besarnya peranan sektor-sektor non pertanian/ non ekstraktif dalam GNP atau GDP, besarnya peranan sektor industri dan jasa (manufaktur) dalam ekspor, tingginya tingkat keterpaduan secara vertikal dalam sektor industri, serta tingkat keterpaduan antara sektor dan antar daerah dalam ekonomi (B.S. Muljana, 1983).

- Untuk menilai kesuksesan suatu Pelita di Indonesia lazim di pergunakan kriteria tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan (dua logos dari Trilogi Pembangunan).

## (2) Peralatan Analisis Ekonomi

- Langkah awal dalam mempelajari mekanisme kerja ekonomi nasional adalah mendekati kegiatan ekonomi melalui tiga sisi, yaitu segi produksi, segi pembelanjaan/ pengeluaran dan segi pendapatan. Ketiga pendekatan itu dalam berbagai buku literatur disebut analisis ekonomi makro (Susanto Hg., 1995).
- Beberapa konsep/ indikator penting yang perlu dipahami dalam rangka analisis ekonomi makro antara lain : produk domestik bruto (PDB), pendapatan nasional (Y), pendapatan per kapita, nilai tambah (Vas), kontribusi sektor (Ks), laju pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi (In), jumlah uang beredar (JUB), debt service ratio (DSR), nilai tukar perdagangan (TOT), tingkat pengangguran, tingkat kesenjangan dan incremental capital output ratio (ICOR).

### a. Produk Domestik Bruto (PDB = GDP)

- 1) Dilihat dari sumber pembentukannya, GDP diperoleh dengan cara menjumlahkan seluruh nilai tambah dari sektor-sektor usaha. Rumus :

$$\text{GDP} = \text{VAsp} + \text{VAss} + \text{VAst}$$

Keterangan :

Vasp = Nilai Tambah Sektor Primer

Vass = Nilai Tambah Sektor Sekunder

VAst = Nilai Tambah Sektor Tertier

- 2) Dilihat dari penggunaannya (dari segi pengeluaran), nilai GDP harus sama dengan nilai pengeluaran konsumsi rumah tangga ©

+ konsumsi pemerintah (G)

+ pembentukan modal bruto (I)

+ ekspor dikurangi impor (X - M).

$$\text{Rumus : } \text{GDP} = \text{C} + \text{I} + \text{G} + (\text{X} - \text{M})$$

### b. Pendapatan Nasional (NI - Y)

- Cara perhitungan pendapatan nasional : Rumus :

$$\text{GNP} = \text{GDP} + \text{F}$$

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{D}$$

$$\begin{aligned} \text{NI} &= \text{NNP} - \text{Nit} \\ &= (\text{GDP} + \text{F}) - \text{D} - \text{Nit} \\ \text{NI} &= \text{GDP} + \text{F} - \text{D} - \text{Nit} \end{aligned}$$

Skema :

Produk Domestik Bruto (GDP)	Rp xxxxx
Ditambah : pendapatan neto terhadap luar Negeri atas faktor produksi (F)	<u>Rp xxxxxx</u>
Produk nasional Bruto (GNP)	Rp xxxxx
Dikurangi : penyusutan (D)	<u>Rp xxxxx</u>
Produk Nasional Neto (NNP)	Rp xxxxx
Dikurangi : pajak tak langsung (Nit)	<u>Rp xxxxx</u>
Pendapatan Nasional (NI = Y)	Rp xxxxx

c. Pendapatan per kapita

- Pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk
- Rumus :

$$\text{Pendapatan per kapita} = \frac{\text{NI}}{\text{P}}$$

d. Nilai tambah (VAs)

- Rumus :  

$$\text{VAs} = \text{OPs} - \text{IPs}$$
- Keterangan :  
 VAs = Nilai tambah masing-masing sektor  
 OPs = Output (keluaran) sektor  
 Ips = Input (masukan) sektor

e. Kontribusi Sektor (Ks) Rumus :

$$\text{Ks} = \frac{\text{VAs (Rp)}}{\text{PDB (Rp)}} \times 100\%$$

e. Laju pertumbuhan Ekonomi

Rumus :

$$1. \text{ Cara tahunan} = \frac{\text{PDB}_x - \text{PDB}_{x-1}}{\text{PDB}_{x-1}} \times 100\%$$

$$r = \left[ \left( \frac{\text{tn}}{\text{to}} \right)^{\frac{1}{n}} - 1 \right] \cdot 100\%$$

Keterangan :

r = laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun

n = jumlah tahun (mulai dengan sampai dengan)

tn = tahun terakhir periode

to = tahun awal periode

f. Tingkat Inflasi (IF) Rumus (Sederhana) :

- 1) Menghitung IHK (Indeks Harga Konsumen)

$$\text{Index Sumber} = \frac{\text{Current Price}}{\text{Base-period price}} \times 100\%$$

- 2) Menghitung tingkat inflasi (inflation rate = IR)

$$\text{Bulanan : IR}_n = \frac{\text{IHK}_n}{- 100\% \text{ IHK}_{n-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

IR = angka inflasi (%) bulan n

IHK<sub>n</sub> = Indeks umum IHK Gabungan 17 kota bulan n

IHK<sub>n-1</sub> = Indeks umum IHK Gabungan 17 kota bulan ke(n-1)

- (1) Tahunan: cummulative method (dengan menjumlahkan inflasi setiap bulan)

$$\text{IR}_x = \left( \frac{\text{IHK}_x}{\text{IHK}_{(x-1)}} \times 100\% - 100\% \right)$$

Keterangan :

IR<sub>x</sub> = tingkat inflasi tahun x

IHK<sub>n</sub> = IHK tahun x

IHK<sub>n-1</sub> = IHK tahun yang lalu

# PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STRUKTUR EKONOMI 2

## A. Pertumbuhan Ekonomi

### 1. Arti Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja (sumber pendapatan). Pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*), yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Menurut **Prasetyo (2012)** Pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai pertambahan output atau pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu tertentu.

### 2. Konsep Pendapatan Nasional

Ada dua arti dari PN, yakni arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, PN adalah Pn. Sedangkan dalam arti luas, PN dapat merujuk ke PDB, atau merujuk ke PNB atau ke produk nasional neto (PNN).

## PDB

Sedangkan melalui pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi dimasing-masing sektor, seperti tenaga kerja (upah/gaji), pemilik modal (bunga/hasil investasi), Pemilik tanah (hasil jual/sewa tanah), dan pengusaha (keuntungan bisnis/perusahaan). Semua pendapatan ini dihitung sebelum dipotong oleh pajak penghasilan dan pajak-pajak langsung lainnya. Dalam pendekatan ini, penghitungan PDB juga mencakup penyusutan dan pajak-pajak tidak langsung neto. Oleh sebab itu, dalam pendekatan pendapatan, PDB adalah jumlah dari nilai tambah bruto (NTB) dari kesembilan sektor tersebut.

$$PDB = NTB_1 + NTB_2 + \dots + NTB_9$$

Adapun menurut pendekatan pengeluaran, PDB adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir, yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swastano - profit oriented (C), pembentukan modal tetap domestik bruto, termasuk perubahan stok (I), pengeluaran konsumsi pemerintah (G), ekspor (X), dan impor (M).

$$PDB = C + I + G + X - M$$

### 3. Sumber-Sumber Pertumbuhan

Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan pada sisi permintaan agrerat (AD) atau/dan sisi penawaran agrerat (AS). Seperti yang diilustrasikan pada gambar 2.1, titik perpotongan antara kurva AD dengan kurva AS adalah titik keseimbangan ekonomi yang menghasilkan suatu jumlah output agrerat (PDB) tertentu dengan tingkat harga umum tertentu. Output agrerat yang dihasilkan didalam suatu ekonomi (atau negara) selanjutnya membentuk PN.

### a. Sisi permintaan agregat

Dari sisi AD pergeseran kurvanya kekanan yang mencerminkan peningkatan permintaan di dalam ekonomi bias terjadi karena PN, yang terdiri dari permintaan masyarakat (konsumen), perusahaan, dan pemerintah meningkat. Sisi AD (penggunaan PDB), terdiri dari empat komponen :

- Konsumsi rumah tangga
- Investasi (termasuk perubahan stok)
- Konsumsi/pengeluaran pemerintah
- Ekspor neto (ekspor barang dan jasa minus impor barang dan jasa)

Sisi AD dalam suatu ekonomi bias di gambarkan dalam suatu model ekonomi makro sederhana berikut:

$$Y + I + G + X - M$$

$$C = C_y + C_a$$

$$I = -i_r + I_a$$

$$G = G_a$$

$$X = X_a$$

$$M = mY + M_a$$

Persamaan (2.8<sup>3</sup>) menggambarkan keseimbangan antara AS (total output/PDB) dan AD yang terdiri dari empat komponen tersebut. Persamaan (2.9) adalah besarnya konsumsi rumah tangga yang di tentukan oleh tingkat pendapatan dan faktor otonom (tidak tergantung pada tingkat/perubahan pendapatan);  $c$  adalah koefisien konsumsi (marginal propensity to consume; MPC) dengan nilai positif antara 0 dan 1, yang artinya, semakin tinggi pendapatan semakin besar pengeluaran konsumsi rumah tangga. Persamaan (2.10) menunjukkan nilai atau jumlah investasi misalnya dalam jumlah proyek sangat di tentukan oleh tingkat suku bunga ( $i$ ) di dalam negeri, selain itu juga oleh faktor-faktor yang bersifat otonom. Persamaan (2.11) adalah pengeluaran pemerintah yang sifatnya otonom: besarnya kecilnya pengeluaran pemerintah di tentukan oleh faktor-faktor lain (di antaranya faktor politik) di luar model tersebut.

Persamaan (2,12) karena Indonesia adalah Negara kecil, di lihat dari pangsa perdagangan luar negerinya di dalam jumlah volume perdagangan dunia, maka pertumbuhan ekspor Indonesia lebih di tentukan oleh faktor-faktor eksternal di luar pengaruh Indonesia. Persamaan (2.13) menggambar bahwa impor di tentukan oleh tingkat pendapatan di dalam negeri, selain juga oleh faktor otonom.

### **b. Sisi penawaran agregat**

Dari sisi AS pertumbuhan output bisa di sebabkan oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang di gunakan, seperti tenaga kerja (L), modal (K) dan tanah (Tn). Faktor produksi terakhir ini khususnya penting bagi sektor pertanian dan energi (E). jadi, relasi antara output dengan faktor-faktor produksi dapat di tulis dal suatu fungsi sederhana sebagai berikut:

$$Q = f (X_1, X_2, X_3, X_n)$$

+ + +

Dimana Q mewakili volume output dan  $X_1, X_2, \dots, X_n$  adalah volume dari faktor- faktor yang di gunakan untuk menghasilkan output tersebut. Tanda-tanda positif di bawah setiap X menandakan hubungan antara setiap faktor produksi tersebut dengan output adalah positif : jika jumlah  $X_1$  meningkat, output juga meningkat.

## **B. Teori – Teori dan Model – Model Pertumbuhan**

### **1. Teori dan Model Pertumbuhan Neoklasik**

Ada dua aliran pemikiran mengenai pertumbuhan ekonomi (dilihat dari sisi AS/produksi), yakni teori neoklasik dan teori modern. Dalam kelompok teori neoklasik, faktor – faktor produksi yang dianggap berpengaruh terhadap pertumbuhan output adalah jumlah L dan K ; yang terakhir ini bias dalam bentuk keuangan atau barang modal (seperti mesin).

Dalam model pertumbuhan neoklasik, peran teknologi dan ilmu pengetahuan serta peningkatan kualitas dari L dan dari input produksi lainnya terhadap output tidak mendapat perhatian eksplisit atau dianggap konstan( teknologi dianggap suatu koefisien yang tetap tidak berubah) walaupun dalam literatu rmengenai

dampak positif dari progress teknologi (T). Teori neoklasik lebih fokus pada efek akumulasi K (investasi) dan pertumbuhan L terhadap output.

Model pertumbuhan neoklasik hanya melihat pada satu sumber pertumbuhan saja, yakni kontribusi dari penambahan jumlah dari faktor – faktor produksi. Dalam Nafziger (1997), dibahas pengalaman dari kelompok negara – negara industri baru (NICs) seperti Taiwan, Korea Selatan, Hongkong dan Singapura yang menunjukkan bahwa kontribusi K per L terhadap pertumbuhan ekonomi sangat dominan antara 50% hingga 90% tetapi T juga sangat berperan. Hal ini dicerminkan oleh nilai “sisa”, yakni T di dalam fungsi produksi **Cobb Douglas** :

$$Y_t = T_t K_t^a L_t^b$$

Dimana Y = tingkat produksi (output) pada periode t, a dan b = masing – masing produktivitas dari L dan K. Nilai sisa dianggap sebagai efek dari pertumbuhan produktivitas dari K dan L secara total antara 10% hingga 50%. Artinya, T menyumbang sekitar 10% – 50% terhadap pertumbuhan ekonomi.

## 2. Teori Modern dan Model Pertumbuhan Endogen.

Dalam teori modern, faktor – faktor produksi yang krusial tidak hanya L dan K, tetapi juga T (yang terkandung di dalam barang dan modal atau mesin), E, Kewirausahaan (Kw), bahan baku (BB), dan material (Mt). Faktor – faktor lain yang teori modern juga anggap berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah ketersediaan, kondisi infrastruktur, hukum serta peraturan stabilitas politik kebijakan pemerintah (yang antara lain dicerminkan oleh besarnya pengeluaran pemerintah, birokrasi dan dasar tukar internasional).

Dilihat dari kerangka pemikiran teori modern tersebut ada perbedaan yang mendasar dengan kelompok teori neoklasik. Diantaranya adalah mencakup L, K dan Kw. Dalam kelompok teori modern kualitas L lebih penting dari pada kuantitasnya. Kualitas L, tidak hanya dilihat dari tingkat pendidikan, tapi juga kondisi kesehatannya.

**Model pertumbuhan Endogen** juga sangat relevan untuk menganalisis laju serta pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama karena dampak dari kemajuan iptek serta peningkatan kualitas SDM terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri semakin nampak jelas saat dibandingkan 30 tahun yang lalu. Salah satu model pertumbuhan neoklasik yang bias diendogenkan adalah dari Harrod-Domar, yang intinya adalah suatu relasi antara penambahan K dan pertumbuhan ekonomi (PDB). Dua variable fundamental dari model ini adalah penambahan K terhadap pertumbuhan PDB (Y). Rasio ini disebut  $ICOR = \Delta K / \Delta Y$ . Sejak penambahan K adalah investasi (I) dalam definisi, maka  $ICOR = I / \Delta Y$ .

### 3. **Pertumbuhan TFP**

Berdasarkan studi - studi empiris mengenai pertumbuhan ekonomi dan sumber - sumbernya, **Pack** dan **Page** menyatakan bahwa terdapat dua sumber utama pertumbuhan, yakni pertumbuhan yang bersumber dari peningkatan I (investment - driven growth) dan pertumbuhan yang didorong oleh pertumbuhan produktivitas. (productivity- driven growth).

Sumber pertumbuhan output yang berasal dari peningkatan produktivitas dari input - input produksi dapat dihitung secara parsial, yakni dari masing - masing input (PFP), atau totalnya dari semua input (TFP). Menghitung TFP bisa dengan menggunakan fungsi produksi Cobb - Douglas, yang selanjutnya ditransformasi kedala bentuk linier logaritmatik sebagai berikut.

$$\ln Y_t = \ln T_t + \alpha \ln K_t + \beta \ln L_t$$

biasanya dalam penelitian empiris, fungsi produksi diasumsikan memiliki skala hasil yang konstan, oleh karena itu, persyaratan pokok yang harus dipenuhi adalah jumlah dari kedua koefisien elastisitas sama dengan 1, atau  $\alpha + \beta = 1$ . Dengan persyaratan ini, maka persamaan tersebut dapat dimodifikasi menjadi dalam bentuk linear logaritmatik di persamaan (2.16) dapat dirumuskan kembali sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{Ln Yt} &= \text{Ln Tt} + (1 - \beta) \text{Ln Kt} + \beta \text{Ln Lt} \\ &= \text{Ln Tt} + \text{Ln Kt} + \beta (\text{Ln Lt} - \text{Ln Kt}) \\ \text{Ln Yt} - \text{Ln Kt} &= \text{Ln Tt} + \beta (\text{Ln Lt} - \text{Ln Kt}) \\ \text{Ln (Yt/Kt)} &= \text{Ln Tt} + \beta \text{Ln (Lt / Kt)} \\ \text{Yt / Kt} &= \text{Tt (Lt / Kt)} \end{aligned}$$

Koefisien b yang diestimasi melalui persamaan regresi diatas berfungsi sebagai alokator untuk mengestimasi peran input K terhadap pertumbuhan output, sedangkan koefisien a yang didapat dari 1-b berfungsi sebagai alokator untuk mengestimasi peran L kerja terhadap pertumbuhan output. Hasil estimasi nilai T memberikan perkiraan besarnya kontribusi dari perubahan TFP terhadap perubahan output.

**Tabel 2.1**  
**Laju Pertumbuhan Rata – Rata Per tahun output,TFP,**  
**Dan Input – Input : 1965- 1996 (%)**

Negara	TFP	Output	Tanah	Tenaga kerja	Binatang	pupuk	Mesin
Cina	0,47	4,34	0,14	1,77	2,45	10,64	8,85
Jepang	2,70	1,15	-0,92	-4,06	1,66	-0,13	15,16
Korea	3,30	3,78	-0,26	-1,71	3,46	3,05	31,77
Selatan	1,83	0,27	0,92	1,07	0,98	3,51	0,99
Kampuchea	0,18	4,04	0,60	1,65	1,42	11,37	7,60
Indonesia	3,55	5,25	1,96	-0,01	1,05	8,77	9,58
Malaysia	0,02	2,78	-0,07	1,86	2,04	9,21	5,39
Malaysia	1,33	2,74	1,29	1,66	-0,42	5,90	2,42
Myanmar	1,00	3,89	1,87	1,84	0,37	12,32	11,10
Myanmar	0,17	3,67	0,33	1,78	1,51	7,66	12,24
Flipina	0,42	1,74	0,06	1,04	0,37	11,19	6,19
Flipina	0,50	2,90	0,15	1,42	0,81	10,35	11,88
Thailand	0,70	2,73	1,17	1,96	2,13	16,48	10,35
Thailand	0,47	3,72	0,54	2,11	2,27	11,85	13,54
Vietnam	0,67	1,49	0,19	1,63	0,19	2,94	5,30
Bangladesh							
India							
Nepal							
Pakistan							
Sri Lanka							

**Sumber : tabel 1 dalam Suhariyanto (2001)**

**Teori Klasik**

Beberapa teori klasik antara lain sebagai berikut :

- 1) Teori Pertumbuhan Adam Smith

Ada 3 faktor penentu proses produksi atau pertumbuhan, yaitu:

- Sumber Daya Alam (SDA)
- Sumber Daya Manusia (SDM)
- Barang Modal

#### **4. Teori Pertumbuhan David Ricardo**

Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh SDA (dalam arti tanah) yang terbatas jumlahnya, dan jumlah penduduk yang menghasilkan jumlah tenaga kerja yang menyesuaikan diri dengan tingkat upah, diatas atau dibawah tingkat upah alamiah (minimal). Perubahan teknologi menyebabkan produktivitas tenaga kerja meningkat.

#### **5. Teori Pertumbuhan dari Thomas Robert Malthus**

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan suatu perekonomian adalah kesejahteraan negara, yakni jika PDB potensialnya meningkat.

#### **6. Friedrich List (1789-1846)**

Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dapat dibagi menjadi empat tahap sebagai berikut:

- Masa berburu dan pengembaraan
- Masa beternak dan bertani
- Masa bertani dan kerajinan
- Masa kerajinan, industri, perdagangan

#### **7. Teori Dependensi**

Secara historis, teori Dependensi lahir atas ketidakmampuan teori Modernisasi membangkitkan ekonomi negara-negara terbelakang, terutama negara di bagian Amerika Latin. Secara teoritik, teori Modernisasi melihat bahwa kemiskinan dan keterbelakangan yang terjadi di negara Dunia Ketiga terjadi karena faktor internal di negara tersebut. Karena faktor internal itulah kemudian negara Dunia Ketiga tidak mampu mencapai kemajuan dan tetap berada dalam keterbelakangan.

### **C. Pertumbuhan Ekonomi Selama Periode Orde Baru Hingga Era Megawati**

Pembangunan ekonomi Indonesia selama pemerintah orde baru (sebelum krisis ekonomi 1997) dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami suatu proses pembangunan ekonomi yang sangat baik. Keberhasilan ini dapat diukur dengan sejumlah indikator ekonomi makro. Dua diantaranya yang umum digunakan adalah tingkat PN perkapita dan laju pertumbuhan PDB pertahun. Sejak Pelita 1 dimulaim PN Indonesia perkapita mengalami peningkatan yang relatif tinggi setiap tahun (akhir tahun 1980 mendekati US\$ 500). Hal ini disebabkan pertumbuhan PDB rata – rata pertahun yang tinggi (7% - 8% selama tahun1970 dan 3% - 4 % selama 1980). Selama 70-an sampai 80- an, proses pembangunan ekonomi di Indonesia tidak mengalami banyak guncangan yang cukup serius, yang utama disebabkan faktor – faktor eksternal seperti merosotnya harga minyak mentah dipasar internasional menjelang pertengahan tahun 1980, dan resesi ekonomi dunia pada dekade yang sama. Pada pemerintah orde baru menganut sistem ekonomi terbuka, maka guncangan – guncangan eksternal seperti itu terasa dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Tergantung pada pemasukan dollar AS dan hasil ekspor komoditi – komoditi primer, khususnya minyak dan hasil pertanian. Selain itu, faktor yang mempengaruhi perekonomian Indonesia juga tergantung pada pertumbuhan ekonomi dunia, terutama di negara industry maju, seperti AS, Jepang, dan Eropa Barat yang merupakan pasar penting bagi ekspor Indonesia.

Resesi ekonomi dunia yang terutama disebabkan oleh rendahnya laju pertumbuhan PDB atau PN di negara industri di negara industri maju tersebut, yang secara bersama mendominasi perdagangan dunia, mengakibatkan lemahnya permintaan dunia terhadap barang ekspor dari Indonesia yang selanjutnya dapat menyebabkan deficit saldo neraca perdagangan, kekurangan cadangan devisa (khususnya dollar AS), berkurangnya Pengaruh

Resesi Dunia Terhadap Perumbuhan Ekonomi Indonesia: Suatu Ilustrasi Teoretis Dampak negative dari resesi ekonomi dunia tahun 1982 terhadap perekonomian yang selama 1982 – 1988 jauh

lebih murah dibandingkan periode sebelumnya. Karena pengalaman menunjukkan bahwa biasanya resesi ekonomi dunia lebih mengakibatkan permintaan dunia berkurang terhadap bahan-bahan baku (yang sebagian besar diekspor oleh LDCs) daripada permintaan terhadap barang – barang konsumsi seperti alat – alat rumah tangga dari elektronik dan mobil (yang pada umumnya adalah ekspor negara – negara maju).

Selama pertengahan pertama 1990-an rata – rata pertumbuhan per tahun antara 7,3% hingga 8,2% yang membuat Indonesia termasuk negara di ASEAN dengan pertumbuhan yang tinggi. Dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, rata – rata PN per kapita di Indonesia naik pesat setiap tahun yang pada tahun 1993 dalam dollar AS sudah melewati angka 800. Namun, akibat krisis, PN per kapita Indonesia menurun drastic ke 640 dolar tahun 1998 dan 580 dollar AS tahun 1999. Perkembangan PN Per Kapita Indonesia: 1968-1999 (dalam dollar AS)

Pada krisis ekonomi mencapai klimaksnya, yakni tahun 1998, laju pertumbuhan PDB jatuh drastic hingga 13,1%. Namun pada tahun 1999 kembali positif, walaupun sangat kecil, sekitar 0,8% dan tahun 2000 ekonomi Indonesia sempat mengalami laju pertumbuhan yang tinggi, hamper mencapai 5%. Pada tahun tersebut para pelaku – pelaku bisnis sempat optimis mengenai prospek perekonomian Indonesia. Akan tetapi, tahun 2001 laju pertumbuhan ekonomi Kembali merosot hingga 3,3% akibat gejolak politik yang sempat memanas Kembali, dan pada tahun 2002 pertumbuhan mengalami sedikit perbaikan menjadi 3,66%.

Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan nilai taambah bruto (NTB) dari semua sector ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut. Dengan memakai persamaan (3,7) misalkan disatu ekonomi hanya ada adua sector, yakni industri dan pertanian dengan NTB masing – masing, yakni NTBi dan NTBp yang membentuk PDB: atau  $PDB: NTB = NTBi + NTBp$ ,  $1 = [a(t)p]PDB$ .

Berdasarkan model ini, kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besarnya dengan jumlah dari empat faktor berikut.

1. Kenaikan permintaan domestik, yang memuat permintaan langsung untuk produk industri manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestik untuk produk sektor – sektor lainnya terhadap sektor industri manufaktur
2. Perluasan ekspor (pertumbuhan dan diversifikasi) atau efek total dari kenaikan jumlah ekspor terhadap produk industri manufaktur
3. Substitusi impor atau efek total dari kenaikan proporsi yang dipenuhi lewat produksi domestik terhadap output industri manufaktur
4. Perubahan teknologi atau efek total dari perubahan koefisien input–input (aji) didalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur.

#### **Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia: 1998-2002(%)**

Sementara BPS dari publikasi tahunan Statistik Indonesia, memberikan bukti empiris mengenai pertumbuhan dari sejumlah indikator PN dan PN per kapita selama 1998–2001. Laju pertumbuhan PDB yang positif tahun itu lebih rendah daripada laju pertumbuhan penduduk pada tahun yang sama, sehingga mengakibatkan tingkat kesejahteraan masyarakat menurun.

#### **D. Laju Pertumbuhan Beberapa Pendapatan Agregat dan Per Kapita Atas Dasar Harga konstan 1993 (%)**

Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk negara- negara yang juga mengalami krisis ekonomi, Indonesia adalah negara terburuk. Berdasarkan laporan tahunan dari Asian Development Bank 2002 (ADB,2002), Thailand yang mengalami krisis sama parahnya seperti yang dialami Indonesia ternyata mampu menggenjot pertumbuhan sebesar 4,4% tahun1999. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun yang sama hanya 0,9% (menurut BPS 0,8%), walaupun perkiraan pertumbuhan ekonomi Thailand 2002 akan sedikit dibawah pertumbuhan PDB Indonesia. Pada tahun 1999 Vietnam merupakan negara yang paling baik pertumbuhan ekonominya di kawasan Asia Tenggara.

**E. Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Asia Tenggara: 1999-2002 (%)**

Negara/Kawasan	1999	2000	2001	2001
Asia Tenggara	3,8	5,9	1,9	3,4
Filipina	3,4	4	3,4	4
Indonesia	0,9*/0,8*	4,8/4,9	3,3/3,3	3/3,7
Kampuchea	6,9	5,4	5,3	4,5
Laos	7,3	5,9	5,5	5,8
Malaysia	6,1	8,3	0,4	4,2
Myanmar	10,9	6,2	Tad	Tad
Singapura	6,9	10,3	2	3,7
Thailand	4,4	4,6	1,8	2,5
Vietnam	4,7	6,1	5,8	6,2

**Keterangan:** \*= data ADB/\*\*=data BPS

**F. PNB Per Kapita Indonesia dan Sejumlah Negara Lainnya di Asia (US\$ atas Harga Berlaku): 1997-2001**

Negara	1997	1998	1999	2000	2001
Bangladesh	340	340	350	370	370
Cina	710	740	780	840	890
India	420	420	440	450	460
Indonesia	1.088	640	580	570	680
Jepang	39.190	33.720	33.350	35.620	33.990
Korea Selatan	11.390	8.470	8.480	8.960	9.400
Malaysia	4.600	3.630	3.370	3.370	3.640
Nepal	230	220	230	240	250
Pakistan	480	460	450	440	420
Papua Nugini	980	840	770	670	580
Filipina	1.240	1.090	1.050	1.040	1.050
Sri Langka	790	810	820	850	830
Thailand	2.780	2.110	2.000	2.010	1.970
Vietnam	340	350	370	390	410

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat sektor keuangan/perbankan yang pada masa Orde Baru berkembang

sangat pesat hancur sama sekali, terutama karena Krisis ekonomi yang melanda Indonesia membuat sektor keuangan/perbankan yang pada masa Orde Baru berkembang sangat pesat hancur sama sekali, terutama karena kredit macet antarbank. Dari sisi AS, sektor industri manufaktur dan sektor konstruksi (bangunan) juga mengalami penurunan produksi yang signifikan. Dalam nilai nominal, sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan positif selama 1998 hanya sektor pertanian dengan 1,31%, listrik, gas, dan air bersih 3,11%, dan pengangkutan dan komunikasi 16,23%. Pertumbuhan positif sektor pertanian terutama karena dukungan subsektor perkebunan, kehutanan, dan perikanan yang produksinya terus meningkat. Jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS membuat harga komoditas-komoditas pertanian dalam dolar AS menjadi lebih murah, yang membuat daya saing harga dari sektor pertanian meningkat.

Industri manufaktur yang merupakan andalan ekonomi Indonesia sebagai sumber pertumbuhan juga terkena dampak oleh krisis ekonomi. Hal ini disebabkan, turunnya kemampuan belanja dari masyarakat dan lesunya kegiatan-kegiatan ekonomi domestik yang membuat menurunnya jumlah AD, yang terdiri dari permintaan akhir dari masyarakat dan permintaan perantara dari sektor-sektor ekonomi terhadap produk-produk manufaktur. Sedangkan, dampaknya melalui AS terutama karena tingginya suku bunga pinjaman, terbatasnya kredit dari bank, mahalannya bahan-bahan baku impor, dan akibat ditolaknya L/C yang dikeluarkan oleh bank-bank di luar negeri.

Namun dalam nilai riil(harga konstan), semua sektor mengalami pertumbuhan negatif, kecuali listrik, gas, dan air minum dengan 2,6%. Sedangkan sektor pertanian mengalami pertumbuhan -0,7%, dan sektor industri manufaktur -11,4%. Tahun 1999 beberapa sektor mengalami perbaikan terutama listrik, gas, dan air minum yang pertumbuhannya mencapai 8% lebih. Tahun 2000, semua sektor dapat dikatakan telah mengalami *recovery*, walaupun belum mencapai tingkat 1995. Data triwulan III 2002 maupun data selama 2002 juga menunjukkan pertumbuhan yang positif di semua sektor.

### G. Faktor-faktor penentu prospek pertumbuhan ekonomi indonesia

Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas dari input-input produksi seperti L,K,T,BB,Kw, dan E. Akan tetapi, faktor-faktor ini lebih krusial dalam menentukan prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka pendek (2003) cukup optimis sekitar 4,5% (naik dari realisasi pertumbuhan 2002 3,75%)

### H. Realisasi pertumbuhan PDB Riil tahun 2001 dan perkiraannya tahun 2002 dan 2003 di Indonesia dan beberapa negara asia lainnya

Tabel Pertumbuhan %

Negara	2001	2002	2003
Cina	7,3	7,5	7,2
Hongkon	0,2	1,5	3,4
g Korea	3,0	6,3	5,9
Selatan	-1,9	3,3	4,0
Taiwan			
Singapura	-2,0	3,6	4,2
<b>INDONESIA</b>	3,3	3,7	4,5
Filipina	3,2	4,0	3,8
Thailand	1,8	3,5	3,5
Malaysia	0,5	3,5	5,3
Vietnam	5,0	5,3	6,5

Faktor determinan internal dapat dibedakan lagi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor non ekonomi khususnya politik dan sosial. Sedangkan faktor eksternal didominasi oleh faktor-faktor ekonomi seperti perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi kawasan dan dunia

## 1. Faktor-Faktor Internal

Penyebab utama berubahnya krisis rupiah menjadi suatu krisis ekonomi paling besar yang pernah dialami Indonesia tahun 1998 adalah karena buruknya fundamental ekonomi sosial. Sedangkan lambatnya proses pemulihan ekonomi nasional lebih disebabkan oleh kondisi politik, sosial dan keamanan di dalam negeri.

Adanya tanda-tanda bahwa Indonesia semakin terpuruk dalam persaingan di pasar global, yaitu:

- a. Global Competitiveness Report 2002-2003 menunjukkan bahwa peringkat daya saing perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan turun tiga tingkat dari urutan ke 64 tahun lalu ke urutan 67 (dari 80 negara) dan indeks daya saing ekonomi mikro turun sembilan tingkat 55 ke 64
- b. Sejak tragedi WTC tahun 2001, laju pertumbuhan ekspor Indonesia cenderung menurun dikarenakan berbagai alasan seperti pasar dunia untuk beberapa komoditi ekspor Indonesia direbut atau semakin dikuasai oleh negara-negara pesaing lainnya serta akibat diberlakukannya tarif baru angkutan peti kemas dan kebijakan antiterorisme serta merebaknya virus SARS di Cina, Hongkong, Taiwan dan Singapura.

## 2. Faktor-Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang sangat berpengaruh terhadap prospek perekonomian Indonesia adalah prospek perekonomian dan perdagangan dunia 2003. IMF dalam laporannya bulan September 2002 memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan volume perdagangan dunia 2003 akan masing-masing sekitar 3,7% dan 6,1%. Prospek perekonomian dan perdagangan dunia sangat dipengaruhi oleh prospek perekonomian di AS, Jepang, dan masyarakat Eropa (EU). Menurut prediksi IMF (WEO), sebelum intervensi AS ke Irak, PDB riil AS 2003 akan tumbuh 2,6%, sedikit di atas perkiraan 2002, yakni 2,2% (ini jauh lebih baik dibandingkan realisasi pertumbuhan 2001 yang hanya 0,3% akibat tragedi WTC). Sedangkan ekonomi Jepang dan ME akan tumbuh masing-masing hanya 1,1% (angka ini jauh lebih baik daripada perkiraan pertumbuhan ekonomi Jepang 2002 - 0,5% dan realisasi 2001 -

0,3%) dan 2,3% tahun 2003 (sedikit meningkat dibandingkan perkiraan 2002 1,1%). Sementara, BPS memprediksi perekonomian AS dan Jepang 2003 bisa tumbuh antara 1% hingga 3%.

Faktor eksternal lainnya yang juga harus diperhitungkan dalam memprediksi prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia 2003 adalah kondisi politik global, terutam efek- efek dari perang AS – Irak dan krisis senjata nuklir Korea Utara.

### **Kurva Lorenz**

Kurva Lorenz menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional dikalangan lapisan – lapisan penduduk, secara kumulatif pula. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal (semakin lurus) menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal ( semakin lengkung), maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk, distribusi pendapatan nasional semakin timpang atau tidak merata.

### **I. Perubahan Struktur Ekonomi**

Perubahan struktur ekonomi, umum disebut transformasi struktural, dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi AD, perdagangan luar negeri (ekspor dan inpor), AS ( produksi dan menggunakan faktor-faktor produksi yang diperlukan mendukung proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan) ( **chenery, 1979**).

#### **1. Teori dan Bukti Empiris**

Teori perubahan struktural menitik beratkan pembahasan pada mekanisme transformasi ekonomi yang dialami oleh NSB, yang semula lebih bersifat subsistens yang lebih modern, yang didominasi oleh sektor-sektor nonprime. **Teori Arthus Lewis** pada dasarnya membahas proses pembangunan ekonomi yang terjadi di pedesaan dan perkotaan.

Perekonomian Negara terbagi menjadi dua, yaitu perekonomian tradisional dipedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian dan perekonomian modern diperkotaan dengan industry sebagai sektor utama. Dipedesaan, karena pertumbuhan

penduduknya tinggi maka terjadi kelebihan suplai tenaga kerja, dan tingkat hidup masyarakatnya berbeda pada kondisi subsistens akibat perekonomian yang sifatnya juga subsistens.

Berdasarkan model ini, kenaikan produksi sektor industri manufaktur dinyatakan sama besarnya dengan jumlah dari empat faktor berikut.

- a. Kenaikan permintaan domestic, yang memuat permintaan langsung untuk produk industri manufaktur plus efek tidak langsung dari kenaikan permintaan domestic untuk produk sektor-sektor lainnya terhadap sector industri manufaktur.
- b. Perluasan ekspor (pertumbuhan dan diversifikasi) atau efek total dari kenaikan jumlah ekspor terhadap produk industri manufaktur.
- c. Substitusi impor atau efek total dari kenaikan proporsi permintaan di tiap sector yang dipenuhi lewat produksi domestic terhadap output industri manufaktur.
- d. Perubahan teknologi atau efek total dari perubahan koefisien input-output (aij) didalam perekonomian akibat kenaikan upah dan tingkat pendapatan terhadap sektor industri manufaktur.

Di dalam kelompok negara-negara sedang berkembang (NSB), banyak negara yang juga terjadi transisi ekonomi yang pesat dalam tiga dekade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda antara Negara. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan antara Negara dalam sejumlah faktor internal seperti berikut:

**a. Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri (basis ekonomi)**

Suatu Negara yang pada awal pembangunan ekonomi/Industrialisasinya sudah memiliki industri-industri dasar.

**b. Besarnya Pasar dalam Negeri**

Besarnya pasar domestik ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan rill perkapita.

**c. Pola Distribusi Pendapatan**

Faktor ini sangat mendukung faktor pasar dan tingkat pendapatan rata-rata perkapita naik pesat.

**d. Karakteristik dari Industrialisasi**

Pelaksanaan atau strategi pengembangan industry yang ditetapkan, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan industri dan insentif yang diberikan.

**e. Keberadaan SDA**

Negara yang kaya SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi.

**f. Kebijakan Perdagangan Luar Negeri**

Negara yang menerapkan kebijakan ekonomi tertutup (inward looking), pola dan hasil industrialisasi berbeda dibandingkan di negara-negara yang menerapkan kebijakan ekonomi terbuka (outward looking).

# PENDUDUK 3

Salah satu perintang pembangunan ekonomi dinegara berkembang adalah adanya ledakan penduduk (population explotion atau population pressure). Sehingga dengan adanya perintang pembangun ekonomi maka munculah teori penduduk optimum ( optimum population theory ).

Penduduk optimum adalah jumlah penduduk yang yang dapat menghasilkan upah riil atau pendapatan riil perkapita yang maksimum.

Apabila jumlah penduduk bertambah dan menjadi lebih besar dari pada jumlah penduduk yang optimum ,maka akan berlaku law of diminishing return.dan apabila jumlah penduduk bertambah tetapi belum mencapai jumlah optimumnya maka akan berlaku increasing return.

Kelemahan dari konsep penduduk optimum adalah tidak dapat menentukan besarnya jumlah penduduk yang optimum dan banyak perubahan-perubahan seperti selera,sumber alam dan teknologi sehingga jumlah penduduk optimum dapat berubah-ubah.

## **A. Peranan Penduduk Dalam Pembangunan Ekonomi**

Untuk meningkatkan output totalnya di negara berkembanganag maka harus diimbangi dengan penurunan perkembangan penduduk, sehingga penghasilan riil perkapita akan meningkat.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dinegara berkembang antara lain:

- Tingkat perkembangan penduduk yang tinggi
- Struktur umur yang tidak favorable
- Distribusi penduduk tidak seimbang atau tidak merata
- Tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih.

### 1. Tingkat perkembangan penduduk yang tinggi

Peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi yaitu:

Advertisement

- a. Dari segi permintaan :penduduk bertindak sebagai konsumen
- b. Dari segi penawaran :penduduk bertindak sebagai produsen

Sehingga perkembangan penduduk yang cepat tidaklah selalu merupakan penghambat sebagai jalanya pembangunan ekonomi jika penduduk memiliki kapasitas yang tinggi untuk menyerap dan menghasilkan hasil produksi.

Di negara maju ,pertambahan penduduk yang pesat justru akan menaikkan penghasilan ril perkapita, karena negara ini telah siap dengan tabungan yang akan melayani kebutuhan investasi.Selain itu pertumbuhan penduduk yang pesat di negara maju ini akan menambah potensi masyarakat untuk menghasilkan dan sebagai sumber permintaan baru.

Berdasarkan teori Profesor A. Hansen mengenai stagnasi secular bertambahnya penduduk memperbesar permintaan agregatif terutama investasi.Menurut pengikut Keynes melihat tambahan penduduk tidak sekedar sebagai tambahan penduduk tetapi juga melihat adanya kenaikan dalam daya beli (purchasing power). Sedangkan menurut pengikut Keynes kenaikan jumlah tenaga kerja disebabkan karena meningkatnya produktivitas dan meningkatnya permintaan tenaga kerja.

Sebaliknya dinegara berkembang perkembangan penduduk malah menghambat perkembangan ekonomi .Menurut kaum klasik maka akan selalu ada perlombaan antara tingkat perkembangan out put dengan tingkat perkembangan penduduk.,yang akhirnya dimenangkan oleh perkembangan penduduk. Jadi bagi Negara yang sedang berkembang perkembangan penduduk merupakan perintang perkembangan ekonomi karena Negara tersebut sedikit sekali memiliki capital.

Jadi di negara berkembang terdapat perbandingan yang tinggi antara jumlah manusia dengan jumlah faktor produksi yang lain, perkembangan penduduk yang cepat akan menimbulkan “diseconomies of scale”

Keadaan penduduk sekarang ini di dunia ketiga:

a. *Isu kependudukan*

- 1) Dunia ketiga mampu memperbaiki standar hidup penduduknya dengan laju pertumbuhan penduduk seperti sekarang ini;
- 2) Bagaimana Negara dunia ketiga dapat mengimbangi kenaikan yang cepat dalam perkembangan angkatan kerja;
- 3) Apakah akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi bagi Negara miskin dalam menghindari kemiskinan absolute;
- 4) Apakah Negara dunia ketiga akan dapat memperluas ruang lingkup dan memperbaiki kualitas kesehatan dan sistem pendidikan;
- 5) Seberapa jauh tingka hidup yang rendah merupakan faktor yang penting dalam membatasi kebebasan orang tua untuk menentukan besarnya keluarga;
- 6) Seberapa jauh meningkatnya kesejahteraan dan keinginan untuk berkembang lebih jauh diantara Negara yang telah maju perekonomiannya.

Penduduk dunia tidak seimbang distribusinya berdasarkan atas tingkat kelahiran. Tingkat kematian dan atas dasar struktur umur.

b. *Trend fertilitas dan mortalitas*

Laju pertumbuhan penduduk secara kuantitatif diukur sebagai presentasi pertumbuhan bersih terhadap jumlah penduduk karena pertumbuhan alami natural dan migrasi internasional bersih. Pertumbuhan ( natural ) adalah perbedaan antara kelahiran dan kematian.

Perbedaan laju pertumbuhan penduduk di Negara berkembang dan Negara maju disebabkan oleh tingkat kelahiran di Negara berkembang lebih tinggi daripada Negara maju. Sedangkan angka kematian di Negara berkembang lebih tinggi daripada Negara

maju. Hal ini disebabkan karena umumnya penduduk di Negara berkembang menikah pada usia muda. Perbedaan angka kematian di Negara maju dan berkembang sudah sangat sempit disebabkan adanya tingkat perbaikan tingkat kesehatan, perekonomian, pendidikan. Tingkat kelahiran rendah terdapat di Negara yang distribusi pendapatannya lebih merata dan sebaliknya. Sehingga Negara ini akan mengurangi tidak meratanya penghasilan dengan cara menurunkan tingkat kelahiran daripada Negara yang kurang memperhatikan pemerataan hasil pembangunan ekonomi.

### *c. Pertumbuhan Penduduk dan Kebutuhan Investasi*

Untuk meningkatkan output tambahan investasi harus cukup besar sehingga dapat meningkatkan penghasilan riil perkapita. Menurut Malthus Negara berkembang ditandai dengan oleh adanya perangkap pada keseimbangan pendapatan yang rendah ( low level equilibrium trap ).

Artinya tingkat penghasilan yang subsistence apabila penghasilan naik sedikit saja akan mengakibatkan penduduk berkembang lebih pesat dan lebih tinggi daripada tingkat perkembangan penghasilan itu sendiri. Akibatnya tingkat penghasilan perkapita turun sebaliknya penghasilan turun lagi dibawah tingkat subsistence, penduduk turun jumlahnya dengan tingkat yang lebih cepat daripada tingkat penurunan jumlah penghasilan. Pada tingkat penghasilan subsistence ini merupakan keadaan yang stabil ( stable equilibrium ).

## **2. Struktur umur yang tidak favorable**

Dinegara yang sedang berkembang sebagian besar penduduknya berusia muda. Keadaan penduduk yang seperti ini disebut penduduk berciri ekspansif. Sehubungan dengan struktur umur penduduk kita kita kenal dengan” angka beban tanggungan“(dependency ratio).

Angka beban tanggungan“(dependency ratio) adalah perbandingan antara banyaknya orang yang produktif dengan orang yang tidak produktif. Negara yang berkembang memiliki angka beban tanggungan yang tinggi karena besarnya jumlah penduduk usia

muda. Proporsi besar penduduk usia muda tidak menguntungkan dalam pembangunan ekonomi karena :

- a. Golongan usia muda, cenderung untuk memperkecil angka penghasilan perkapita
- b. Banyaknya alokasi faktor-faktor produksi kearah “investasi-investasi sosial bukan kapital”

### **3. Distribusi penduduk yang tidak seimbang**

Urbanisasi biasanya terjadi karena tingkat upah lebih menarik dikota ( sektor industri ) dari pada tingkat upah didesa ( pertanian ). Dinegara berkembang mengakibatkan adanya ketidak seimbangan perkembangan ekonomi antara sector industry dengan disektor pertanian.

Keinginan untuk mencapai perkembangan yang seimbang antara kedua sector merupakan masalah yang tidak mudah diatasi, karena adanya keharusan dalam membagi jumlah tabungan yang terbatas.,diantara investasi social dan investasi capital yang produktif.

### **4. Kualiatas tenaga kerja yang rendah**

Rendahnya kualitas penduduk merupakan penghalang pembangunan ekonomi suatu Negara. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja.

Pendidikan merupakan faktor penting bagi berhasilnya pembangunan ekonomi. Menurut Schumaker pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibanding faktor-faktor produksi lain.

### **B. Ledakan Penduduk**

Faktor utama yang menentukan perkembangan penduduk adalah tingkat kematian, tingkat kelahiran, dan tingkat perpindahan penduduk ( migrasi ). Di samping itu jumlah penduduk yang besar secara absolute akan bertambah lebih cepat daripada jumlah penduduk yang kecil, walaupun laju pertumbuhannya sama. Dari pengalaman yang ada, laju pertumbuhan penduduk selalu meningkat bagi dunia secara keseluruhan.

## 1. Tingkat kematian (*death rate*)

Ada empat faktor yang menyumbang terhadap penurunan tingkat kematian pada umumnya:

- a. Adanya kenaikan standar hidup sebagai akibat kemajuan teknologi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja sertatercapainya perdamaian dunia yang cukup lama.
- b. Adanya perbaikan pemeliharaan kesehatan umum maupun kesehatan individu.
- c. Adanya kemajuan dalam ilmu kedokteran serta diperkenalkannya lembaga-lembaga kesehatan umum yang modern.
- d. Meningkatnya penghasilan riil perkapita sehingga orang mampu membiayai hidupnya.

## 2. Tingkat kelahiran (*birth rate*)

Di Negara industri pertumbuhan penduduk berlangsung terus disamping adanya penurunan tingkat kelahian, misalnya di Perancis, Amerika dan Inggris, tingkat kelahirannya menurun sejak abad ke sembilanbelas. Hanya setelah perang dunia ke-II tingkat kelahiran meningkat dan mempercepat tingkat pertambahan penduduk. Tingkat kelahiran lebih dihubungkan dengan perkembangan ekonomi melalui pola-pola kebudayaan seperti: umur perkawinan, status wanitanya, kedudukannya antara ural dan urban serta sifat-sifat dari sistem famili yang ada.

Professor E.E Hagen, menganggap bahwa tingkat kelahiran itu ditentukan oleh tingginya tingkat kematian. Tingkat kelahiran disesuaikan dengan tingginya tingkat kematian dengan maksud agar suatu keluarga memiliki jumlah anak yang sedikit dan dapat hidup sampai hari tua, sehingga keturunannya erus dapat berlangsung.

Disebagai besar Negara di Eropa, telah terjadi penurunan kematian yang lambat, kemudian tingkat kelahiran mulai mengikutinya dalam seperempat abad terakhir dari abad 19.

Jadi, pada mulanya tingkat kematian menurun, sedangkan tingkat kelahiran tetap, yang ini menghasilkan pembangunan ekonomi. Setelah itu, tingkat kelahiran menurun dengan cepat dan mengejar cepatnya penurunan tingkat kematian.

Guna memperjelas perbedaan pola perkembangan penduduk di Negara maju dan Negara berkembang dapat dilihat dengan pola transisi demografi di dua kelompok tersebut. Ada tiga tahapan: Tahap I Menggambarkan keadaan dimana laju pertumbuhan penduduk pada tingkat yang rendah, tetapi baik tingkat kematian dan tingkat kelahiran tinggi. Tahap II Ditandai dengan menurunnya tingkat kematian, tetapi tingkat kelahiran tetap tinggi. Tingkat kematian turun karena adanya perbaikan taraf hidup dan perbaikan kesehatan dengan berkembangnya ilmu kedokteran. Tahap III Menunjukkan keadaan dimana tingkat kematian masih terus turun dan diiringi pula oleh turunnya tingkat kelahiran, sehingga laju pertumbuhannya rendah.

Perkembangan penduduk di negara maju mengikuti pola yang diuraikan gambar di atas namun bagi negara berkembang ada negara yang sudah sampai tahap III, tetapi masih ada juga yang baru sampai pada tahap II pada tahun 1970-an.

### **3. Migrasi**

Migrasi mempunyai peranan juga dalam menentukan tingkat pertumbuhan penduduk. Oleh karena itu tingkat pertumbuhan penduduk tidak dapat diperhitungkan hanya dari tingkat kematian saja.

Bagi negara berkembang migrasi bukan berarti peningkatan atau pengurangan jumlah penduduk. Perpindahan penduduk keluar negeri dari negara yang sedang berkembang tidaklah mungkin dapat terlaksana lagi guna mengurangi kepadatan penduduknya, dengan alasan kesulitan-kesulitan integrasi sosial dan rendahnya skill di negara yang mengalami tekanan penduduk tersebut.

Dengan adanya tingkat penurunan yang cepat dan tetap tingginya kelahiran serta kurang efektifnya migrasi, maka pertumbuhan penduduk akan cepat dan mengakibatkan terjadinya ledakan penduduk di negara berkembang.

### **C. Pemecahan Masalah Kependudukan**

Ledakan penduduk yang terjadi di negara -negara sedang berkembang dapat disimpulkan bahwa masalah -masalah merupakan masalah yang sukar diatasi. Sebenarnya kita dapat menerapkan suatu kebijakan dari sudut tingkat kematian untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk dan juga program keluarga berencana sudah banyak dilaksanakan oleh sebagian besar negara - negara sedang berkembang.

Walupun program keluarga berencana telah diterima hampir semua negara belum semua penduduk yang tinggal di negara - negara itu melaksanakan program tersebut yang disebabkan:

1. Adanya kemelaratan dan buta huruf di negara - negara sedang berkembang bersama organisasi sosial yang masih bersifat tradisional.
2. Perkembangan ilmu obat - obatan dan ilmu kesehatan masih merupakan faktor - faktor psikologi dari orang - orang yang akan menjadi akseptor.

Kemajuan ilmu pengetahuan telah dapat menyediakan metode kontrasepsi yang baru dan bagaimana pemerintah nasional mendorong penduduk untuk memakainya bukan merupakan masalah yang sulit. Yang sulit ialah agar pengendalian kelahiran atau kehamilan dapat diterima oleh semua golongan dengan demikian jalan yang patut ditempuh oleh negara yang sedang berkembang ialah mendidik orang - orangnya secara lebih baik dan bukan dianjurkan untuk mengurangi kelahiran saja.

### **D. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia**

#### **1. Pemanfaatan Konsep Ketenagakerjaan**

Tidak semua penduduk dapat bertindak sebagai faktor produksi. Hanya penduduk yang berupa tenaga kerja (human power) yang dapat dianggap sebagai faktor produksi. Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja yaitu antara 15 sampai 64 tahun, dan dapat digolongkan menjadi dua yaitu angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja.

Yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap bekerja atau

sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kuantitas dan kualitas angkatan kerja lebih rendah di negara-negara sedang berkembang dari pada di negara-negara maju karena sebagian besar penduduk di negara berkembang berusia muda.

Apabila dilihat dari sudut tenaga kerjanya, maka akan ada pergeseran tenaga kerja yang membarengi pembangunan itu dari sektor pertanian ke sektor-sektor industri dan perdagangan atau jasa.

## 2. Macam-macam pengangguran

Dalam pembangunan ekonomi ada tenaga-tenaga manusia yang disebut menganggur dan setengah menganggur. Jumlah tenaga kerja yang menganggur, cukup banyak di negara-negara yang padat penduduknya. Di negara-negara sedang berkembang pengangguran dapat digolongkan ke dalam 3 jenis, yaitu:

### a. Pengangguran yang kelihatan (*Visible Underemployment*)

Akan timbul apabila jumlah waktu kerja yang sungguh-sungguh digunakan lebih sedikit daripada waktu kerja yang disediakan untuk bekerja. *Visible Underemployment* dibagi dua yaitu pengangguran kronis (*chronic underemployment*) dan pengangguran musiman (*seasonal underemployment*). Jelasnya, pengangguran yang ketara (*visible underemployment*) timbul karena kurangnya kesempatan kerja.

### b. Pengangguran Tak-Ketara (*Invisible Underemployment* atau *Disguised Underemployment*)

Pengangguran tak-ketara terjadi apabila para pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh dalam suatu pekerjaan dapat ditarik ke sektor-sektor atau pekerjaan lain tanpa mengurangi output disektor yang ditinggalkan.

### c. Pengangguran Potensial (*Potential Underemployment*)

Pengangguran potensial dapat diartikan bahwa para pekerja dalam suatu sektor dapat ditarik dari sektor tersebut tanpa mengurangi output, tetapi harus dibarengi dengan perubahan-perubahan fundamental dalam metode produksi yang memerlukan pembentukan kapital yang berarti. Kemungkinan penarikan tenaga kerja yang secara potensial menganggur

untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, terdapat baik di sektor pertanian maupun sektor industri.

d. **Memfaatkan Tenaga-tenaga yang Menganggur**

Persediaan tenaga kerja ini jelas lebih banyak terdapat di daerah-daerah yang padat penduduknya. Masalah pemanfaatan tenaga kerja yang menganggur ini menyangkut baik segi penawaran maupun segi permintaan. Suatu keuntungan penggunaan tenaga-tenaga yang menganggur secara musiman disektor pertanian yakni tidak mengurangi tenaga-tenaga kerja yang diperlukan untuk mengadakan panen maupun penanaman. Industri-industri kecil juga mungkin sekali akan menyerap tenaga-tenaga yang menganggur karena musim atau memang secara kronis. Ketidaksempurnaan pasar dapat menghambat alokasi sumber-sumber atau faktor-faktor produksi secara lebih efisien. Masalah-masalah ini dapat diatasi dengan suatu perancangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, serta diadakan survei yang mendalam mengenai kemungkinan-kemungkinan investasi baru yang nantinya akan dapat mengubah sifat-sifat sosial dan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan.

**E. Kualitas Tenaga Kerja**

Tenaga kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi Pendapatan Nasional. Dan selama ini kita hanya memperhatikan segi kuantitasnya saja, kita beranggapan bahwa kalau jumlah tenaga kerja meningkat, maka jumlah produktifitas juga meningkat. Pernyataan tersebut tidak seluruhnya benar, karena walaupun jumlah tenaga kerja itu tidak berubah, tetapi bila kualitas dari tenaga kerja tersebut lebih baik atau meningkat, maka tingkat produksi juga akan mengalami peningkatan.

Selama ini kita beranggapan bahwa, tingkat produksi hanya tergantung pada jumlah tenaga kerja, maka kita menganggap tenaga kerja itu bersifat homogen. Padahal dalam kenyataannya, tenaga kerja itu bersifat heterogen baik dilihat dari jenis kelamin, usia, kemampuan kerja, dan sebagainya. Oleh karena itu dalam merencanakan pertumbuhan ekonomi, perlu adanya perencanaan

tenaga kerja (*manpower planning*) secara tepat. Sehingga suatu negara harus mampu memperkirakan, misalnya jumlah tenaga dokter, tenaga guru, tenaga tukang, akuntan, sekretaris, ahli teknik untuk lima sampai sepuluh tahun yang akan datang.

Seperti yang kita ketahui, jika berbicara tentang kualitas tenaga kerja, kita berhubungan dengan apa yang disebut “*human capital*”. Ciri khusus yang dimiliki faktor produksi ini adalah tidak dapat hilang apabila dipakai, dimanfaatkan maupun dijual. Bahkan semakin sering faktor produksi ini dipakai nilainya malah semakin tinggi. Sebelum kita melihat bagaimana meningkatkan kualitas, kita perlu mengetahui tujuan dari faktor produksi tersebut. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tujuan faktor produksi ini mau dipekerjakan adalah guna mendapatkan upah. Dengan kata lain penawaran tenaga kerja akan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat upah. Maka, semakin tinggi tingkat upah di pasar tenaga kerja, semakin tinggi pula jumlah penawaran tenaga kerja.

Dalam hubungan ini perlu dijelaskan bahwa hubungan tingkat upah dengan penawaran tenaga kerja perseorangan berbeda dengan hubungan antara tingkat upah dengan penawaran tenaga kerja secara keseluruhan. Hubungan antara tingkat upah dan penawaran tenaga kerja perseorangan sering ditunjukkan oleh kurva penawaran tenaga kerja yang berbelok ke belakang (*backward bending supply curve*). Ini berarti bahwa setelah tingkat upah tertentu, naiknya tingkat upah tidak akan mendorong seseorang untuk bekerja lebih lama atau lebih giat, karena pada tingkat pendapatan yang relatif tinggi orang ingin hidup lebih santai.

Tetapi hubungan antara tingkat upah dengan penawaran tenaga kerja secara keseluruhan adalah semakin tinggi tingkat upah maka masih akan mendorong semakin banyak orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Orang-orang yang tadinya tidak mau bekerja pada tingkat upah rendah akan bersedia bekerja pada tingkat upah yang lebih tinggi. Dengan adanya perkembangan peradaban nasional, peranan tingkat upah dalam mempengaruhi kemauan orang untuk bekerja masih cukup besar, terutama dengan adanya “*efek pamer*” maka orang akan tidak merasa bahwa kebutuhannya telah terpuaskan seluruhnya.

Dari uraian diatas diperoleh bahwa usaha kita untuk meningkatkan pendapatan nasional adalah lewat peningkatan jumlah tenaga kerja untuk diikutkan dalam kegiatan produksi. Peningkatan tersedianya jumlah tenaga kerja untuk proses produksi itu dapat terlihat dari orang ataupun jumlah hari kerja orang maupun jam kerja orang, karena dapat saja jumlah orang tetap tetapi jumlah hari kerja orang atau jumlah jam kerja orang bertambah.

Sekarang bagaimana supaya jumlah jam kerja yang disediakan untuk bekerja itu meningkat. Untuk itu perlu diketahui bahwa tersedianya jam kerja untuk proses produksi itu dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Artinya jika orang mau bekerja tetapi tidak mampu bekerja sama dengan orang yang mampu bekerja tetapi tidak mau bekerja. Oleh karena itu, kita harus sanggup mencari faktor-faktor apa yang dapat meningkatkan kemampuan dan kemauan seseorang untuk bekerja. Berdasar teori ekonomi, bahwa kemauan seseorang untuk bekerja itu dipengaruhi oleh tingkat upah yang ada.

Semakin tinggi tingkat upah, semakin tinggi pula kemauan seseorang untuk bekerja. Sedangkan kemampuan untuk bekerja seseorang dipengaruhi oleh keadaan kesehatan dan kecakapannya, keterampilan dan keahliannya. Selanjutnya tingkat kesehatan dipengaruhi oleh keadaan gizi dan lingkungannya; sedangkan kecakapan, keterampilan, dan keahlian dipengaruhi oleh tingkat pendidikan baik formal maupun nonformal.

# TENAGA KERJA 4

## A. Pengertian

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 tahun 2003 Bab I pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk tergolong tenaga kerja jika penduduk tersebut telah memasuki usia kerja. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Ada banyak pendapat mengenai usia dari para tenaga kerja ini, ada yang menyebutkan di atas 17 tahun ada pula yang menyebutkan di atas 20 tahun, bahkan ada yang menyebutkan di atas 7 tahun karena anak-anak jalanan sudah termasuk tenaga kerja.

## B. Klasifikasi Tenaga Kerja

### 1. Berdasarkan penduduknya

#### a. Tenaga kerja

Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja, mereka yang

dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun.

b. Bukan tenaga kerja

Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

## 2. Berdasarkan batas kerja

a. Angkatan kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.

b. Bukan angkatan kerja

Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah:

- anak sekolah dan mahasiswa
- para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan
- para pengangguran sukarela

## 3. Berdasarkan kualitasnya

a. Tenaga kerja terdidik

Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain.

b. Tenaga kerja terlatih

Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerjayang memiliki keahlian dalam bidang tertentudengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan

tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain.

c. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih

Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya

### C. Kesempatan Kerja

Secara umum, kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang mencerminkan seberapa jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Selain itu kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesempatan kerja.

Kesempatan kerja dimaknai sebagai lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi atau produksi. Dengan demikian pengertian kesempatan kerja nyata mencakup lapangan pekerjaan yang masih lowong. Kesempatan kerja nyata bisa juga dilihat dari jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, yang tercermin dari jumlah penduduk usia kerja (15 tahun) ke atas yang bekerja (Sapsuha, 2009).

Kesempatan kerja merupakan partisipasi seseorang dalam pembangunan baik dalam arti memikul beban pembangunan maupun dalam menerima kembali hasil pembangunan. Dari definisi tersebut, maka kesempatan kerja dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Kesempatan kerja permanen, yaitu kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja secara terus menerus sampai mereka pensiun atau tidak mampu lagi untuk bekerja. Dimisalkan orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau swasta yang mempunyai jaminan sosial hingga tua dan tidak bekerja di tempat lain.
2. Kesempatan kerja temporer, adalah kesempatan kerja yang memungkinkan orang bekerja dalam waktu yang relatif singkat, kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja yang

baru. Dalam hal ini dimisalkan pegawai lepas pada perusahaan swasta di mana pekerjaan mereka tergantung pesanan.

### **Pendidikan dan Latihan**

Pendidikan dan latihan dipandang sebagai suatu investasi di bidang sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja. Oleh karena itu pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam organisasi perusahaan. Pentingnya pendidikan dan latihan disamping berkaitan dengan berbagai dinamika (perubahan) yang terjadi dalam lingkungan perusahaan, seperti perubahan produksi, teknologi, dan tenaga kerja, juga berkaitan dengan manfaat yang dapat dirasakannya.

Manfaat tersebut antara lain: meningkatnya produktivitas perusahaan, moral dan disiplin kerja, memudahkan pengawasan, dan menstabilkan tenaga kerja. Agar penyelenggaraan pendidikan dan latihan berhasil secara efektif dan efisien, maka ada 5 (lima) hal yang harus di pahami, yaitu

1. adanya perbedaan individual,
2. berhubungan dengan analisa pekerjaan,
3. motivasi,
4. pemilihan peserta didik, dan
5. pemilihan metode yang tepat.

Pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja dapat diklasifikasikan kepada dua kelompok, pertama, yakni pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja yang termasuk kepada kelompok tenaga kerja operasional, kedua, pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja yang termasuk kepada kelompok tenaga kerja yang menduduki jabatan manajerial. Untuk masing-masing kelompok tenaga kerja tersebut diperlukan metode pendidikan yang berbeda satu sama lain.

### **D. Sistem Upah**

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

a. Teori upah tenaga kerja

1. Teori upah wajar (alami) dari pendapat David Ricardo, menerangkan:
  - Upah menurut kodrat adalah upah yang cukup untuk pemeliharaan hidup pekerja dengan keluarganya.
  - Di pasar akan terdapat upah menurut harga pasar adalah upah yang terjadi di pasar dan ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Upah harga pasar akan berubah di sekitar upah menurut kodrat. Oleh ahli ekonomi modern, upah kodrat dijadikan batas minimum dari upah pekerja.
2. Teori Upah Besi dari Ferdinand Lassalle, penerapan sistem upah kodrat menimbulkan tekanan terhadap kaum buruh, karena posisi buruh dalam posisi yang sulit untuk menembus kebijakan upah yang telah ditetapkan oleh produsen. Berhubungan dengan kondisi tersebut maka teori ini dikenal “Teori Upah Besi”. Lassalle menganjurkan untuk menghadapi kebijakan produsen terhadap upah agar dibentuk serikat pekerja.
3. Teori dana upah dari John Stuart Mill, tinggi upah bergantung kepada permintaan dan penawaran tenaga kerja sedangkan penawaran tenaga kerja tergantung pada jumlah dana upah, yaitu jumlah modal yang disediakan perusahaan untuk pembayaran upah. Peningkatan jumlah penduduk akan mendorong tingkat upah yang cenderung turun, karena tidak sebanding antara jumlah tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja.
4. Teori upah etika, menurut kaum utopis (kaum yang memiliki idealis masyarakat yang ideal) tindakan para pengusaha yang memberikan upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum, merupakan suatu tindakan yang tidak etis. Oleh karena itu, sebaiknya para pengusaha selain dapat memberikan upah yang layak kepada pekerja dan keluarganya, juga harus memberikan tunjangan keluarga.

b. Faktor yang mempengaruhi Upah

1. Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya
2. Peraturan undang-undang yang mengikat tentang upah minimum pekerja (umr)
3. Produktivitas marginal tenaga kerja
4. Tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh dan serikat pengusaha
5. Perbedaan jenis pekerjaan
6. Tingkat persaingan

**Syarat dan tujuan Pemberian Upah**

Syarat dan tujuan Pemberian Upah adalah mampu memuaskan kebutuhan dasar pekerja, menyediakan sistem pemberian upah yang sebanding dengan perusahaan lain di bidang yang sama, memiliki sifat adil, dan menyadari fakta bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Tujuan pemberian upah kepada tenaga kerja adalah memberikan rasa ketertarikan para tenaga kerja berbakat untuk masuk ke perusahaan, membangun loyalitas dan mempertahankan karyawan terbaik agar tidak berpindah ke perusahaan lain, dan memberikan motivasi kepada karyawan agar bekerja lebih aktif.

**Sistem Upah di Indonesia**

**1. Sistem upah didasarkan pada fungsi, yakni:**

- a. Menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga
- b. Mencerminkan imbalan atas hasil kerja seseorang
- c. Menyediakan insentif untuk mendorong meningkatkan produktivitas kerja.

**2. Sistem pemberian upah di Indonesia digolongkan sebagai berikut:**

**a. Sistem Upah Menurut Waktu**

Mendasarkan pembayaran upahnya menurut waktu kerja seorang pekerja. Satuan waktunya dapat ditentukan per jam, per hari, per minggu atau per bulan. Contohnya perusahaan Viave menetapkan pembayaran upahnya per hari

sebesar Rp 50,000.00, maka jika seorang pekerja bekerja selama 10 hari, upah yang akan dia terima sebesar 10 hari X Rp 50,000.00 adalah Rp 500,000.00. Kebaikan sistem upah menurut waktu adalah pekerja tidak perlu bekerja terburu-buru dan pekerja tahu dengan pasti jumlah upah yang akan diterima. Keburukan sistem upah menurut waktu adalah pekerja biasanya kurang giat dan kurang teliti, karena besarnya upah tidak didasarkan atas prestasi kerja.

**b. Sistem Upah Borongan**

Mendasarkan pemberian upah berdasarkan balas jasa atau suatu pekerja yang dipaketkan atau diborongkan. Contohnya, upah untuk membangun tower sebuah operator TV, pembuatannya diborongkan kepada perusahaan yang bergerak di bidangnya. Kebaikan sistem upah borongan sebagai berikut: pertama, pekerja mengetahui dengan pasti jumlah yang akan diterima; kedua, bagi majikan, tidak perlu berhubungan langsung dengan pekerja dan mengetahui dengan pasti berapa jumlah upah yang harus diberikan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Keburukannya yakni salah perhitungan, pekerja tidak dapat diselesaikan dan terhenti di tengah jalan (tunda atau batal).

**c. Sistem Co-Partnership**

Memberikan upah kepada pekerjanya berupa saham atau obligasi perusahaan. Dengan obligasi atau saham tersebut, para pekerja merasa memiliki sendiri perusahaan tersebut. Dalam sistem ini, pengusaha dan pekerja merupakan partner atau mitra usaha. Kebaikan sistem co-partnership adalah apabila mendapatkan keuntungan besar, maka pekerja menerima upah yang besar pula sedangkan keburukan sistem co-partnership adalah pada saat perusahaan mendapatkan kerugian, maka masing-masing uang yang ditanamkan dalam saham tidak memberikan keuntungan.

**d. Sistem upah bagi hasil**

Memberikan upah kepada pekerjanya dengan sistem bagi hasil, digunakan dalam penggarapan lahan pertanian di

mana pemilik lahan dan penggarap lahan membagi hasil pertaniannya dengan presentase tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama.

**e. Sistem Upah Menurut Prestasi**

Berdasarkan prestasi kerja yang diperoleh para pekerja, besarnya upah yang diperoleh seseorang oleh seorang pekerja bergantung banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu oleh para pekerja tersebut.

**f. Sistem Upah Skala**

Berdasarkan tingkat kemajuan dan kemunduran hasil penjualan. Jika hasil penjualan meningkat, maka upah bertambah, dan sebaliknya. Kebaikan sistem ini adalah pekerja giat bekerja dan produktivitasnya tinggi sedangkan keburukan sistem ini adalah kualitas kerja kadang kurang diperhatikan sebagai akibat pekerja bekerja terlampau keras dan jumlah upah tidak tetap.

**g. Sistem Upah Premi**

Kombinasi sistem upah prestasi yang ditambah dengan sejumlah premi tertentu . contohnya, jika Elya sebagai pekerja menyelesaikan 200 potong pakaian dalam 1 jam, maka dibayar Rp 5,000.00 dan jika terdapat kelebihan dari 200 potong, maka diberikan premi misalnya prestasi kerjanya 210 potong per jam, maka Elya akan mendapatkan Rp 5,000.00 ditambah  $(10/200 \times \text{Rp } 5,000.00) = \text{Rp } 5,250.00$ .

**h. Sistem Bonus**

Memberikan upah kepada pekerja dari sebagian keuntungan pada akhir tahun buku. Jadi selain upah tetap bulanan, pekerja mendapatkan upah tambahan sebagai bonus atas partisipasinya dalam membangun perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan. Kebaikan sistem ini adalah pekerja ikut bertanggung jawab bahkan berkepentingan atas kemajuan perusahaan. Sedangkan keburukan sistem ini adalah tidak semua pekerja mampu menunjukkan hasil yang dicapai atas kemajuan perusahaan.

### **i. Sistem Upah Indeks Biaya Hidup**

Mengaitkan pemberian upah dengan turun naiknya biaya hidup, jika biaya hidup meningkat, maka upah pekerja dinaikkan, dan sebaliknya. Upah dibayarkan dalam bentuk barang, seperti sembako.

## **E. Pengangguran**

Pengangguran adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baggi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali atau sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum pernah bekerja. Seseorang dikatakan sebagai pengangguran apabila memenuhi salah satu unsure, sebagai berikut: tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, tidak mempunyai pekerjaan, sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai tetapi belum mulai bekerja.

### **a. Penyebab Pengangguran**

1. Menurunnya permintaan tenaga kerja
2. Adanya kemajuan teknologi
3. Kelemahan dalam pasar tenaga kerja
4. Jumlah lapangan pekerjaan yang terbatas
5. Fenomena PHK
6. Kualitas tenaga kerja yang relative rendah
7. Kurang sesuai kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaan
8. Persebaran tenaga kerja tidak merata
9. Serangan tenaga kerja asing
10. Rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja

### **b. Jenis-jenis Pengangguran Menurut ciri-cirinya**

11. Pengangguran terbuka (Open Unemployment), adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan pekerjaan lebih rendah daripada pertambahan tenaga kerja. dikarenakan kegiatan ekonomi yang menurun, kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga manusia atau kemunduran perkembangan suatu industri.

12. Pengangguran tersembunyi (*Disguised Unemployment*), adalah pengangguran yang terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerjaan, padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Terjadi disektor pertanian atau jasa. Contohnya: anggota keluarga yang besar mengerjakan luas tanah yang sangat sempit.
13. Pengangguran musiman, adalah pengangguran yang terjadi pada waktu tertentu di dalam satu tahun, terjadi di sector pertanian dan perikanan. Pengangguran musiman berlaku pada waktu dimana kegiatan bercocok tanam sedang menurun kesibukannya, pada periode tersebut petani dan tenaga kerja di sector pertanian tidak melakukan pekerjaan. Jenis pengangguran ini hanya sementara. Cara mengatasi pengangguran musiman adalah: pemberian informasi yang cepat jika lowongan kerja di sector lain dan melakukan pelatihan di bidang keterampilan untuk memanfaatkan waktu ketiga menunggu musim tertentu.
14. Setengah menganggur (*Under Employment*), penambahan penduduknya yang cepat telah menimbulkan percepatan dalam proses urbanisasi. Banyak di antara mereka yang menganggur sepenuh waktu dan ada pula yang mereka tidak yang menganggur, tetapi pula bekerja tidak sepenuh waktu, dan jam kerja mereka lebih rendah dari jam kerja normal.

### **Menurut Faktor Penyebabnya**

1. Pengangguran Friksional (*Frictional Unemployment*), adalah pengangguran yang sifatnya sementara disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dan pembuka lamaran pekerjaan. Pengangguran tidak ada pekerjaan bukan karena tidak memperoleh pekerjaan, melainkan karena sedang mencari pekerjaan lain yang lebih tinggi. Dalam proses mencari pekerjaan baru ini sementara pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Cara mengatasi pengangguran Friksional adalah: perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industry baru yang bersifat padat karya; deregulasi

(penyederhanaan administrasi) dan debirokratisasi (penyederhanaan peraturan) di berbagai bidang industry; menggalakkan pengembangan sector informal; menggalakan program transmigrasi; pembukaan proyek umum oleh pemerintah.

2. Pengangguran Siklikal (*Cyclical Unemployment*), diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan pesat. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi dan hal ini mendorong pengusaha menaikkan produksi untuk itu lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lainnya permintaan agregat (menyeluruh) mengalami penurunan. Kemunduran ini menimbulkan efek pada perusahaan lain yang mempunyai hubungan juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya. Cara mengatasi pengangguran siklikal adalah mengarahkan permintaan terhadap barang dan jasa; meningkatkan daya beli masyarakat.
3. Pengangguran struktural (*Structural Unemployment*), adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi. Tidak semua industry dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju sebagian akan mengalami kemunduran. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industry tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran. Cara mengatasi pengangguran struktural adalah: peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja; segera memindahkan kelebihan tenaga kerjadari tempat dan sector yang kelebihan ke tempat dan sector ekonomi yang kekurangan; mengadakan pelatihan kerja untuk mengisi formasi kesempatan (lowongan) kerja yang kosong; segera mendirikan industry padat karya.

4. Pengangguran teknologi, adalah pengurangan yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya. Contohnya: racun rumput telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan. Cara mengatasi pengangguran teknologi adalah memberikan pelatihan kepada para pendidik agar dapat menguasai teknologi; mengenalkan teknologi kepada anak sejak usia dini; memasukkan materi kurikulum mengenai teknologi.
5. Pengangguran Konjungtural (sama dengan Siklikal), adalah pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan, biasanya terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa terutama pada saat resesi atau depresi. Cara mengatasi pengangguran dengan meningkatkan daya beli masyarakat.
6. Pengangguran Deflasiioner, adalah pengangguran yang disebabkan oleh lowongan pekerjaan tidak cukup menampung pencari kerja. Cara mengatasi pengangguran deflasiioner adalah: menarik investor baru melalui pendirian berbagai perusahaan untuk menyerap tenaga kerja.

**b. Mengatasi Masalah Pengangguran di Indonesia**

1. Memperluas lapangan kerja, Menurut Soemitro Djohadikoesoemo, melalui: industry padat karya dan penyelenggaraan proyek pekerjaan umum.
2. Mengurangi tingkat pengangguran
  - Pemberdayaan angkatan kerja dengan mengirimkan tenaga kerja ke Negara atau daerah yang memerlukan.
  - Pengembangan usaha sector informal dan usaha kecil
  - Pembinaan generasi muda melalui kursus dan pembinaan home industry.
  - Mengadakan program transmigrasi
  - Mendorong badan usaha untuk proaktif dengan lembaga pendidikan
  - Mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK)
  - Mendorong lembaga untuk meningkatkan skill
  -

- Mengefektifkan pemberian informasi ketenaga kerjaan melalui lembaga terkait.
- 3. Meningkatkan kualitas angkatan kerja dan tenaga kerja
  - Menetapkan upah minimum regional
  - Mengikuti setiap pekerja dalam asuransi jaminan social tenaga kerja
  - Mengajukan kepada setiap perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja
- 4. Mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk memenuhi hak tenaga kerja selain gaji, seperti cuti, istirahat, dan sebagainya.

**c. Upaya Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja di Indonesia**

Manusia adalah faktor produksi yang sangat penting selain tanah, teknologi dan modal. Ada beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia yaitu :

- Mengadakan latihan-latihan kerja bagi tenaga kerja agar memiliki kemampuan kerja yang baik
- Menyiapkan tenaga kerja terampil dengan meningkatkan pendidikan formal bagi penduduk usia sekolah
- Mengadakan pelatihan-pelatihan untuk memberikan keterampilan kepada tenaga kerja yang sedang mencari kerja agar dapat mengisi lowongan sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja
- Menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk

**F. Hukum Ketenagakerjaan**

- Menurut Molenaar dalam Asikin (1993: 2) “Hukum Perburuhan adalah bagian hukum yang berlaku, yang pokoknya mengatur hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha, antara tenaga kerja dan tenaga kerja serta antara pengusaha dan tenaga kerja.”

- Menurut Syahrani (1999: 86) “Hukum Perburuhan adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu hubungan antara buruh dengan majikan, dan hubungan antara buruh dan majikan dengan pemerintah (pengusaha).”

**Berdasarkan uraian diatas hukum ketenagakerjaan memiliki unsur:**

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha.
3. Adanya orang bekerja pada dan dibawah orang lain dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja, dan sebagainya.

**Asas Dan Tujuan Hukum Ketenagakerjaan**

**1. Asas Hukum Ketenagakerjaan**

Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: “Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Selanjutnya dalam pasal tersebut di tegaskan bahwa: “Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil makmur, dan merata, baik materiil maupun spritual.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa: “Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah.”

## **2. Tujuan Ketenagakerjaan**

Menurut Manulang (1995) tujuan hukum ketenagakerjaan adalah:

1. Untuk mencapai keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
2. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha.

Berdasarkan ketentuan pasal 4 UU Nomor 13 tahun 2003 pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

# KONSUMSI 5

## A. Definisi Konsumsi dan Teori Konsumsi

Konsep konsumsi adalah konsep yang di indonesiakan dari bahasa inggris "consumption" konsumsi adalah pembelajaran atas barang-barang dan jasa-jasa yang dilakukan oleh rumah tangga dengan tujuan memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan pembelajaran tersebut.

Teori konsumsi adalah teori yang mempelajari bagaimana manusia/konsumen memenuhi kebutuhannya dengan melakukan pembelian/penggunaan barang dan jasa. sedangkan pelaku konsumen adalah mereka yang memutuskan berapa jumlah barang dan jasa yang akan di beli dalam situasi. pembelanjaan masyarakat, atas makanan, dan barang- barang kebutuhan yang lain digolongkan sebagai pembelajaran atau konsumsi. barang- barang produksi yang akan di gunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.

## B. Fungsi Konsumsi

Fungsi konsumsi adalah kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional (pendapatan disposable) perekonomian tersebut. fungsi konsumsi dapat dinyatakan dalam persamaan :  $C = a + By$ , dimana a adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0, B adalah kencondongan konsumsi marjinal, C adalah tingkat konsumsi, dan y adalah tingkat pendapatan nasional.

Dalam teorinya, keynes mengandalkan analisis statistik derta membuat dugaan-dugaan tentang konsumsi berdasarkan intropeksi dan observasi casual. pertama dan yang terpenting, keynes menduga bahwa kecenderungan mengkonsumsi maejinal (marginal propensity to consume) atas jumbalah yang dikonsumsi dalam setiap pendapatan tambahan adalah antara nol dan satu. kecenderungan mengkonsumsi marjinal sangatlah kursial bagi rekomendasi kebijakan fisikal untuk mempengaruhi perekonomian, seperti di tunjukan oleh penganda kebijakan fisikal, muncul dari umpan balik antara pendapatan dan konsumsi. jadi dapat di simpulkan bahwa pengaruh jangka pendek suku bunga terhadap pengeluaran individu bersifat skunder dan relatif tidak penting, berdasarkan tiga dengan tersebut, fungsi konsumsi keynes sering ditulis sebagai :

$$C = C + cY, C > 0, 0 < [ < ]$$

Dimana

C = konsumsi

Y = pendapatan disposable C = konstanta

c = kecenderungan mengonsumsi marjinal

Menurut soeditono reksoprayitno [2000], terdapat beberapa catatan mengenai fungsi konsumsi keynes :

- Variabel nyata adalah bahwa fungsi konsumsi keynes menunjukan hubungan antara pendapatan nasional dan pengeluaran konsumsi dimana keduanya dinyatakan dalam tingkat harga konstan.
- Pendapatan yang terjadi : disebutkan bahwa pendapatan nasional yang menentukan besar kecilnya pengeluaran konsumsi adalah pendapatan nasional yang terjadi (current national income)
- Pendapatan absolut : disebutkan bahwa variabel pendapatan nasionalnya perlu diinterpastikan sebagai pendapatan nasional absolut, yang dapat di bandingkan dengan pendapatan relatif, pendapatan permanen, dan sebagainya.

Bentuk fungsi konsumsi menggunakan bentuk garis lurus. keynes berpendapat bahwa fungsi konsumsi berbentuk lengkung.

### C. Potret Konsumsi di Indonesia

Konsumsi Indonesia pada Triwulan I tahun 2020 ini. Dari sisi pengeluaran struktur ekonomi Indonesia konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 58,14% dan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi yang berkontribusi sebesar 31,91%.

Pada triwulan I-2020 ini, konsumsi rumah tangga memang tetap tumbuh tetapi melambat. Secara *year on year* pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2020 hanya 2,84%, turun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I-2019 yang sebesar 5,02%. Karena konsumsi rumah tangga ini merupakan penyokong utama struktur perekonomian Indonesia, pertumbuhannya yang merosot membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan pun menukik ke 2,97%.

Sedangkan PMTB atau investasi pada triwulan I-2020 ini tumbuh sebesar 1,7%. Pada triwulan I-2019 lalu, pertumbuhan investasi masih sebesar 5,03%. Konsumsi pemerintah yang sebenarnya diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan saat krisis seperti sekarang pada triwulan I-2020 ini pertumbuhannya juga melambat menjadi 3,74%. Padahal pada triwulan I-2019 lalu pertumbuhannya sebesar 5,22%. Ada pun kontribusi konsumsi pemerintah pada struktur ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 adalah sebesar 6,5%. Perlambatan pertumbuhan konsumsi pemerintah ini terjadi karena kontraksi pada belanja barang yang turun 6,12% sebagai dampak dari keputusan pemerintah melakukan efisiensi.

# INVESTASI 6

## A. Definisi Investasi

Investasi yang lazim disebut juga penanaman modal atau pembentukan modal, merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi (investment) dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih terhadap modal saham yang ada (net additional to exiting capital stock). Istilah lain dari investasi adalah akumulasi modal (capital accumulation) atau pembentukan modal (capital formation).

## B. Jenis Investasi

Menurut Maluya S.P Hasibuan (1990:112) investasi merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di negara yang sedang berkembang, sehingga investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja. Menurut Sadono Sukirno (2008:122), faktor-faktor penting yang menentukan tingkat investasi adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, suku bunga, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang, kemajuan teknologi, tingkat pendapatan nasional dan perubahannya, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Menurut Mankiw (Indra, 2010:3) jenis pengeluaran investasi terdiri dari:

- a. Investasi tetap bisnis (business fixed investment), mencakup peralatan dan struktur yang dibeli perusahaan untuk proses produksi.

- b. Investasi residensial (residential investment), mencakup rumah baru untuk tempat tinggal dan disewakan.
- c. Investasi persediaan (inventory investment), mencakup barang-barang yang disimpan perusahaan di gudang, termasuk bahan-bahan persediaan, barang dalam proses produksi, dan barang jadi.

### **Jenis Investasi**

#### **1. Saham**

Suatu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Dengan membeli suatu perusahaan maka secara sah kita menjadi pemilik saham perusahaan tersebut. Pembelian saham suatu perusahaan hanyalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

#### **2. Reksadana**

Wadah yang digunakan menghimpun uang milik masyarakat pemilik modal yang akan dikelola untuk menghasilkan keuntungan.

#### **3. P2P Lending (peer to peer lending)**

Sebuah platform/penyelenggara yang mempertemukan penanaman modal/investor dengan si peminjam modal biasanya pemilik usaha.

#### **4. Deposito**

Produk simpanan yang dimiliki bank yang penyetoran maupun penarikan uangnya hanya bisa dilakukan dalam waktu tertentu.

#### **5. Obligasi**

Jenis investasi dalam bentuk surat utang. Surat utang yang dikeluarkan oleh negara biasa disingkat SUN.

### **C. Tujuan Investasi**

- Untuk mendapatkan suatu pendapatan yang tetap dalam setiap periode seperti bunga, royalti, deviden, atau uang sewa dan lain sebagainya.
- Untuk membentuk suatu dana khusus, seperti dana untuk kepentingan ekspansi, kepentingan sosial dan lain sebagainya.

- Untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain melalui kepemilikan sebagai ekuitas suatu perusahaan tersebut.
- Untuk menjamin tersedianya bahan baku dan mendapatkan pasar untuk produk yang dihasilkan.
- Untuk mengurangi persaingan di perusahaan yang sejenis.
- Untuk menjaga hubungan dengan baik antara perusahaan maupun cabang perusahaan.

#### **D. Manfaat Investasi**

- Dapat meningkatkan asset
- Dapat memenuhi kebutuhan hidup di masa depan
- Hidup jadi lebih hemat
- Mencegah lilitan hutang
- Menciptkan kebahagiaan bagi keluarga
- Dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan

#### **E. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)**

Penanaman Modal Dalam Negeri atau (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Ketentuan mengenai Penanaman Modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penanam modal Dalam Negeri dapat dilakukan oleh perseorangan WNI, badan usaha Negeri, dan/atau pemerintah Negeri yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Kegiatan usaha usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan dan batasan kepemilikan modal Negeri atas bidang usaha perusahaan diatur di dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 Tentang Perubahan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Lebih lanjut mengenai pengertian, Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya disebut sebagai “PMDN”) berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UUPM”), yaitu kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Pengertian dari penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Badan usaha Indonesia yang dimaksudkan disini dapat berbentuk perseroan terbatas (“PT”).

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUPM, dijelaskan bahwa PMDN dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (3) UUPM lebih lanjut menjelaskan, penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk PT dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
- membeli saham; dan
- melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pengesahan dan Perizinan PMDN**

Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) UUPM, perusahaan penanam modal, termasuk PMDN, yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan. Izin sebagaimana disebutkan sebelumnya diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan terpadu satu pintu ini bertujuan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.

## **Fasilitas Khusus untuk PMDN**

Perbedaan mendasar pada perusahaan PMDN dan PT biasa yaitu PMDN mendapatkan fasilitas dari pemerintah Indonesia dalam menjalankan usahanya dimana fasilitas tersebut tidak didapatkan oleh PT biasa. Berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUPM dijelaskan bahwa fasilitas penanaman modal tersebut dapat diberikan kepada penanaman modal yang:

- melakukan perluasan usaha; atau
- melakukan penanaman modal baru.
- Lebih lanjut, Pasal 18 ayat (4) UUPM menjelaskan bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah kepada penanaman modal, termasuk di dalamnya PMDN, dapat berupa:
  - pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
  - pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
  - pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
  - penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan
  - keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

## **F. Penanaman Modal Asing.**

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hadir sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas untuk melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. BKPM memiliki mandat untuk mendorong investasi, baik dari dalam maupun luar negeri. Terkait Penanaman Modal Asing (FDI), berapakah nilai minimum investasinya di Indonesia? Bagaimanakah mekanisme Penanaman Modal Asing di Indonesia?

### **1. Syarat Penanaman Modal Asing**

Bagi investor asing yang hendak menanamkan modalnya di Indonesia, harus mendirikan perusahaan berdasarkan bidang usaha yang tercantum dalam KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). Perusahaan asing ini berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang dimiliki oleh setidaknya dua pemegang saham, baik itu perorangan atau perusahaan. Selanjutnya, seperti yang sudah disebutkan di atas, investor harus memperhatikan panduan bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan untuk asing yang tercantum dalam Perpres No. 44 Tahun 2016. Apabila bidang usahanya tidak tercantum dalam daftar tersebut, berarti kepemilikan saham asing bisa sampai 100%. Berapakah nilai minimum investasi asing di Indonesia? Nilai minimum investasi asing di Indonesia adalah Rp 10 miliar (tidak termasuk harga tanah dan bangunan). Jumlah minimal modal yang disetor ke bank di Indonesia adalah Rp 2,5 miliar.

### **2. Cara Pendirian PT bagi Penanaman Modal Asing**

Seperti disampaikan sebelumnya, perusahaan asing di Indonesia harus dimiliki oleh setidaknya dua pemegang saham. Perusahaan (PT) ini sendiri dapat dibentuk melalui merger maupun akuisisi. Merger adalah penggabungan perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya untuk kemudian membentuk perusahaan baru. Sedangkan akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan (perusahaan yang satu dibeli oleh perusahaan lainnya). Investor asing dapat mendirikan perusahaannya di manapun di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa bidang usaha industri harus dilakukan di Kawasan Industri.

### **3. Bagaimana Cara Berinvestasi di Indonesia**

Setelah berdiri, sebuah PT harus mendaftar melalui OSS (Online Single Submission) untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha) dan Izin Operasional atau Izin Komersial. Apabila NIB dan Izin Operasional atau Komersial ini tidak diurus, perusahaan tersebut tidak dapat menjalankan usahanya di Indonesia.

Pendaftaran ini dilakukan secara online dengan mengakses [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id). Semua bidang usaha dapat mendaftar langsung pada laman tersebut, kecuali sektor keuangan dan ESDM.

### **4. Manfaat Penanaman Modal Asing bagi Indonesia**

Ada banyak manfaat yang bisa kita peroleh dengan masuknya investasi asing ke Indonesia. Salah satunya adalah masuknya modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang kekurangan dana. Investasi asing ini juga banyak membuka lapangan kerja baru sehingga angka pengangguran dapat berkurang.

Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan transfer teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang lama-kelamaan akan dikembangkan pula di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pula para investor asing akan bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM ini tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional.

Manfaat yang paling nyata dari masuknya investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian dua negara.

### **G. Azas Penanaman Modal**

Lahirnya UU Penanaman Modal menunjukkan ciri khas tersendiri yaitu dengan sejumlah asas yang menjiwai norma dan upaya untuk menangkap nilai-nilai yang hidup dalam tatanan pergaulan masyarakat baik di tingkat nasional maupun di dunia internasional. Artinya, keikutsertaan Indonesia dalam berbagai

forum internasional, maka berbagai nilai yang dianggap telah menjadi norma universal diakomodasikan ke dalam hukum nasional. Adapun asas-asas yang terkandung dalam Pasal 3 ayat (1) UU Penanaman Modal ialah:

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal;
2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal;
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing maupun antara penanam modal dari suatu negara asing dan penanam modal dari negara asing lainnya;
5. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
6. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing;
7. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.
8. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

9. Asas kemandirian, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi; dan
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam sekatuan ekonomi nasional.

Disamping asas-asas hukum diatas, dalam Agreement on Trade Related Investment Measures (TRIMs) telah menentukan sebuah asas, yakni asas nondiskriminasi. Asas nondiskriminasi, yaitu asas di dalam penanaman investasi asing maupun lokal mengingat investasi itu sendiri bersifat state borderless (tidak mengenal batas negara). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa investasi yang ditanamkan oleh investor tidak dibedakan antara investasi asing dengan investasi lokal yang telah dimasukkan ke dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Penanaman Modal.

#### **H. Tujuan Penyelenggaraan Penanaman Modal**

Adapun tujuan diselenggarakannya penanaman modal terdapat dalam Pasal 3 Ayat (2) UU Penanaman Modal yang terdiri dari :

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mencermati tujuan diselenggarakannya penanaman modal sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 3 ayat (2) diatas, nampak bahwa pembentuk undang- undang telah menggariskan suatu kebijakan jangka panjang yang harus diperhatikan oleh berbagai pihak yang terkait dengan dunia investasi.

Tujuan yang hendak dicapai menjabarkan secara limitatif.

Secara teoretis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrumen atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan investasi diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Jadi, terdapat hubungan yang linier dan berkelanjutan antara investasi dengan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan bagi masyarakat.

### **I. Kebijakan Dasar Penanaman Modal**

Kebijakan investasi merupakan alat untuk menarik para pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kebutuhan akan kehadiran investasi asing bersifat khusus, dan karenanya menarik investasi asing harus dilakukan dengan cara khusus, mengingat persaingan ketat dengan negara-negara lain. Jadi, sistem hukum dan kelembagaan, dan insentif harus dibangun sebaik mungkin agar dapat menjadi tujuan investasi yang menarik.

Ada beberapa alasan atau tujuan mengapa seseorang melakukan investasi yaitu :

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak.

Kepastian hukum dalam hukum investasi positif yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berkaitan erat dengan kebijakan dasar penanaman modal yang menempatkan pemerintah agar:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, asas kepastian hukum ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dalam penjelasannya: asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal.

#### **J. Analisis Total Investasi**

Analisa Investasi wajib dilakukan dalam proses pengambilan keputusan investasi. Analisa investasi dapat dimulai dari ruang lingkup yang paling luas, yaitu kondisi ekonomi global, hingga mengerucut ke kondisi ekonomi salah satu emiten yang terdapat di bursa. Sebaliknya, analisa investasi juga dapat dimulai dari menilai kinerja keuangan emiten kemudian dibandingkan dengan kinerja emiten lain dalam sektor yang sama, penting untuk diketahui fase business cycle sektor tersebut, barulah selanjutnya memperhatikan kondisi ekonomi domestik, dan kondisi ekonomi global.

#### **Hal Penting dalam Analisa Saham**

Salah satu yang menentukan layak tidaknya saham suatu Emiten adalah dari Laporan Keuangannya. Namun demikian, Laporan Keuangan tidak dapat menjadi satu- satunya pertimbangan yang mendasari Investor memilih saham tersebut. Hal lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah prospek bisnis dari emiten tersebut, karena laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan Emiten pada saat ini dan masa lalu. Sementara, dengan menganalisa prospek bisnis, dapat dilakukan proyeksi mengenai kondisi emiten di masa yang akan datang.

#### **Manajemen yang Bagus**

Kinerja yang ditunjukkan oleh Emiten dalam Laporan Keuangan hanya salah satu refleksi dari kondisi Manajemen Emiten tersebut. Oleh sebab itu, jangan hanya terpaku pada Laporan Keuangan, sebab belum tentu Laporan Keuangan yang bagus sejalan dengan Manajemen yang bagus pula.

Sebaliknya, Manajemen yang bagus pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja keuangan yang bagus pula. Manajemen yang bagus, selain dari Laporan Keuangan, dapat terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan serta rekam jejak Manajemen dalam menanggapi masalah yang dihadapi Emiten.

### **Sektor Bisnis Cemerlang**

Manajemen yang bagus saja ternyata tidak cukup, sektor bisnis Emiten juga harus memiliki prospek yang cemerlang untuk masa yang akan datang. Manajemen yang bagus dan didukung prospek bisnis yang cemerlang akan menghasilkan kinerja keuangan yang semakin baik pula. Sebaliknya, Manajemen yang bagus akan menghadapi kesulitan dalam mengembangkan usahanya jika tidak didukung dengan prospek bisnis, sehingga berpotensi memberikan dampak negatif bagi kinerja Emiten.

### **Emiten yang Terus Tumbuh**

Kriteria selanjutnya adalah, kemampuan Emiten untuk terus tumbuh, sebab Manajemen yang bagus dan Peluang bisnis yang menjanjikan akan sia-sia tanpa didukung kemampuan Emiten memanfaatkan peluang bisnis tersebut untuk dapat terus mencatatkan pertumbuhan.

### **Harga Saham Wajar**

Setelah memenuhi semua kriteria di atas, hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah valuasi harga sahamnya. Menilai kewajaran dari harga saham Emiten dapat dilakukan dengan membandingkan harga pasar sahamnya dengan harga wajar sahamnya (nilai intrinsik). Harga pasar saham dapat lebih rendah atau lebih tinggi dari harga wajarnya (nilai intrinsiknya).

Kondisi ketika harga pasar saham lebih rendah dari harga wajarnya disebut undervalued yang berarti ada potensi mencatatkan kenaikan hingga mendekati nilai intrinsiknya. Sebaliknya, kondisi ketika harga pasar saham lebih tinggi dari harga wajarnya disebut overvalued yang berarti ada potensi mengalami penurunan harga hingga mendekati nilai intrinsiknya.

## Margin of Safety

Hal yang perlu dipahami investor adalah bahwa Margin yang besar tidak pasti selalu memberikan keuntungan yang besar pula, karena dalam margin yang besar terdapat resiko yang besar pula. Ketika harga pasar berada pada level yang jauh lebih rendah dari nilai intrinsiknya, saham tersebut memerlukan positive trigger yang cukup kuat pula agar dapat mencatatkan kenaikan guna mendekati nilai intrinsiknya. Sebaliknya, investor tentu tidak ingin harga pasar dan nilai intrinsik yang terlalu dekat, artinya investor menginginkan cukup jarak atau adanya jarak yang ideal diantara kedua nilai tersebut. Jarak ideal dapat dinilai dengan membandingkannya diantara saham-saham emiten yang bergerak di sektor yang sama dan memiliki ukuran yang sebanding. Konsep jarak ideal antara harga pasar sebuah saham dengan nilai instrinsiknya dalam kondisi undervalued dikenal dengan sebutan Margin of Safety.

## Cara Menghitung Potensi Keuntungan dari Investasi

Menghitung ROI sangat penting karena menentukan kemampuan Anda untuk mengembangkan investasi tersebut di masa depan, bukan sekadar menjalankannya (karena investasi memerlukan modal tambahan jika Anda ingin mengembangkannya).

Investor pemula kerap hanya berfokus pada laba bersih dari investasinya, padahal ROI penting dalam perhitungan perkembangan investasi.

Secara umum, rumus penghitungan ROI adalah jumlah total penjualan dikurangi biaya investasi, lalu hasilnya dibagi lagi dengan biaya investasi, lalu hasilnya dikali seratus persen. Hasil penjualan ini bisa dihitung dari penjualan tahunan, untuk memudahkan. Jika diilustrasikan, rumusnya adalah sebagai berikut:

- Investor A mengeluarkan investasi sebesar 10.000.000 (10 juta Rupiah). Penghasilan investasi dalam setahun mencapai 15.000.000 (15 juta Rupiah). ROI-nya adalah:  $(15.000.000 - 10.000.000)/10.000.000 \times 100\% = 0.5 \times 100\% = 50\%$ . Sekarang, bayangkan investor B mengeluarkan investasi sebesar 5.000.000 (5 juta Rupiah). Penghasilan investasi dalam setahun mencapai 13.000.000 (13 juta Rupiah). ROI-nya adalah:

$$(13.000.000 - 5.000.000) / 5.000.000 \times 100\% = 1.6 \times 100\% = 160\%$$

Jika dibandingkan, investor B mengeluarkan modal lebih kecil dan hasil investasinya juga lebih kecil dari investor A, namun persentase ROI dalam setahun ternyata melebihi investor A.

Dalam hal ini, investor B memiliki potensi lebih besar untuk mengembangkan investasinya di masa depan, kecuali jika investor A memastikan untuk memperbaiki metodenya dan meningkatkan persentase ROI.

### **Efek Compounding**

Potensi keuntungan investasi akan menjadi lebih maksimal bila bunga keuntungan yang didapat diinvestasikan kembali. Hal tersebut membuat bunga yang Anda dapat berlipat ganda dengan adanya pola 'bunga berbunga'. Itulah yang kita sebut dengan efek compounding.

Untuk menilai kelayakan suatu investasi, setidaknya terdapat empat metode yang bisa dilakukan, yakni:

#### **1. Net Present Value (NPV)**

Kelayakan investasi dengan metode Net Present Value (NPV) dinilai dari keuntungan bersih yang diperoleh di akhir pengerjaan suatu proyek atau investasi. Keuntungan bersih tersebut dihitung dari selisih nilai sekarang investasi dengan aliran kas bersih yang diharapkan dari proyek atau investasi di masa yang akan datang atau pada periode tertentu. Penilaian kelayakan investasi dengan pendekatan NPV ini merupakan metode kuantitatif yang mampu menunjukkan layak tidaknya suatu proyek atau investasi. Perhitungan NPV dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{NPV} &= \Sigma \text{PV}_t - A_0 \\ \text{NPV} &= (\text{PV}_1 + \text{PV}_2 + \dots) - A_0 \\ \text{PV} &= \text{NCF} \times \text{Discount factor} \end{aligned}$$

Keterangan:

Discount factor	= $1/(1+r)^t$
NPV	= Net Present Value
PV	= Present Value
NCF	= aliran kas
A0	= investasi yang dikeluarkan pada awal tahun
R	= biaya modal
T	= periode waktu investasi/proyek

Pengambilan keputusan investasi dalam metode ini menggunakan asumsi sebagai berikut:

Jika  $NPV_0 > NPV_1$ , maka investasi atau proyek dinilai tidak layak karena berisiko mengalami kerugian.

Jika  $NPV_0 < NPV_1$ , maka investasi atau proyek dinilai layak karena berpotensi menghasilkan keuntungan.

Jika  $NPV_0 = NPV_1$ , maka investasi atau proyek dinilai tidak layak karena tidak menghasilkan keuntungan.

## 2. Payback Period (PBP)

Jika NPV mengukur investasi dari profitabilitasnya, metode Payback Period mengukur kecepatan pengembalian investasi. Oleh sebab itu, satuan ukuran yang dihasilkan bukan dalam bentuk persentase ataupun rupiah, melainkan waktu. Jika nilai PBP lebih cepat atau singkat dari yang disyaratkan, artinya investasi memiliki kelayakan. Sebaliknya, apabila nilai PBP lebih lambat atau lama berarti mengindikasikan tidak layaknya suatu investasi. Adapun formula untuk menghitung nilai PBP sebagai berikut.

Jika arus kas per tahun sama jumlahnya  $PBP = (\text{investasi awal} / \text{ arus kas}) \times 1 \text{ tahun}$  Jika arus kas per tahun berbeda jumlahnya

$PBP = n + (a - b/c - b) \times 1 \text{ tahun}$  Keterangan:

n = tahun terakhir di mana jumlah arus kas belum bisa menutup investasi awal a = jumlah investasi awal

b = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n

c = jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke-n+1

### 3. Profitability Index (PI)

Sesuai dengan namanya, metode ini mengukur layak tidaknya suatu investasi dari indeks keuntungannya dengan membandingkan antara nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih dengan nilai sekarang investasi. Suatu investasi disebut layak menurut metode ini apabila nilai PI lebih besar dari 1, karena dinilai menguntungkan. Sebaliknya, jika nilai PI lebih kecil dari 1, artinya tidak menguntungkan sehingga investasi tersebut tidak layak. Rumusan perhitungan nilai PI yakni:  $PI = PV/I$

Keterangan:

PI = Profitability Index

PV = Present Value (nilai sekarang seluruh penerimaan kas bersih)

I = Investasi

### 4. Internal Rate of Return (IRR)

Metode Internal Rate of Return (IRR) mengukur kelayakan suatu investasi berdasarkan tingkat suku bunga yang dapat menjadikan jumlah nilai sekarang keuntungan yang diharapkan sama dengan jumlah nilai sekarang dari biaya modal ( $NPV = 0$ ). Bagaimana bisa? Dalam metode ini, time value of money telah diperhitungkan sehingga arus kas yang diterima telah didiskontokan atas dasar biaya modal atau tingkat bunga yang diterapkan.

Untuk menghitung nilai IRR harus dilakukan dengan cara trial and error atau menggunakan tabel tingkat bunga. Adapun formula perhitungan IRR sebagai berikut.  $IRR = R1 + (PV1 - PV0 / PV1 - PV2) \times (R1 - R2)$

Keterangan:

IRR = Internal Rate of Return

R1 = tingkat bunga pertama

R2 = tingkat bunga kedua

PV = Present Value

Pengambilan keputusan investasi berdasarkan metode IRR menggunakan asumsi sebagai berikut:

Suatu investasi dikatakan layak, jika nilai IRR yang dihasilkan lebih besar dari tingkat bunga yang diterapkan.

Suatu investasi dikatakan tidak layak, jika nilai IRR yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat bunga yang diterapkan.

Dengan menganalisis kelayakan investasi, investor dapat mengetahui secara jelas prospek dari proyek atau investasi tersebut, apakah menguntungkan atau tidak. Secara lebih lanjut, tindakan penanaman modal pada suatu proyek yang menguntungkan bisa memberikan tingkat pengembalian yang diharapkan di masa yang akan datang.

## **K. Analisis Atas PMDN**

### **Deskripsi Obyek Penelitian Gambaran Provinsi D.I. Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi terkecil kedua setelah provinsi DKI Jakarta dan terletak di tengah pulau Jawa, dikelilingi oleh propinsi Jawa Tengah. Dilihat dari letak geografis, letak provinsi D.I. Yogyakarta berada pada 7015 - 8015' lintang selatan dan garis 11005 - 11004 bujur timur. Luas keseluruhan Propinsi D.I.Yogyakarta adalah 3.185,8 km dan kurang dari 0,5 % luas daratan Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terletak di bagian selatan dan tengah di Pulau Jawa dibatasi oleh Samudera Hindia di bagian selatan dan Provinsi Jawa Tengah di bagian lainnya. Batas dengan Provinsi Jawa Tengah meliputi :

Tenggara: Kabupaten Wonogiri

Timur Laut : Kabupaten Klaten

Barat Laut : Kabupaten Magelang

Barat : Kabupaten Purworejo

Secara geografis D.I. Yogyakarta beriklim tropis yang dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Suhu udara rata-rata di Yogyakarta tahun 2011 berkisar antara 17,50C-39,80C.

### **Pengujian Model Uji Asumsi Klasik Normalitas**

Dapat dilihat pada tabel 2, nilai Z (Asymp. Sig) sebagai indikator untuk Y = 0,642, PMDN = 0,250, PMA = 0,845, PP = 0,838 dan TK = 0,812 yang dimana nilai semua Z pada uji ini > 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data terdistribusi secara normal.

**Tabel 2 Hasil Deteksi Normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Y	PMDN	PMA	PP	TK
N	17	17	17	17	17
Normal Mean	1.7072E13	1.7224E12	2.0839E8	1.0809E11	1.6828E6
Parameters <sup>a,b</sup> Std. Deviation	3.10507E12	7.60976E11 .247	1.15705E8	5.72278E10	1.37979E5
Most Extreme Absolute	.180		.149	.150	.154
Differences Positive	.180	.126 -.247	.149	.150 -.129	.109
Negative	-.127	1.020	-.118	.619	-.154
Kolmogorov-Smirnov Z	.741		.614		.637
Asymp. Sig. (2-tailed)	.642	.250	.845	.838	.812

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

## Multikolinearitas

**Tabel 3 Hasil Deteksi Multikolinearitas dengan Koefisien Korelasi Coefficient Correlations<sup>a</sup>**

Model	LNPMA	LNPMDN	LNTK	LNPP
1	1.000	-.142	-.108	-.363
Correlations				
LNPMA	-.142	1.000	-.062	-.063
LNPMDN	-.108	-.062	1.000	-.776
LNTK	-.363	-.063	-.776	1.000
LNPP				
Covariances				
LNPMA	.002	.000	-.003	-.002
LNPMDN	.000	.000	.000	- 9.194E-5
LNTK				
LNPP	-.003	.000	.258	-.033
	-.002	-9.194E-5	-.033	.007

a. Dependent Variable: LNY

Dapat dilihat dari tabel diatas, koefisien korelasi antar variabel independen bernilai negatif mulai dari Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Pengeluaran Pemerintah (PP) dan Tenaga Kerja (TK) dan tidak ada yang melebihi 0.90 sehingga tidak terjadi multikolinearitas.

## Autokorelasi

**Tabel 5 Hasil Deteksi Autokorelasi dengan Uji Run Test Runs Test**

	Unstandardized Value	Predicted
Test Value <sup>a</sup>	.03002	
Cases < Test Value	8	
Cases >= Test Value	8	
Total Cases	16	
Number of Runs	9	
Z	.000	
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000	

### a. Median

Dapat dilihat dari uji run tes diatas sebesar  $1.000 > 0.05$ . Dengan demikian, data yang dipergunakan cukup acak sehingga tidak terdapat masalah autokorelasi pada data yang diuji.

## Pengujian Statistik

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis serta pembahasan terhadap Pengaruh penanaman modal dalam negeri (PMDN), penanaman modal asing (PMA), pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I. Yogyakarta pada periode tahun 1996-2012. Analisis model ini menggunakan model logaritma natural dengan alat bantu program komputer SPSS 17. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut :

**Tabel 6 Hasil Regresi**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
Constanta	22.83503	5.560688	4.106511	0.0015
LN(PMDN)	0.019724	0.017400	1.133562	0.2791
LN(PMA)	0.142914	0.049995	2.858558	0.0144
LN(PP)	0.140872	0.084180	1.673466	0.1201
LN(TK)	0.055265	0.507737	0.108846	0.9151

$\alpha = 5 \%$

$R^2 = 0.868938$

F-Statistic = 19.88998

Durbin-Watson = 1.057986

### Koefesien Determinasi ( $R^2$ )

Dari hasil regresi diperoleh nilai  $R^2 = 0.868938$  yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta dapat dijelaskan oleh variasi model dari PMDN, PMA, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja sebesar 86,8938 % dan sisanya sebesar 13,1062 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model tersebut.

### Hasil Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F-hitung dengan F-tabel ( $\alpha$ ; k-1, n-k). Hasil yang diperoleh yaitu nilai Fhitung = 19.88998 > Ftabel = 3,49 keputusannya adalah Hipotesis nol ( $H_0$ ) ditolak dan Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) diterima. Sehingga hasil uji-F menyatakan bahwa variabel Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerjasecara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta.

### **Hasil Uji Statistik t**

Pengujian parsial (Uji t) dari setiap variabel independen menunjukkan pengaruh dari keempat variabel independen, yakni PMDN, PMA, Pengeluaran Pemerintah dan Tenaga Kerja secara individual terhadap variabel dependen, yakni pertumbuhan ekonomi. Pengujian uji t dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-hitung dengan nilai t- tabel. Dimana nilai t-tabel diperoleh dari  $\alpha$  ; df (n-k).

### **Interpretasi Hasil Analisis dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil regresi, maka model ekonometrika yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut :

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 \ln \text{PMDN} + \beta_2 \ln \text{PMA} + \beta_3 \ln \text{PP} + \beta_4 \ln \text{TK} + e$$
$$\ln Y = 22.83503 + 0.019724 \ln \text{PMDN} + 0.142914 \ln \text{PMA} + 0.140872 \ln \text{PP} + 0.055265 \ln \text{TK}$$

Interpretasi hasil regresi pengaruh pmdn, pma, pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta yang mempunyai hubungan signifikan ataupun tidak signifikan adalah sebagai berikut:

#### **L. Analisis Atas PMA**

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Menurut UU No.1 Tahun 1967, PMA adalah hanya meliputi modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan- ketentuan Undang-undang ini yang digunakan untuk menjalankan perusahaan Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut, perluasan dan alih status, yang terdiri dari saham peserta Indonesia, saham asing dan modal pinjaman.

**a. Azas penanaman modal**

Menurut pasal 3 ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2007 bahwa penanaman modal diselenggarakan berdasarkan azas:

1. Kepastian hukum
2. Keterbukaan
3. Akuntabilitas
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
5. Kebersamaan
6. Efisiensi berkeadilan
7. Berkelanjutan
8. Berwawasan lingkungan
9. Kemandirian
10. Keseimbangan kemajuan kesatuan ekonomi nasional

**b. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal**

Menurut pasal 3 ayat 2 UU Nomor 25 Tahun 2007 bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain:

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
- Menciptakan lapangan kerja
- Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan
- Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional
- Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional
- Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan
- Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun luar negeri
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

## Analisis investasi atas PMA

Perhitungan Growth and Share Investasi PMA Indonesia Tahun 1998–2014

Tahun	PMDN (Jutaan US \$)	Growth (%)	Share (%)	Kuadran
1998	13.563,10	–	5,2	III
1999	10.518,40	–22,45	4,04	III
2000	15.167,50	44,2	5,82	I
2001	15.083,90	–0,55	5,79	II
2002	9.789,10	–35,1	3,76	III
2003	13.207,20	34,92	5,06	IV
2004	10.279,80	–22,17	3,94	III
2005	13.579,30	32,1	5,21	IV
2006	5.977,00	–55,98	2,29	III
2007	10.341,30	73,02	3,97	IV
2008	14.873,20	43,82	5,7	IV
2009	10.815,40	–27,28	4,15	III
2010	16.214,80	49,92	6,22	I
2011	19.474,60	20,1	7,47	I
2012	24.564,40	26,14	9,42	I
2013	28.617,55	16,5	10,98	I
2014	28.529,7	–0,03	10,94	II
Total	232.066,55	177,19	100	
Rata-Rata	14.504,16	11,81	5,88	

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah).

## M. Analisis Nilai PMA Tahun 2045

Penanaman Modal di Indonesia diatur dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanam Modal. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Penanam Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri (Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) adalah penanaman modal yang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah RPUS dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan bahwa: "pengertian penanaman modal dalam undang-undang ini hanyalah

meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam artian bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut". Penanaman Modal Asing merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menanamkan modalnya disuatu Negara dengan tujuan untuk mendapatkan laba melalui penciptaan suatu produksi atau jasa (Sunny dan Rochmat, 1998: 108)

## ANALISA PMA TAHUN 2045

Realisasi PMA Indonesia Tahun 1998-2014

Tahun	t	N	PMDN dan PMA (Jutaan US\$) Y	t <sup>2</sup>	Yt
1998	-15	1	13.563,10	225	
1999	-13	2	10.518,40	169	
2000	-11	3	15.167,50	121	-203.446,50
2001	-9	4	15.083,90	81	-136.739,20
2002	-7	5	9.789,10	49	-166.842,50
2003	-5	6	13.207,20	25	-135.755,10
2004	-3	7	10.279,80	9	-68.523,70
2005	-1	8	13.579,30	1	-66.036,00
2006	1	9	5.977,00	1	-30.839,40
2007	3	10	10.341,30	9	-13.579,30
2008	5	11	14.873,20	25	5.977,00
2009	7	12	10.815,40	49	31.023,90
2010	9	13	16.214,80	81	74.366,00
2011	11	14	19.474,60	121	75.707,80
2012	13	15	24.564,40	169	145.933,20
2013	15	16	28.617,55	225	214.220,60
2014	17	17	28.529,70	289	319.337,20
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>153</b>	<b>260.596,25</b>	<b>1.649</b>	<b>429.263,19</b>
<b>Rata-Rata</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>15.329,19</b>	<b>97</b>	<b>485.004,90</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (Data Diolah).

# PERTANIAN 7

## A. Peranan Sektor Pertanian

Mengikuti analisis dari **Kuznets** (1964), pertanian di LDCs dapat dilihat sebagai suatu sektor ekonomi yang sangat potensial dalam empat (4) bentuk kontribusinya terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, yaitu sebagai berikut.

1. Ekspansi dari sektor-sektor ekonomi lainnya sangat tergantung pada pertumbuhan *output* disektor pertanian, baik dari sisi permintaan sebagai sumber pemasokan makanan yang kontinu mengikuti pertumbuhan penduduk, maupun dari sisi penawaran sebagai sumber bahan baku bagi keperluan produksi di sektor-sektor lain seperti industri manufaktur (misalnya industri makanan dan minuman) dan perdagangan. **Kuznets** menyebut ini sebagai kontribusi produk.
2. Di negara-negara agraris seperti Indonesia, pertanian berperan sebagai sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor ekonomi lainnya. **Kuznets** menyebutnya kontribusi pasar.
3. Sebagai suatu sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Selain itu, menurut teori penawaran tenaga kerja (L) tak terbatas dari **Arthur Lewis** dan telah terbukti dalam banyak kasus, bahwa dalam proses pembangunan ekonomi terjadi transfer surplus L dari pertanian (pedesaan) ke industri dan sektor-sektor pertanian lainnya. **Kuznets** menyebutnya kontribusi faktor-faktor produksi.

4. Sebagai sumber penting bagi surplus neraca perdagangan (sumber devisa), baik lewat ekspor hasil-hasil pertanian maupun dengan peningkatan produksi pertanian dalam negeri menggantikan impor (substitusi impor). **Kuznets** menyebutnya kontribusi devisa.

- **Kontribusi Produk**

Kontribusi produk dapat diartikan sebagai ketergantungan sektor-sektor lain seperti industri dan jasa, dalam melakukan ekspansi atau perluasan usaha terhadap pertumbuhan output sektor pertanian baik dalam sisi permintaan maupun penawaran. Kontribusi produk sektor pertanian terhadap pembangunan dapat dibagi ke dalam beberapa sub sektor, seperti sub sektor bahan pangan, seperti padi, jagung, dan bahan makanan lainnya. Sedangkan subsektor lain adalah sub sektor perkebunan dan peternakan

- **Kontribusi Pasar**

Kontribusi pasar menjadikan sektor pertanian merupakan sumber penting bagi pertumbuhan permintaan domestik bagi produk-produk dari sektor-sektor ekonomi lainn. Kontribusi Pasar Kontribusi pasar untuk produk pertanian dibandingkan sektor nonpertanian tergantung pada; *Pertama*, dampak dari keterbukaan ekonomi dimana pasar domestik juga diisi dengan barang-barang impor. Jenis teknologi yang digunakan di sektor pertanian yang menentukan tingkat mekanisasi dan modernisasinya. *Kedua*, jenis teknologi yang digunakan di sektor pertanian yang menentukan tinggi rendahnya tingkat mekanisasi atau modernisasi di sektor tersebut. Permintaan terhadap barang-barang produsen buatan industri dari kegiatan-kegiatan pertanian tradisional lebih kecil dibandingkan permintaan dari sektor pertanian yang sudah modern.

- **Kontribusi Faktor-faktor Produksi**

Dalam konteks ini, pertanian merupakan sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Dimana dalam proses pembangunan ekonomi terjadi transfer surplus tenaga

kerja dari pertanian (pedesaan) ke industri dan sektor-sektor perkotaan lainnya. Kontribusi faktor-faktor produksi di ukur dengan produktivitas. Jika sektor pertanian mengalami kelebihan supply tenaga kerja, maka ada kecenderungan mereka beralih ke sektor industri. Hal ini mengakibatkan produktivitas di sektor pertanian semakin menurun digantikan oleh peran sektor industri yang makin meningkat. Untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian harus terjadi surplus di sektor pertanian dengan cara meningkatkan kinerja (teknologi, infrastruktur, SDM), meningkatkan permintaan di mana mereka mampu meningkatkan sisi permintaan, serta nilai tukar antara produk pertanian dan non pertanian.

- **Kontribusi Devisa**

Dalam percaturan internasional, dimana salah satu aktivitasnya adalah melaksanakan perdagangan internasional, maka sektor pertanian menjadi salahsatu kontributor bagi pembangunan ekonomi sebuah negara dalam menghasilkan devisa baik melalui penjualan komoditas, produk pertanian maupun melalui pengiriman tenaga kerja dibidang pertanian. Neraca perdagangan pertanian yang positif (surplus) dapat menjadi perseden baik bagi pembangunan ekonomi nasional.

## **B. Kinerja dan Peran Sektor Pertanian di Indonesia**

### **1. Pertumbuhan Output Sejak Tahun 1970-an**

Mungkin sudah merupakan suatu evolusi alamiah seiring dengan proses industrialization, dimana pangsa output agregat (PDB) dari pertanian relatif menurun sedangkan dari industri manufaktur dan sektor sektor sekunder lainnya dan sektor tersier meningkat. Selama periode 1990-an pangsa PDB dari pertanian (termasuk peternakan,kehutanan, dan perikanan) mengalami penurunan (harga konstan1993) dari sekitar 17,9% tahun 1993 menjadi 16,4% tahun 2001, sedangkan,pangsa PDB industri dari industri manufaktur selama kurun waktu yang sama meningkat dari 22,3% menjadi 26,0%. Penurunan kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB ini bukan berarti bahwa volume produksi disektor berkurang (pertumbuhan negatif) selama periode

tersebut, tetapi laju pertumbuhan outputnya lebih lambat dibandingkan laju pertumbuhan output disektor sektor lain. Hal ini bisa terjadi secara rata rata, elastisitas pendapatan dari permintaan terhadap produk-produk dari sektor lain seperti barang industri.

**Tabel 5.1** Distribusi PDB Menurut sektor (Harga konstan 1993): 1993-2001 (%)

Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Pertanian	17,9	16,7	15,4	15,0	15,0	18,1	19,6	17,0	16,4
Pertambangan & penggalan	9,5	9,4	9,3	9,2	8,8	12,6	10,0	13,8	13,6
Industri manufaktur	22,3	23,3	23,9	24,7	24,7	25,0	26,0	26,2	26,0
Listrik, gas, & air	1,0	1,0	1,1	1,2	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2
Bangunan	6,8	7,3	7,6	8	8,2	6,5	6,2	5,9	5,6
Perdagangan, hotel, & restoran	16,8	16,8	16,7	16,7	17,0	15,3	16,0	15,2	16,1
Transportasi & komunikasi	7,1	7,1	7,1	7,2	7,3	5,4	5,0	5,0	5,4
Bank & Keuangan	4,3	4,5	4,7	4,6	4,6	3,3	2,8	2,8	2,8
Penyewaan & real estate	2,9	2,9	2,8	2,7	2,7	4,0	3,7	3,4	3,4
Jasa lainnya	11,4	11,0	10,7	10,3	10,4	8,6	9,5	9,5	9,5

## 2. Pertumbuhan dan diversifikasi ekspor

Komoditas pertanian Indonesia yang diekspor cukup bervariasi mulai dari getah karet, kopi, udang, rempah-rempah, mutiara, hingga berbagai macam sayur dan buah. Selama 1993-2001, nilai X total dari komoditas ini rata-rata per tahun hampir mencapai 3 miliar dollar AS. diantara komoditi tersebut, yang paling besar nilai ekspornya adalah udang dengan rata rata sedikit diatas 1 miliar dollar AS selama periode yang sama.

**Tabel 5.4** Perkembangan Nilai Ekspor Hasil Perikanan: 1994-2000  
(Juta Dollar AS)

Rincian	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	%Pertumbuhan/ Tahun
<b>Bahan makanan</b>	<b>1.603</b>	<b>1.697</b>	<b>1.713</b>	<b>1.646</b>	<b>1.643</b>	<b>1.543</b>	<b>1.648</b>	<b>0,57</b>
Udang	1.010	1.037	1.018	1.011	1.012	889	973	-0,40
Tuna	182	213	193	189	215	189	190	1,22
Lainnya	411	447	503	446	416	464	485	3,22
<b>Bukan Bahan Makanan</b>	<b>76</b>	<b>67</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>56</b>	<b>62</b>	<b>92</b>	<b>8,33</b>
Rumput laut	9	16	19	11	10	16	25	27,46
Mutiara	21	12	12	15	23	20	21	4,61
Ikan hias	9	10	9	3	1	10	10	105,40
Lainnya	37	30	33	11	22	15	35	20,74
<b>Jumlah</b>	<b>1.697</b>	<b>1.764</b>	<b>1.786</b>	<b>1.686</b>	<b>1.699</b>	<b>1.605</b>	<b>1.739</b>	<b>0,72</b>

**Keterangan:** \* = dibulatkan Sumber: BPS

Namun dilihat total x nasional, kontribusi pertanian terhadap pembentukan jumlah X nasional sangat kecil. Pada tahun 2002 hanya 4,7% dibandingkan besarnya dari industri manufaktur yang mencapai hampir 69,0%. Pangsa ini sedikit meningkat dibandingkan januari-mei 2001. Selama periode yang sama tahun 2002 naik menjadi 995,0 juta dolar AS. Sebaliknya, sektor ini punya peran besar secara tidak langsung, yakni lewat X dari industri manufaktur, sejak output dari industri manufaktur indonesia didominasi oleh produk produk berbasis pertanian seperti makanan dan minuman dan produk dari kulit,bambu,dan rotan.

### 3. Kontribusi Terhadap Kesempatan Kerja

Sudah diduga bahwa disuatu negara agraris besar seperti Indonesia, dimana ekonomi dalam negerinya masih didominasi oleh ekonomi pedesaan, sebagian besar dari jumlah angkatan/tenaga kerja (L) bekerja dipertanian.

## C. Nilai Tukar Petani

### 1. Pengertian Nilai Tukar

**Nilai tukar petani** (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase. Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pengumpulan data dan perhitungan NTP di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.

**Indeks harga yang diterima petani** (IT) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani. Dari nilai IT, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

IT dihitung berdasarkan nilai jual hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani, mencakup sektor padi, palawija, hasil peternakan, perkebunan rakyat, sayuran, buah, dan hasil perikanan (perikanan tangkap maupun budi daya).

**Indeks harga yang dibayar petani** (IB) adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian. Dari IB, dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan IB juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.

IB dihitung berdasarkan indeks harga yang harus dibayarkan oleh petani dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan penambahan barang modal dan biaya produksi, yang dibagi lagi menjadi sektor makanan dan barang dan jasa non makanan.

Secara umum NTP menghasilkan 3 pengertian:

- NTP > 100 berarti NTP pada suatu periode tertentu lebih baik dibandingkan dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik dan

menjadi lebih besar dari pengeluarannya.

- $NTP = 100$  berarti NTP pada suatu periode tertentu sama dengan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$  berarti NTP pada suatu periode tertentu menurun dibandingkan NTP pada tahun dasar, dengan kata lain petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun dan lebih kecil dari pengeluarannya.

Orientasi pembangunan saat ini yang berfokus pada industri dan modal cenderung mengesampingkan pembangunan pertanian pedesaan, sehingga indikator nilai tukar petani tidak masuk ke dalam tujuan pembangunan.

#### **D. Pengertian Umum :**

- NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani
- NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)

#### **E. Arti Angka NTP :**

- $NTP > 100$ , berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- $NTP = 100$ , berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

#### **F. Kegunaan dan Manfaat**

- Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang- barang yang dihasilkan petani. Indeks

ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.

- Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang- barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
- NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

### **G. Cakupan Komoditas**

- Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija
- Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan
- Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah
- Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
- Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2019 secara nasional turun 0,21% dibandingkan Februari 2019, dari 102,94 menjadi 102,73. NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. Selain itu, NTP menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi petani. Sehingga semakin tinggi NTP, maka semakin meningkat daya beli petani.

# INDUSTRIALISASI 8

## A. Konsep dan Tujuan Industrialisasi

Awal konsep industrialisasi -> Revolusi industri abad 18 di Inggris -> Penemuan metode baru dalam pemintalan dan penemuan kapas yang menciptakan spesialisasi produksi dan peningkatan produktivitas faktor produksi.



Selanjutnya penemuan baru pengolahan besi & mesin uap sehingga mendorong inovasi -> Baja, kereta dan kappa tenaga uap.



Setelah PD II, muncul teknologi baru -> Assembly line, listrik, motor, barang sintesis, telekomunikasi, elektronik, bio, computer & robot



Perubahan pola dan volume perdagangan dunia dan proses industrialisasi di dunia

## B. Faktor – faktor Pendorong Industrialisasi

Selain perbedaan kemampuan dalam pembangunan teknologi (T) dan inovasi (In), serta laju pertumbuhan PN per kapita, ada sejumlah faktor lain yang membuat intensitas dari proses industrialisasi berbeda antarnegara.faktor-faktor lain tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri.Suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri-industri dasar atau disebut juga industri-industri primer atau hulu, seperti:

- Besi dan baja
- Semen
- Petrokimia
- Industri-industri tengah (antara hulu dan hilir)

Contohnya:

- Industri barang modal(mesin).
- Alat-alat produksi yang relatif kuat.

Industri-industri tengah akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat dibandingkan negara yang hanya memiliki industri-industri hilir atau ringan,seperti tekstil, pakaian jadi,makanan dan minuman,dan sebagainya, Alasannya,kalau sudah ada industri-industri hulu dan tengah yang kuat,jauh lebih mudah bagi negara bersangkutan untuk membangun industri-industri hilirndengan tingkat diversifikasi produksi yang tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang belum mempunyai industri-industri hulu tengah.

2) Besarnya pasar dalam negeri yang ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat PN riil per kapita.Pasar dalam negeri yang besar,seperti Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 200 juta orang(walaupun tingkat pendapatan per kapita relatif rendah dibandingkan negara-negara lain),merupakan salah satu faktor perangsang bagi pertumbuhan kegiatan-kegiatan ekonomi,termasuk industri,karena pasar yang besar menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi (dengan asumsi

bahwa faktor-faktor penentu lainnya mendukung). Jika pasar domestik kecil, maka ekspor merupakan alternatif satu-satunya untuk mencapai produksi optimal. Namun, tidak mudah melakukan ekspor, terutama pada awal industrialisasi.

- 3) Ciri industrialisasi, yang dimaksud disini adalah antara lain cara pelaksanaan industrialisasi, seperti misalnya tahapan dari implementasi, jenis industri yang diunggulkan, pola pembangunan sektor industri, dan insentif yang diberikan, termasuk insentif kepada investor.
- 4) Keberadaan SDA. Ada kecenderungan bahwa negara-negara yang kaya SDA, tingkat diversifikasi dan laju pertumbuhan ekonominya relatif lebih rendah, dengan negara tersebut cenderung tidak atau terlambat melakukan industrialisasi atau prosesnya berjalan relatif lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara yang miskin SDA.
- 5) Kebijakan atau strategi pemerintah yang diterapkan, termasuk instrumen-instrumen dari kebijakan (seperti tax holiday, bebas bea masuk terhadap impor bahan baku dan komponen-komponen tertentu, pinjaman dengan suku bunga murah, dan ekspor processing zone atau daerah bebas perdagangan) yang digunakan dan arah implementasinya. Pola industrialisasi di negara yang menerapkan kebijakan substitusi impor dan kebijakan perdagangan luar negeri yang protektif (seperti Indonesia terutama selama pemerintahan orde baru hingga krisis yang terjadi) berbeda dengan di negara yang menerapkan kebijakan promosi ekspor dalam mendukung perkembangan industrinya.

### **C. Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional**

Sesuai sifat alamiah dari prosesnya, industri dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu industri primer atau hulu yang mengolah output dari sektor pertambangan (bahan mentah) menjadi bahan baku siap pakai untuk kebutuhan proses produksi pada tahap-tahap selanjutnya. Dan industri sekunder atau industri manufaktur yang terdiri dari industri tengah yang membuat barang-barang modal, barang-barang setengah jadi dan alat-alat produksi, serta industri

hilir yang membuat barang-barang konsumen rumah tangga.

Derajat dari industrialisasi di suatu negara dicerminkan oleh tingkat pembangunan, tidak hanya dari industry primer, tetapi juga industry sekunder di negara tersebut. Tingkat pembangunan sektor industry tidak hanya diukur dari persentase pertumbuhan outputnya atau pangsa outputnya dalam pembentukan PDB dan kontribusinya terhadap nilai ekspor (X) total, tetapi juga tingkat diversifikasi produksinya atau variasi dari barang yang dibuat, baik menurut jenis pemakaian atau menurut T-nya (rendah, menengah, dan tinggi).

Walaupun suatu negara memiliki industry primer yang besar, tetapi lemah dalam industry sekunder, maka belum dapat dikatakan bahwa tingkat industrialisasi di negara tersebut sudah tinggi. Di banyak literature mengenai industrialisasi, perhatian lebih banyak diberikan kepada industry manufaktur.

#### **D. Strategi Pembangunan Sektor Industri**

Dalam melaksanakan industrialisasi, ada dua pilihan strategi, yakni strategi substitusi impor (SI) atau strategi promosi ekspor (PE). Strategi SI sering disebut kebijakan *inward-looking*, yakni strategi yang memfokuskan pada pengembangan industry nasional yang berorientasi pada pasar domestic. Sedangkan strategi PE sering disebut kebijakan *outward-looking*, yakni strategi yang memfokuskan pada pengembangan industri nasional lebih berorientasi kepasar internasional. Strategi SI dilandasi oleh pemikiran bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat dicapai dengan mengembangkan industri di dalam negeri yang memproduksi barang-barang pengganti M (substitusi M). sedangkan strategi PE dilandasi oleh pemikiran bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa direalisasikan jika produk-produk yang dibuat didalam negeri dijual di pasar X.

##### **1. Strategi SI**

Beberapa pertimbangan yang lazim digunakan dalam memilih strategi ini terutama adalah

→ SDA dan faktor produksi terutama L cukup tersedia didalam

negeri. Sehingga, secara teoritis, biaya produksi yang intensitas penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut tinggi bisa rendah.

- Potensi permintaan didalam negeri yang memadai.
- Untuk mendorong perkembangan industry manufaktur didalam negeri. Dengan berkembangnya industry didalam negri, maka kesempatan kerja diharapkan terbuka lebih luas.
- Dapat mengurangi ketergantungan terhadap M, yang berarti juga mengurangi defisit saldo neraca perdagangan dan menghemat cadangan devisa.

Dalam strategi SI, industri-industri dalam negeri yang dikembangkan adalah yang memproduksi barang-barang yang sebelumnya di M untuk pasaran dalam negeri. Oleh karena itu, M dikurangi atau dilarang sama sekali. Pelaksanaan strategi SI terdiri dari dua tahap. Tahap pertama, industry yang dikembangkan adalah industri yang membuat barang-barang konsumsi C, walaupun tidak semuanya bersifat barang yang tahan lama seperti kendaraan bermotor, kulkas, televisi, dan alat pendingin. Untuk membuat barang-barang tersebut diperlukan barang modal dan *input* perantara

## 2. Strategi PE

Beberapa saran penting yang diberikan agar penerapan strategi tersebut membawa hasil yang baik adalah bahwa :

- Pasar harus menciptakan signal harga yang benar, yang sepenuhnya merefleksikan kelangkaan dari barang yang bersangkutan, baik dipasar *output* maupun pasar *input*.
- Tingkat produksi dari M harus rendah  
Nilai tukar mata uang harus realistis, sepenuhnya merefleksikan keterbatasan uang asing yang bersangkutan.
- Lebih penting lagi, harus ada insentif untuk meningkatkan X.  
Menurut strategi PE, Paling tidak kesempatan yang sama harus diberikan kepada industry-industri yang memproduksi untuk pasar dalam negeri dan industry-industri untuk pasar X

## **E. Kebijakan Industri Pasca Krisis Ekonomi**

Salah satu sektor ekonomi didalam negeri yang sangat terpuuk oleh krisis ekonomi adalah sector industry manufaktur. Akibat depresiasi rupiah yang sangat besar terhadap dolar AS pada tahun 1998, banyak perusahaan disektor tersebut harus mengurangi volume produksi atau bahkan menutup usaha mereka karena sangat mahal biaya M.

Masuknya IMF ke Indonesia dalam usaha membantu Indonesia untuk keluar dari krisis tersebut telah membawa suatu perubahan besar didalam kebijakan industrialisasi didalam negeri. Kebijakan industry baru ini lebih berorientasi ke X dibandingkan sebelum krisis, walaupun tidak menghilangkan perhatian kepada pembangunan industry-industri untuk pasar domestic. Industry-industri yang mendapatkan prioritas adalah industry-industri yang selain pada L juga mempunyai potensi X yang besar berdasarkan keunggulan komperatif dan mempunyai potensi X yang besar berdasarkan keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif yang ada.

Dalam kebijakan industry baru ini, perhatian besar juga diberikan kepada pengembangan industri-industri pendukung yang membuat mesin, peralatan produksi, input antara bahan baku yang diolah dan komponen. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketergantungan sector industry manufaktur pada khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya terhadap M. Untuk mendukung kebijakan ini, pemerintah telah menerapkan suatu strategi pengembangan industry nasional dengan pendekatan clustering. Setiap industry mempunyai keterkaitan produksi ke belakang maupun kedepan yang kuat dengan industry lain atau/dan sector-sektor ekonomi lainnya

# APBN DAN PERAN PEMERINTAH 9

## A. Konsep Teoritis APBN dan Pemerintah

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum APBN

Menurut UU No. 17 Tahun 2003 APBN adalah rencana keuangan pemerintah yang di setujui oleh para dewan perwakilan rakyat. Dasar hukum penyusunan APBN adalah :

- a. UUD 1945 pasal 23 ayat 1 yang menyatakan anggaran pendapatan dan belanja Negara di tetapkan setiap tahun.
- b. UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- c. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerirntah pusat dan daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945 telah diamandemenkan sebanyak 4 kali sejak tahun 1999 hingga 2002, sehingga pengaturan tentang keuangan negeri selalu didasarkan pada undang-undang ini, khususnya dalam Bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bunyi pasal 23 ayar (1) : Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat (2) : Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama

Dewan Perwakilan Rakyat dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah dan ayat (3) : “Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun lalu”.

## 2. Fungsi APBN

APBN merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan Negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan satbilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan Negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara tahun anggaran berikutnya.

- a. *Fungsi otorisasi*, mengandung arti bahwa anggaran Negara menjadi dasar untuk melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat di pertanggungjawabkan kepada rakyat.
- b. *Fungsi perencanaan*, mengandung arti bahwa anggaran Negara dapat menjadi pedoman bagi Negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Jika pembelanjaan telah direncanakan sebelumnya, maka Negara dapat membuat rencana untuk mendukung pembelanjaan tersebut.
- c. *Fungsi pengawasan*, yang berarti anggaran Negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah Negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, akan mudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah menggunakan uang Negara bagi keperluan tertentu dibenarkan atau tidak.
- d. *Fungsi alokasi*, yang berarti bahwa anggaran Negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan

sumberdaya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- e. *Fungsi distribusi*, yang berarti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f. *Fungsi stabilisasi*, yang memiliki makna bahwa anggaran pemerintah merupakan alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

### 3. Prinsip-prinsip APBN, Prinsip Penyusunan dan Azas APBN

Sejak Orde Baru mulai membangun, APBN kita disusun atas dasar tiga prinsip, yaitu prinsip berimbang (*balance budget*), prinsip dinamis dan prinsip fungsional. Berikut penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut :

- a. *Prinsip Anggaran Berimbang*, yang dimaksud anggaran berimbang adalah sisi penerimaan sama dengan sisi pengeluaran, dimana deficit anggaran ditutup bukan dengan mencetak uang baru melainkan dengan bantuan/pinjaman/utang luar negeri (*Official Development Assistance=ODA*), atau dalam APBN dikategorikan sebagai penerimaan pembangunan.
- b. *Prinsip Anggaran Dinamis*, ada dua pengertian mengenai prinsip anggaran dinamis, yaitu anggaran dinamis absolut dan relative. *Anggaran dinamis absolut* diartikan sebagai peningkatan jumlah tabungan pemerintah dari tahun ke tahun (peningkatan surplus anggaran rutin), sehingga kemampuan menggali sumber dalam negeri bagi pembiayaan pembangunan dapat tercapai. Indikator ini bisa diukur melalui laju pertumbuhan tabungan pemerintah yang selalu positif dalam perkembangannya. Sedangkan anggaran dinamis relative diartikan sebagai semakin kecilnya presentase ketergantungan pembiayaan pada bantuan luar negeri atau pinjaman luar negeri.
- c. *Prinsip Anggaran Fungsional*, bahwa fungsi dari bantuan luar negeri hanya untuk membiayai anggaran belanja pembangunan (pengeluaran pembangunan) dan bukan untuk membiayai anggaran rutin.

APBN disusun berdasarkan prinsip-prinsip (1) Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, (2) Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang Negara, dan (3) Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita Negara dan penuntutan denda. Sementara berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN adalah (1) Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, (2) Terarah, terkendali, dan sesuai dengan rencana program atau kegiatan, serta (3) Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

APBN disusun berdasarkan azas-azas (1) Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri, (2) Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas, (3) Penajaman prioritas pembangunan, serta (4) Menitikberatkan pada azas-azas dan undang-undang Negara.

#### 4. Asumsi Dasar Makro APBN

**Asumsi dasar makro** adalah indikator utama ekonomi makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun postur APBN. Asumsi dasar makro disusun dengan mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Selain itu, asumsi dasar makro APBN juga disusun dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi domestik maupun global agar asumsi yang digunakan dapat mempresentasikan kondisi perekonomian terkini.

Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh terhadap besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar makroekonomi terdiri atas 7 indikator utama yaitu (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Inflasi, (3) Nilai tukar rupiah terhadap dolar US, (4) Suku bunga SPN 3 bulan, (5) Harga minyak mentah Indonesia, (6) *Lifting* minyak Indonesia, dan (7) *Lifting* gas, Besaran angka setiap jenis pendapatan Negara, belanja Negara dan pembiayaan anggaran terhitung berdasarkan indikator asumsi dasar makroekonomi yang terkait serta aparameter pendukung lainnya.

Perumusan asumsi dasar ekonomi makro dalam rangka penyusunan RAPBN melibatkan berbagai pihak sebagai pemangku

kepentingan, naik dari sisi (1) Pemerintah maupun (2) Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Proses perumusan asumsi dasar ekonomi makro dilakukan melalui rapat koordinasi yang dilakukan secara intensif antara pihak pemerintah (Kementerian Keuangan, BAPPENAS, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pusat Statistik, dan Bank Indonesia).

## 5. Sumber Penerimaan Negara

Secara garis besar factor penentu besarnya penerimaan Negara adalah berikut :

### a. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah adalah semua penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan Negara non-pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri. Pengertian pendapatan hibah adalah setiap penerimaan pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali yang berasal dari dalam negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut pemerintah mendapat manfaat secara langsung untuk demi mendukung tugas dan fungsi Negara. Besaran pendapatan Negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

- Indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi.
- Kebijakan pendapatan Negara.
- Kebijakan pembangunan ekonomi.
- Perkembangan pemungutan.
- Kondisi kebijakan lainnya.

Sebagai contoh, target penerimaan Negara dari SDA migas dipengaruhi oleh besaran asumsi *lifting* minyak bumi, *lifting* gas, *Indonesia Crude Price* (ICP), dan asumsi nilai ukur. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak, dan lainnya.

Beberapa contoh hibah adalah (1) hibah uang: hibah uang tunai dan uang untuk membiayai kegiatan, serta (2) hibah barang atau jasa dan hibah surat berharga. Berdasarkan mekanisme pencairannya dibagi menjadi dua : hibah terencana dan hibah langsung. Sementara berdasarkan sumbernya dibagi menjadi hibah dalam negeri dan luar negeri.

## **b. Penerimaan Perpajakan**

Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

### **1. Pendapatan Pajak Dalam Negeri**

Pendapatan pajak dalam negeri dibagi menjadi lima, yaitu :

- Pendapatan pajak penghasilan (PPh), yang menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Jenis-jenis pajak penghasilan (PPh) dalam APBN : PPh Migas, yaitu PPh yang dipungut dari Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap atas penghasilan dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan gas alam. PPh Non-Migas, yaitu PPh yang dipungut dari wajib pajak orang pribadi, badan dan bentuk usaha tetap dalam negeri atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak selain penghasilan atas pelaksanaan hulu migas.
- Pendapatan pajak pertambahan nilai dan jasa serta pajak penjualan atas barang mewah, berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 Pasal 5 PPnBM, adalah pajaka yang dikenakan terhadap penyerahan BKP tergolong mewah yang dilakukakn oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut didaerah pabean dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya, dan impor BKP yang tergolong mewah.
- Pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah atau bangunan. PBB terbagi kedalam beberapa sector, yaitu Sektor Perkantoran, Sektor Pedesaan, Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, serta Sektor Perkembangan Migas dan Pertambangan Umum.
- Pendapatan cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat atau karakteristik Barang Kena Cukai (BKC). Walaupun cukai dikategorikan sebagai pajak tidak langsung, tetapi dalam prakteknya produsen ikut menanggung beban cukai sehingga konsumen membayar cukai dalam jumlah yang tidak seharusnya.
- Pendapatan pajak lainnya merupakan jenis penerimaan perpajakan yang tidak termasuk dalam kategori penerimaan pajak. Penerimaan pajak lainnya terdiri dari (a) Bea Materai, (b) Pendapatan Penjualan Benda Materai, (c) Bunga Penagihan PPN, (f) Bunga Penagihan PPnBM, dan (g) Bunga Penagihan Pajak. Penerimaan bea materai merupakan penerimaan yang dominan dalam pajak lainnya. Bea materai sendiri pada dasarnya adalah pajak atas dokumen sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai.
- Pendapatan bea masuk adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. (Pasal 1 Ayat 15 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan). Pada dasarnya, bea masuk berfungsi untuk (a) Mencegah kerugian industry dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dengan barang impor tersebut, (b) Melindungi pengembangan industry barang sejenis dengan barang impor dalam negeri, (c) Mencegah terjadinya kerugian serius terhadap industri dalam negeri yang memproduksi barang sejenis dan/atau barang yang secara langsung bersaing, (d) Melakukan pembalasan terhadap barang impor yang berasal dari Negara yang memperlakukan barang ekspor Indonesia secara diskriminatif.

- Pendapatan bea keluar menyangkut kepabeanan terhadap barang ekspor yang dikenakan kepada Negara. Tujuan bea keluar terhadap barang ekspor adalah:
  - (a) Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri, (b) Melindungi kelestarian sumber daya alam, (c) Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dan komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional, dan (d) Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri. Sedangkan barang ekspor yang dikenakan bea keluar adalah rotan, kulit, kayu, kelapa sawit, serta CPO dan produk turunannya.

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, di luar penerimaan perpajakan. PNBP telah mengalami beberapa kali perubahan klasifikasi sejalan dengan jumlah kontribusinya dalam pendapatan Negara. PNBP terdiri dari :

- Penerimaan Sumber Daya Alam
  - Penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas). Penerimaan SDA migas merupakan bagian pemerintah atas kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan berdasarkan Kontrak Production Sharing (KPS), setelah dikurangi faktor pengurang berupa pajak-pajak dan pungutan lainnya.
  - Penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas).
  - Penerimaan SDA nonmigas merupakan penerimaan yang berasal dari hasil pemanfaatan sumber daya alam di luar minyak dan gas bumi. Sumber penerimaan SDA nonmigas meliputi: Pendapatan pertambangan umum, Pendapatan kehutanan, Pendapatan perikanan dan Pendapatan pertambangan panas bumi.
- Pendapatan Bagian Laba BUMN  
Pendapatan laba BUMN perbankan dan pendapatan laba BUMN non- perbankan.

- **Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**  
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya terdiri dari pendapatan bunga dan pendapatan pendidikan.  
**Pendapatan bunga** adalah semua pendapatan Negara yang berasal dari bunga atas piutang pemerintah dan penerusan pinjaman, Pendapatan kejaksaan dan peradilan serta hasil tindak pidana korupsi semuanya adalah pendapatan pemerintah yang berasal dari kasus-kasus pengadilan yang ditangani pemerintah, seperti legalisasi penandatanganan, denda/tilang, pengesahan surat di bawah tangan, ongkos perkara, penjualan hasil lelang, tindak pidana korupsi, dan lain-lain.  
**Pendapatan pendidikan** adalah semua pendapatan Negara yang berasal dari jasa penyelenggaraan pendidikan, yaitu pendapatan uang pendidikan, uang ujian masuk, kenaikan tingkat, akhir pendidikan, serta pendapatan uang ujian untuk menjalankan praktik. Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi adalah semua pendapatan Negara yang berasal dari hasil korupsi yang telah ditetapkan menjadi milik Negara, baik ditetapkan oleh pengadilan maupun KPK. Pendapatan iuran dan denda adalah pendapatan Negara yang berasal dari iuran badan usaha yang bergerak dibidang penyediaan dan pendistribusian BBM, serta pengangkutan gas bumi melalui pipa.
- **Pendapatan Badan Layanan Umum**  
Pendapatan atau penerimaan BLU adalah penerimaan yang berasal dan kegiatan pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang di jual tanpa mencari keuntungan dan, dalam melakukan kegiatannya, didasarkan pada prinsip efisiensi serta produktivitas. Jenis pendapatan BLU antara lain : pendapatan jasa layanan umum, pendapatan hibah badan layanan umum, pendapatan hasil kerja sama BLU, dan pendapatan BLU lainnya.

## 6. Belanja Negara

*Belanja negara* adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja negara ini terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kebutuhan penyelenggaraan negara, kebijakan pembangunan, serta kondisi dan kebijakan lainnya. Sebagai contoh besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP serta nilai tukar untuk menentukan target volume BBM bersubsidi.

### a. Belanja Pemerintah Pusat

Pengeluaran atau belanja negara adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja untuk daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah :

- 1) Belanja pegawai adalah kompensasi baik dalam bentuk uang atau barang yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah baik di dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah di laksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Pengeluaran rutin belanja pegawai meliputi : gaji dan pension, tunjangan beras, uang makan dan lauk pauk, lain-lain belanja pegawai dalam negeri dan belanja pegawai luar negeri.
  - Belanja barang : belanja barang dalam negeri dan luar negeri
  - Subsidi dan cicilan utang: utang dalam negeri dan luar negeri
  - Pengeluaran rutin lainnya: subsidi bahan bakar minyak dan lain-lain
- 2) Belanja barang dalam negeri dan luar negeri adalah pembelian barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, termasuk biaya pemeliharaan serta biaya perjalanan
- 3) Belanja modal adalah pengeluaran/belanja yang dikeluarkan dalam rangka pembentukan modal, yang terdiri dari tanah, peralatan, dan mesin, Gedung dan bangunan, jaringan, belanja modal lainnya, dan belanja modal non fisik.
- 4) Pembayaran bunga utang adalah pembayaran atas biaya pinjaman yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman

- 5) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan atau Lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa.
- 6) Belanja hibah adalah transfer rutin/modal yang sifatnya tidak wajib dari pemerintah pusat kepada negara lain dan kepada organisasi internasional
- 7) Bantuan sosial adalah transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko social

**b. Transfer ke Daerah**

Adalah bagian dari belanja negara dalam rangka membiayai pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian. rincian anggaran transfer ke daerah adalah :

- 1) *Dana Perimbangan* yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas : *Dana bagi hasil*, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah berdasarkan persentase tertentu demi mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. *Dana Alokasi Umum*, yang selanjutnya disebut DAU yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah demi mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- 2) *Dana Otonomi Khusus*, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Dana ini dibatasi hanya 20 tahun yang saat ini untuk Provinsi Papua dan Nanggroe Aceh Darussalam.
- 3) *Dana Penyesuaian*, yaitu dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah.

### c. Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Besaran pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa beberapa faktor antara lain asumsi dasar makroekonomi, kebijakan pembiayaan serta kondisi dan kebijakan lainnya.

- 1) *Pembiayaan Dalam Negeri* yang meliputi : pembiayaan perbankan dalam negeri yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), penerimaan cicilan rekening pembangunan hutan, dan rekening pemerintah lainnya. Sedangkan pembiayaan nonperbankan dalam negeri bersumber dari privatisasi, Hasil Pengelolaan Aset (HPA), penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), penarikan pinjaman dalam negeri dana investasi pemerintah dan Penyertaan Modal Negara (PMN), serta dana pengembangan Pendidikan nasional, dan Pembiayaan nonperbankan dalam negeri : hasil pengelolaan asset, Surat berharga negara neto: Pinjaman dalam negeri neto: Dana investasi pemerintah dan Kewajiban penjaminan.
- 2) *Pembiayaan Luar Negeri* yang meliputi : Penarikan Pinjaman Luar Negeri yang terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek dan Penerusan pinjaman, serta Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri yang terdiri atas jatuh Tempo dan Moratorium.

### 7. Siklus APBN

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah serangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai ketika anggaran negara mulai disusun hingga perhitungan anggaran disahkan dengan Undang-Undang, Ada 5 tahapan pokok dalam satu siklus APBN di Indonesia. Dari kelima tahapan itu, tahapan ke-2 dan ke-5 dilaksanakan bukan oleh pemerintah, dimana tahap kedua yaitu penetapan/persetujuan APBN dilaksanakan oleh DPR (Lembaga Legislatif) sementara tahap kelima yaitu pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Semua tahapan lainnya dilaksanakan oleh pemerintah.

Tahapan kegiatan dalam siklus APBN adalah sebagai berikut :

**a. Perencanaan dan Penganggaran APBN**

Tahapan yang dilakukan pada tahun sebelumnya anggaran dilaksanakan (APBN t-1) Seperti untuk APBN tahun 2014 dilakukan pada tahun 2013 yang meliputi dua kegiatan yaitu perencanaan dan penganggaran.

Tahap perencanaan dimulai dari :

- Menerapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional
- Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melakukan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan, menyusun rencana inisiatif baru, dan mengidentifikasi kebutuhan anggaran
- Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan serta mngkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan dan analisis pemenuhan kelayakan serta efisiensi indikasi.

Tahap penganggaran dimulai dari :

- Penyusunan kapasitas fiskal yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif
- Penetapan pagi indikatif
- Penetapan pagu anggaran K/L
- Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L)
- Penelaahan RKA-K/L sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undnag-undang tentang APBN
- Penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.

**b. Penetapan Persetujuan APBN**

Kegiatan penetapan/ persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, yaitu sekitar bulan Oktober- Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa pembahasan Rancangan APBN Dan Rancangan Undang-Undang APBN serta penetapannya oleh DPR. Selanjutnya,

berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan penetapan Koppres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN dimaksud.

**c. Pelaksanaan APBN**

Jika tahapan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, Kegiatan pelaksanaan APBN dimjulai pada 1 Januari – 31 Desember tahun berjalan (APBN t). dengan kata lain, tahun anggaran 2014 akan dilaksanakan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementrian/Lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian pelaksanaan anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan menyampaikan ke Kementerian Keuangan untuk disahkan.

DIPA adalah alat untuk melaksanakan APBN dan berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pembantu Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi instansinya.

**d. Pelaporan dan Pencatatan APBN**

Tahap Pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan dengan tahap pelaksanaan APBN yaitu 1 Januari -31 Desember. Laporan Keuangan pemerintah dibuat melalui proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas serta catatan atas Laporan Keuangan.

**e. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN**

Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan berakhir (APBN t-1), Yaitu sekitar bulan Januari – Juli. Sebagai contoh, jika APBN dilaksanakan tahun 2013, tahap pemeriksaan dan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun 2014. Pemeriksaan ini dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, presiden menyampaikan

rancangan UU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **B. Potret Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia**

1. Potret Data Penerimaan dan Pengeluaran APBN Indonesia Tahun 1998-2014 Potret perekonomian Indonesia ditinjau dari penerimaan dan pengeluaran APBN Pemerintah pascaorde reformasi dengan menggunakan analisis growth and share dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini :

**TABEL 6.1** Data Penerimaan dan Pengeluaran APBN Indonesia Tahun 1998-2014

Tahun	Penerimaan (Miliar Rupiah)	Pengeluaran (Miliar Rupiah)	Defisit/Surplus (Miliar Rupiah)
<b>1998</b>	156.470	172.670	-16.200
<b>1999</b>	42.582	44.581	-1.999
<b>2000</b>	205.335	221.467	-16.132
<b>2001</b>	301.078	341.563	-40.485
<b>2002</b>	298.528	322.180	-23.652
<b>2003</b>	341.396	376.505	-35.109
<b>2004</b>	403.367	427.177	-23.810
<b>2005</b>	495	509.632	-14.408
<b>2006</b>	637.987	667.129	-29.142
<b>2007</b>	707.806	757.650	-49.844
<b>2008</b>	981.609	985.731	-4.122
<b>2009</b>	848.763	937.382	-88.619
<b>2010</b>	995.272	1.042.117	-46.845
<b>2011</b>	1.210.600	1.294.999	-84.399
<b>2012</b>	1.358.205	1.548.310	-190.105
<b>2013</b>	1.529.673.400	1.683.011	-153.337,9
<b>2014</b>	1.635.400	1.876.900	-214.500
<i>Jumlah</i>	12.149.295,1	13.209.004	-906.371
<i>Rata-Rata</i>	7.146.644,2	777.000,2	-53.315,9

## Porsi Penerimaan

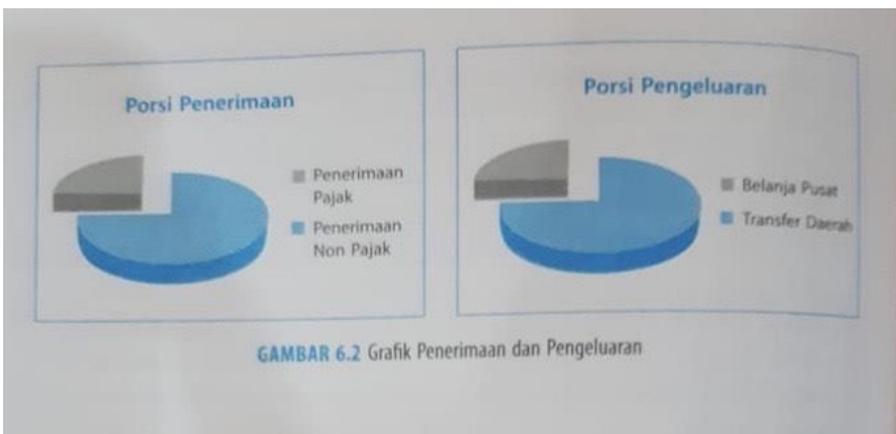
### Penerimaan Pajak



## Porsi Pengeluaran

Belanja Pusat 72%

Transfer Daerah 28%



Berdasarkan Tabel 6.1 dan Gambar 6.2, terjadi penurunan yang sangat drastis pada APBN tahun 1998-1999 akibat melanda krisis ekonomi di Indonesia yang mengakibatkan perekonomian turun drastis dan diperparah dengan kondisi negara yang sedang tidak stabil, sehingga dapat dikatakan bahwa pada tahun tersebut perekonomian Indonesia sangatlah buruk dalam sejarah.

Namun, krisis ini masih berlanjut meskipun pemerintah terus berupaya memperbaiki pasca krisis moneter pada tahun 2000-2008 karena terjadinya krisis global.

Sementara pada tahun 2009 terjadi penurunan penerimaan dari sektor pajak dan pada tahun ini juga perekonomian Indonesia bisa disebut mulai pulih pasca krisis global dan posisinya mulai membaik. Dari tahun 2010 terjadi perbaikan yang menuai tren positif bagi perekonomian Indonesia hingga tahun 2013. Pada tahun 2014, perekonomian cukup stabil namun APBN selalu mengalami deficit yang menyebabkan Indonesia harus berutang banyak ke Lembaga Keuangan Dunia yang membuat utang-utang tersebut semakin membengkak.

Melonjaknya beban utang ini hamper seluruhnya disebabkan oleh timbulnya utang dalam negeri yang sangat besar akibatnya upaya menyelamatkan sector perbankan yang berantakan dilanda krisis. Akibat utang dalam negeri ini dibuatlah 3 kebijakan untuk menopang perbankan nasional selama krisis, yaitu :

### **1) Kebijakan BLBI**

Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi situasi darurat berupa kelangkaan likuiditas yang akut akibat arus dana keluar yang tidak terbendung dan semakin memberati system perekonomian Indonesia. Satu-satunya sumber likuiditas yang ada dalam keadaan seperti ini adalah Bank Indonesia sebagai *Lender of last resort*, yaitu fungsi yang lazimnya ada pada setiap bank sentral untuk menghadapi keadaan darurat. Dukungan likuiditas dalam keadaan ini dikenal sebagai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

### **2) Kebijakan Penjaminan Bank**

Kebijakan utama kedua yang mulai dilaksanakan sekitar Maret 1998 adalah kebijakan penjaminan Bank. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengatasi situasi perbankan yang sudah benar-benar kehilangan kepercayaan dari pada nasabahnya. Menghadapi keadaan ini, pemerintah pada waktu itu berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan untuk menghentikan keruntuhan sektor perbankan adalah memberikan jaminan penuh kepada nasabah dan mereka

yang bertransaksi dengan bank. Pemerintah menjamin uang mereka yang ada di bank, apapun yang mungkin terjadi dengan bank itu.

### **3) Kebijakan Rekapitalisasi**

Kebijakan ini dilakukan agar bank-bank yang tersisa setelah gelombang proses penutupan pada 1998-1999 dapat beroperasi secara normal. Banyak dari bank-bank yang dapat bertahan hidup setelah terlanda badai krisis masih setengah sakit dan belum beroperasi sebagai layaknya bank yang sehat. Hal lain yang telah dilakukan adalah konsolidasi fiskal untuk memulihkan kepercayaan, menurunkan risiko kebangkrutan fiskal, reformasi fiskal yang lebih mengakar, reformasi perpajakan, reformasi APBN, reformasi anggaran, dan reorganisasi departemen keuangan.

### **C. Konsep Neraca Pembayaran Indonesia**

Neraca Pembayaran merupakan ikhtisar transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca Pembayaran menurut Tambunan (2000:184), adalah catatan sistematis atas semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam suatu negara serta penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu, lazimnya satu tahun, yang dinyatakan dalam dolar AS. Menurut Sukirno (2011: 390), neraca pembayaran adalah catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal serta keuangan, dan item-item keuangan. Neraca pembayaran penting karena menyangkut dua aliran sumber daya keuangan, yaitu :

1. Arus dana investasi asing dan sumber dana lainnya. Arus ini masuk melalui sarana modern perusahaan multinasional (*Multinational Corporation* = MNC)
2. Arus sumber daya pemerintah berupa bantuan luar negeri, baik secara bilateral maupun multilateral

Apabila jumlah penerimaan lebih besar dari jumlah pembayaran atas utang (transaksi kredit > transaksi debit), berarti neraca pembayaran mengalami surplus atau favorable. Sebaliknya, maka disebut deficit. Secara umum, dikenal empat konsep keseimbangan Neraca Pembayaran, yaitu:

1. Konsep Keseimbangan Perdagangan (Trade Balance) Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau deficit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan Neraca Pembayaran diukur dari besarnya surplus atau deficit kedua transaksi tersebut. Apabila ekspor lebih besar daripada impor maka Neraca pembayaran negara bersangkutan mengalami surplus, demikian sebaliknya

2. Konsep Keseimbangan Transaksi berjalan (Current Account Balance)

Untuk menentukan surplus atau deficit pada autonomous transaction selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan dan transfer. Surplus terjadi apabila ekspor barang, jasa, penghasilan dan transfer. Demikian pula sebaliknya

3. Konsep Basic Balance

Dalam konsep ini, yang termasuk dalam autonomous transaction selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka Panjang

4. Konsep Overall Balance

Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen dalam transaksi berjalan, komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka Panjang maupun jangka pendek

#### **D. Transaksi Jasa**

Transaksi ini dikenal sebagai perdagangan tak nyata. yang termasuk dalam golongan ini adalah transaksi-transaksi dalam kegiatan pengangkutan kegiatan perjalanan luar negeri pendapatan dan investasi modal dan beberapa kegiatan jasa lainnya. nilai neraca suatu negara akan positif bila neraca tersebut lebih banyak menjual

jasa jasanya ke luar negeri dan membelinya dari negara-negara lain nilainya akan negatif bila negara itu lebih banyak memberi jasa pihak luar dan menjual jasanya ke luar negeri.

### **1. Pembayaran Pindahan atau transfer Unilateral**

Transaksi ini meliputi pembayaran di mana menerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa

### **2. Lalu lintas modal**

Neraca lalu lintas modal atau capital account mencatat dua golongan transaksi yaitu aliran modal pemerintah dan aliran modal swasta.

**a. Aliran modal pemerintah.** ini Biasanya berupa pinjaman dan bantuan dari negara- negara asing yang diberikan kepada pemerintah atau badan-badan pemerintah contohnya adalah pinjaman untuk membangun irigasi.

**b. Aliran modal swasta.** aliran ini dibedakan menjadi tiga jenis yaitu investasi langsung investasi portofolio dan amortisasi investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan perusahaan investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk saham saham yang dibeli di negara lain amortisasi adalah pembelian kembali saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara lain

### **3. Neraca keseluruhan**

Neraca keseluruhan menggambarkan jumlah aliran netto yang dicatat di ketiga kelompok transaksi yaitu kelompok transaksi berjalan transaksi modal dan selisih perhitungan

## **E. Mekanisme dan ikhtisar neraca pembayaran Indonesia**

Ada 3 jenis mekanisme yang berpengaruh terhadap neraca pembayaran suatu negara seperti perubahan ekonomi atau kebijakan yaitu mekanisme harga mekanisme pendapatan dan mekanisme moneter ketiganya saling berkaitan dan saling berjalan berdampingan

### **1. Mekanisme harga**

Mekanisme harga bekerja melalui pengaruh perubahan harga harga terhadap ekspor dan impor mekanisme harga dalam sistem standar emas penuh adalah contoh terbaik untuk menggambarkan

bekerjanya mekanisme harga bilasurplus neraca pembayaran stok uang dalam negeri akan meningkat harga dalam negeri naik dan penduduk negara tersebut akan meningkatkan impornya serta menurunkan ekspornya selama surplus belum hilang impor akan terus meningkat dan ekspor menurun dan akhirnya neraca pembayaran akan kembali seimbang Dalam sistem moneter yang lain mekanisme harga juga masih bekerja meskipun tidak sempurna dalam sistem standar emas penuh elastisitas harga dari penawaran ekspor dan permintaan impor sangat menentukan an- nas mekanisme harga dalam membawa kembali neraca pembayaran ke arah keseimbangan karena adanya berbagai faktor penghambat sekarang para ekonom beranggapan bahwa mekanisme harga saja tidak bisa diandalkan untuk mengatasi ketimpangan neraca pembayaran yang besar

## **2. Mekanisme pendapatan**

Mekanisme pendapatan bekerja melalui proses pengganda kenaikan ekspor melalui proses pengganda akan menimbulkan kenaikan pendapatan nasional selanjutnya kenaikan pendapatan nasional akan meningkatkan impor melalui kecenderungan mengimpor namun kenaikan impor ini tidak akan sebesar kenaikan ekspor yang mengakitkannya ini berarti bahwa mekanisme pendapatan saja tidak bisa membawa neraca pembayaran ke posisi keseimbangan kembali secara penuh.

## **3. Mekanisme moneter**

Mekanisme moneter bekerja melalui stop uang di dalam negeri sebagai akibat dari perubahan keadaan atau kebijakan ekspor naik dan terjadi surplus neraca pembayaran stok uang dalam negeri akan meningkat suku bunga akan menurun pengeluaran investasi akan meningkat pendapatan nasional akan meningkat dan akhirnya impor meningkat ini adalah mekanisme moneter menurut keyness mekanisme moneter menurut golongan monetaris memberi tekanan pada apa yang terjadi dengan stok uang real Villarreal bales meningkat pengeluaran akan meningkat dan impor juga meningkat bila kenaikan uang di bank dengan kenaikan harga real balance bisa

naik atau turun sehingga impor pun akan tetap atau turun mekanisme moneter tidak bisa membawa neraca pembayaran ke posisi keseimbangan penuh. Transaksi ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

**a. Transaksi debet**

Transaksi debet adalah transaksi yang dapat menimbulkan peningkatan kewajiban negara dalam melakukan pembayaran kepada negara lain

**b. Transaksi kredit**

Transaksi kredit adalah transaksi yang dapat mengakibatkan bertambahnya hak suatu negara untuk menerima pembayaran dari negara lain.

Untuk lebih jelasnya perhatikan like.son neraca pembayaran dalam tabel 7.5 berikut ini

<b>Debet (Mengalirnya Uang Negeri)</b>	<b>Kredit (Mengalirnya Uang negeri)</b>
1. Neraca Barang (Current Impor Barang	1. Neraca Barang (Current account) Ekspor Barang
2. Neraca Jasa (Errors dan Omissions) a. Bunga Dan Dividen dibayar kepada luar negeri b. Biaya Pariwisata Diluar negeri c. Biaya Transportasi Yang Dilakukan Oleh Luar Negeri. d. Pembayaran Untuk Jasa-jasa yang dilakukan oleh	2. Neraca Jasa (Errors and omissions) a. bunga dan dividen dari Luar negeri. b. Biaya Pariwisata orang asing didalam negeri c. Biaya transportasi dari luar negeri d. pembayaran untuk jasa-jasa yang dilakukan oleh telekomunikasi dari luar negeri.
asuransi.telekomunikasi keluar negeri. e. pemberian Hadiah Dan pengiriman Uang kepada penduduk negara Lain	e. penerimaan hadiah dan kiriman uang dari penduduk negara lain

<p>3. Neraca Modal (Capital Account) a.investasi jangka Panjang yang dilakukan penduduk dinegara lain</p> <p>b. investasi jangka pendek yang dilakukan penduduk dinegra lain.</p> <p>c. penduduk yang menabung-kan uangnya di bank luar negeri.</p> <p>d. Pelunasan Utang</p>	<p>3. Neraca Modal (Capital Account)</p> <p>a. Investasi Jangka Panjang Yang dilakukan Oleh penduduk Negara Lain di dalam Negeri.</p> <p>b. investasi Jangka Pendek yang dilakukan oleh penduduk negara lain didalam negeri.</p> <p>c. penduduk negara lain yang menabungkan Uangnya di bank dalam negeri.</p> <p>d. pengambilan Utang</p>
---	--

# NERACA PEMBAYARAN INDONESIA 10

## A. Pengertian Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk Negara itu dengan penduduk Negara lain (Nopirin, 1996). Menurut Balance of Payment Manual (BPM) yang diterbitkan IMF (1993) definisi neraca pembayaran internasional (Balance of Payment) adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan barang jasa, transfer keuangan dan moneter antarpenduduk (resident) suatu Negara dan penduduk luar negeri (rest of the world) untuk suatu periode tertentu, biasanya satu tahun.

Dari definisi di atas, dapat dilemukakan bahwa BOP merupakan suatu catatan sistematis yang disusun berdasarkan suatu sistem akuntansi yang dikenal sebagai double-entry book-keeping sehingga setiap transaksi internasional yang terjadi akan tercatat dua kali, yaitu sebagai transaksi kredit dan debit.

## B. Tujuan Penyusunan Neraca Pembayaran

- a) Mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu Negara.

Peranan sektor eksternal tercermin antara lain dari besarnya jumlah permintaan produk domestik oleh bukan penduduk, atau sebaliknya. Semakin besar permintaan terhadap produk domestik oleh bukan penduduk, yang tercermin dari nilai

- ekspor Negara bersangkutan, semakin besar pula peranan sektor eksternal dalam pembentukan produk domestik.
- b) Mengetahui Sumber daya antar Negara.  
Berdasarkan Neraca Pembayaran dapat diketahui seberapa besar aliran sumber daya antara suatu Negara dengan Negara-negara lainnya sehingga terlihat apakah Negara tersebut merupakan pengekspor barang dan atau modal, atau sebaliknya sebagai pengimpor barang atau modal.
  - c) Mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu Negara.  
Dengan mengamati perkembangan Neraca Pembayaran, dapat diketahui pola umum kegiatan perekonomian suatu Negara dalam berinteraksi dengan Negara lain, seperti ketergantungan sumber pendapatan nasional dari hasil ekspor produk pertanian dan ketergantungan sumber pembiayaan investasi dari Negara lain.
  - d) Mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu Negara.  
Berdasarkan catatan transaksi modal dan keuangan di Neraca Pembayaran, dapat diketahui seberapa jauh suatu Negara dapat memenuhi kewajibannya terhadap Negara lain.
  - e) Mengetahui perubahan devisa cadangan suatu Negara.  
Bertambah atau berkurangnya posisi cadangan devisa terkait dengan surplus atau defisit Neraca Pembayaran. Apabila terjadi surplus Neraca Pembayaran maka posisi cadangan devisa akan bertambah sebesar surplus tersebut. Dan sebaliknya.
  - f) Dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa (foreign exchange budget).  
Dengan memperhatikan surplus atau defisit Neraca Pembayaran pada tahun tertentu, dapat diperlukan besarnya kebutuhan devisa untuk anggaran tahun berikutnya, sekaligus dapat ditentukan besarnya pinjaman yang diperlukan.
  - g) Dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional (national account).  
Statistik Neraca Pembayaran diperlukan dalam perhitungan pendapatan nasional mengingat salah satu variabel pendapatan nasional adalah nilai ekspor-impor barang dan jasa yang tercatat dalam Neraca Pembayaran.

### C. Komponen-komponen Neraca Pembayaran

Neraca pembayaran pada dasarnya terdiri atas lima neraca bagian yang saling berhubungan, kelima neraca itu adalah sebagai berikut.

- **Neraca Perdagangan (Balance of Trade)**

Neraca perdagangan ialah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara dalam dalam jangka waktu 1 tahun. Jika nilai ekspor lebih besar dari impor maka negara mengalami surplus dalam neraca perdagangan. Tetapi bila nilai ekspor lebih kecil daripada impor maka negara mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan surplus disebut juga neraca perdagangan aktif. Sedangkan neraca perdagangan defisit disebut juga neraca perdagangan pasif.

- **Neraca Jasa**

Neraca jasa ialah neraca yang mencatat transaksi jasa yang diselenggarakan dan diterima suatu negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Misalnya jasa pengangkutan, asuransi, pariwisata, jasa perdagangan, dan jasa perbankan.

- **Neraca Hasil Modal**

Neraca hasil modal ialah sebuah neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan bunga, deviden, upah tenaga asing, serta hadiah-hadiah dari luar negeri.

- **Neraca Lalu Lintas Modal (Capital Account)**

Neraca lalu lintas modal ialah sebuah neraca yang mencatat segala kredit atau pinjaman dari luar negeri dan segala kredit/pinjaman yang diberikan kepada negara lain. Dalam neraca ini juga dicatat jual beli efek, penanaman modal asing, bantuan luar negeri, serta pembayaran utang luar negeri.

- **Neraca Lalu Lintas Moneter (Monetary Account)**

Neraca lalu lintas moneter ialah sebuah neraca yang mencatat dan memperlihatkan perkembangan/perubahan cadangan devisa suatu negara. Cadangan tersebut terdiri dari emas dan devisa.

#### **D. Fungsi Neraca Pembayaran**

Neraca pembayaran sangat penting dan perlu dibuat oleh suatu negara. Fungsi neraca pembayaran yaitu sebagai berikut :

- Sebagai alat pembukuan supaya pemerintah bisa mengambil keputusan yang tepat, mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara serta untuk mendapatkan sebuah keterangan-keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negerinya.
- Sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan.
- Berfungsi untuk mendapatkan informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri.
- Berfungsi untuk membandingkan pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu.
- Berfungsi untuk alat kebijakan moneter yang akan dilaksanakan oleh suatu negara.

#### **E. Konsep Neraca Pembayaran Indonesia**

Neraca Pembayaran merupakan ikhtisar transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Neraca Pembayaran menurut Tambunan (2000:184), adalah catatan sistematis atas semua transaksi ekonomi internasional (perdagangan, investasi, pinjaman, dan sebagainya) yang terjadi antara penduduk dalam suatu negara serta penduduk luar negeri selama jangka waktu tertentu, lazimnya satu tahun, yang dinyatakan dalam dolar AS. Menurut Sukirno (2011: 390), neraca pembayaran adalah catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan antara satu negara dengan negara lain dalam suatu tahun tertentu. Umumnya neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan dan neraca lalu lintas modal serta keuangan, dan item-item keuangan.

Neraca pembayaran penting karena menyangkut dua aliran sumber daya keuangan, yaitu :

- 1 Arus dana investasi asing dan sumber dana lainnya. Arus ini masuk melalui sarana modern perusahaan multinasional (*Multinational Corporation* = MNC)
- 2 Arus sumber daya pemerintah berupa bantuan luar negeri, baik secara bilateral maupun multilateral

Apabila jumlah penerimaan lebih besar dari jumlah pembayaran atas utang (transaksi kredit > transaksi debet), berarti neraca pembayaran mengalami surplus atau favorable. Sebaliknya, maka disebut deficit. Secara umum, dikenal empat konsep keseimbangan Neraca Pembayaran, yaitu:

- Konsep Keseimbangan Perdagangan (Trade Balance) Dalam konsep ini, transaksi yang termasuk dalam autonomous transaction atau transaksi yang mengakibatkan surplus atau deficit hanya transaksi ekspor dan impor barang, sehingga keseimbangan Neraca Pembayaran diukur dari besarnya surplus atau deficit kedua transaksi tersebut. Apabila ekspor lebih besar daripada impor maka Neraca pembayaran negara bersangkutan mengalami surplus, demikian sebaliknya
- Konsep Keseimbangan Transaksi berjalan (Current Account Balance)  
Untuk menentukan surplus atau defisit pada autonomous transaction selain diperhitungkan ekspor dan impor, juga diperhitungkan jasa-jasa termasuk penghasilan dan transfer. Surplus terjadi apabila ekspor barang, jasa, penghasilan dan transfer. Demikian pula sebaliknya.
- Konsep Basic Balance  
Dalam konsep ini, yang termasuk dalam autonomous transaction selain pos-pos dalam transaksi berjalan, juga komponen-komponen dalam transaksi modal dan keuangan jangka Panjang
- Konsep Overall Balance  
Yang termasuk autonomous transaction dalam konsep ini adalah komponen-komponen dalam transaksi berjalan, komponen-komponen transaksi modal dan keuangan baik jangka Panjang maupun jangka pendek

## 1. Transaksi Jasa

Transaksi ini dikenal sebagai perdagangan tak nyata. yang termasuk dalam golongan ini adalah transaksi-transaksi dalam kegiatan pengangkutan kegiatan perjalanan luar negeri pendapatan dan investasi modal dan beberapa kegiatan jasa lainnya. nilai neraca suatu negarakan positif bila neraca tersebut lebih banyak menjual jasa jasanya ke luar negeri dan membelinya dari negara-negara lain nilainya akan negatif bila negara itu lebih banyak memberi jasa pihak pihak luar dan menjual jasanya ke luar negeri.

## 2. Pembayaran Pindahan atau transfer Unilateral

Transaksi ini meliputi pembayaran di mana menerimanya tidak perlu membayar dalam bentuk uang atau jasa

## F. Lalu lintas modal

Neraca lalu lintas modal atau capital account mencatat dua golongan transaksi yaitu aliran modal pemerintah dan aliran modal swasta.

- a. **Aliran modal pemerintah.** ini Biasanya berupa pinjaman dan bantuan dari negara- negara asing yang diberikan kepada pemerintah atau badan-badan pemerintah contohnya adalah pinjaman untuk membangun irigasi.
- b. **Aliran modal swasta.** aliran ini dibedakan menjadi tiga jenis yaitu investasi langsung investasi portofolio dan amortisasi investasi langsung adalah investasi untuk mengembangkan perusahaan investasi portofolio adalah investasi dalam bentuk saham saham yang dibeli di negara lain amortisasi adalah pembelian kembali saham atau kekayaan lain yang pada masa lalu telah dijual kepada penduduk negara lain

## 1. Neraca Perdagangan Barang

Potret perekonomian indonesia pasca order reformasi berdasarkan neraca perdagangan barang ditinjau dari growth and share-nya dapat dilihat pada tabel 7.6 berikut ini:

**TABEL 7.6** Analisis kuadran Neraca Perdagangan Barang

<b>Tahun</b>	<b>Barang (jutaan USD)</b>	<b>Growth (%)</b>	<b>Share (%)</b>	<b>Kuadran</b>
1998	18.300	-	6,02	II
1999	206	-98,87	0,07	III
2000	25	-87,86	0,01	III
2001	22.695	90.680	7,47	I
2002	23.513	3,60	7,74	II
2003	24.562	4,46	8,08	II
2004	20.152	-17,95	6,63	II
2005	17.534	-12,99	5,77	II
2006	2.966	-83,084	0,98	III
2007	33.083	1.015,407	10,89	II
2008	22.916	-30,73	7,54	II
2009	30.932	34,98	10,18	II
2010	30.627	-0,99	10,08	II
2011	34.783	13,57	11,45	II
2012	8.680	-75,05	2,86	III
2013	5.833	-32,80	1,92	III
2014	6.982	19,69	2,30	III
<b>Jumlah</b>	303.789	915.820.641,7	100	
<b>Rata-Rata</b>	17.869,94	53.871.802,45	5,88	

Berdasarkan Gambar 7.2 tampak bahwa kondisi neraca perdagangan barang yang paling tinggi growth and share -nya adalah pada tahun 2001, yang berada di kuadran 1. Kondisi ini dipengaruhi oleh kondisi eksternal ekonomi global yang sangat mempengaruhi kinerja ekspor indonesia. Walaupun mengalami penurunan kinerja ekspor indonesia, terutama komoditas industri, relatif lebih baik dibandingkan dengan negara asian lainnya seperti taiwan, singapura, malaysia dan korea selatan. struktur ekspor nonmigas, sebagaimana tahun sebelumnya, masih didominasi oleh sektor industri yang mencapai 80% dari total ekspor nonmiga, kemudiana diikuti oleh sektor pertambangan dan sektor pertanian.

Sementara itu berkaitan dengan meningkatnya permintaan dari negara-negara ASEAN, nilai ekspor semen mengalami peningkatan, nilai ekspor komoditas batubara mengalami peningkatan, sementara nilai impor total menurun akibat turunnya impor nonmigas. Penurunan impor nonmigas terjadi pada barang modal dan bahan baku penolong.

## 2. Cadangan Devisa

Sedangkan, kondisi cadangan devisa yang paling rendah growth dan share-nya adalah pada tahun 2013, yang berada di kuadran III.

**TABEL 7.13** Analisis kuadran cadangan devisa

Tahun	I	Cadangan Devisa (Y)	t2	Yt
1998	-15.00	14.100	225.00	-211.500
1999	-13.00	16.400	169.00	-213.200
2000	-11.00	17.800	121.00	-195.800
2001	-9.00	1.378	81.00	-12.402
2002	-7.00	-4.023	49.00	28.161
2003	-5.00	-4.257	25.00	21.285
2004	-3.00	674	9.00	-2.022
2005	-1.00	663	1.00	-663
2006	1.00	-6.902	1.00	-6.902
2007	3.00	-12.543	9.00	I-37.629
2008	5.00	1.945	25.00	9.725
2009	7.00	-12.506	49.00	-87.542
2010	9.00	-30.285	81.00	-272.565
2011	11.00	-11.857	121.00	-130.427
2012	13.00	-215	169.00	-2.795
2013	15.00	7.325	225.00	109.875
2014	17.00	-15.249	289.00	-259.233
<b>Jumlah</b>		-37.552	1.649.000	-1.004.660,2
<b>Rata rata</b>		-2.208.94	67.00	-590.976.59

Nilai  $\alpha$  dan  $\beta$  dihitung sebagai berikut:

$$\alpha = -37.552 : 17 = -2.208,94$$

$$\beta = -1.004.660,2 : -1.649 = -609,25$$

Jadi, persamaan garis linear adalah  $Y = \alpha + \beta t$

$$y = -2.208,94 + -609,25 t$$

Dengan persamaan tersebut, dapat diramalkan cadangan devisa pada tahun yang akan datang. Karena yang ingin kita ketahui adalah cadangan devisa tahun 2045, maka perhitungan adalah sebagai berikut:

$$Y = -2.208,94 + -609,25t \text{ (nilai } t \text{ pada tahun 2045 adalah 79)}$$

$$Y = -2.208,94 + -609,25 (79) = -2.208,94 + -48.130,75 = -50.339,69$$

Pada tahun 2014, cadangan devisa sebesar -15.249 juta USD, sedangkan untuk tahun 2045 diperkirakan cadangan devisa akan mengalami penurunan menjadi -50.339,69 juta USD. Hal ini terjadi akibat pembayaran utang luar negeri pemerintah, lalu intervensi BI untuk meredam atau menahan kejatuhan rupiah lebih dalam. Perekonomian yang melambat akibat menurunnya pertumbuhan negara-negara *emerging market* telah mengurangi permintaan terhadap ekspor Indonesia. Kinerja ekspor semakin merosot karena pada saat yang bersamaan *terms of trade* Indonesia memburuk sejalan dengan komoditas global yang masih terus menurun.

Berdasarkan analisis di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa neraca pembayaran Indonesia periode 1998 - 2014 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu -3.506,98, yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global yang melambat, harga komoditas yang menurun, serta aliran modal ke negara berkembang yang menyusut.

Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu 167500. Hal ini terjadi karena perbaikan kinerja neraca pembayaran Indonesia akibat surplus transaksi modal dan keuangan meningkat lebih besar dibandingkan kenaikan defisit transaksi berjalan. Kenaikan surplus ini antara lain bersumber dari meningkatnya arus masuk investasi portofolio asing dalam bentuk pembelian surat berharga negara, baik yang berdominasi rupiah maupun valuta asing. Arus masuk juga terjadi dalam bentuk penarikan dana milik perbankan domestik yang disimpan di luar negeri.

# KETIMPANGAN EKONOMI (KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN) 11

## A. Konsep dan Definisi Kemiskinan

Di dalam bidang ekonomi, besarnya kemiskinan diukur dengan tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. konsep yang mengacu kepada suatu standar penilaian/pengukuran yang ditetapkan secara subjektif oleh masyarakat atau pemerintah (dalam kasus Indonesia, oleh Badan Pusat statistic (BPS), yang umum disebutkan garis kemiskinan adalah kemiskinan relatif. Ukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan, tetapi oleh standar kehidupan minimum yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (makanan dan non makanan) adalah kemiskinan absolut.

Ada sejumlah pendekatan menentukan kriteria kemiskinan (BPS, 2016 a) yakni pendekatan kebutuhan dasar (pengeluaran konsumsi minimum (Misalnya dalam rupiah) yang dibutuhkan untuk membeli makanan dan non makanan seperti kesehatan, pendidikan, rumah, pakaian dan transportasi), Pendekatan non moneter (Misalnya luas dan jenis lantai rumah tinggal, ketersediaan air bersih, jenis jamban dan kepemilikan aset).

## B. Garis Kemiskinan

Di Indonesia, garis kemiskinan (dalam rupiah) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (gkm) dan garis kemiskinan non makanan ( GKNM) penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan

dikategorikan sebagai Penduduk miskin. GKS merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. GKN adalah kebutuhan minimum untuk perumahan,, pendidikan dan kesehatan.

### **C. Sejumlah Indikator**

Besar kecilnya kemiskinan di suatu wilayah bisa dilihat dengan memakai sejumlah alat ukur yang disebut sebagai indikator indikator kemiskinan. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan dalam indikator-indikator kemiskinan antara perkotaan dan pedesaan terkecuali menyangkut aspek-aspek kehidupan perkotaan yang tidak ada di pedesaan.

Di negara maju kehidupan masyarakat pedesaan termasuk bentuk-bentuk kegiatan ekonomi sudah maju tidak ada lagi perbedaan yang signifikan antara pedesaan dan perkotaan ciri yang dimaksud tersebut adalah Misalnya kepemilikan kendaraan pribadi menurut model, Merak dan umur mobil, atau akses ke rumah sakit. Indikator-indikator utama kemiskinan adalah SBB:

#### **a. Pendapatan/konsumsi per minggu/bulan/tahun**

Yang paling umum digunakan untuk mengukur apakah seseorang itu miskin atau tidak adalah Jumlah pendapatan dari hasil kerja/usaha rata-rata per minggu bulan atau pertahun.

#### **b. Aset**

Jumlah Nilai aset seperti tanah, rumah/gedung dan Aset lain lainnya yang bergerak juga bisa digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan

#### **c. Total Kekayaan**

Jumlah kekayaan seseorang adalah per definisi jumlah dari semua aset yang dimiliki orang itu ditambah dengan Jumlah pendapatan yang didapatkan dari segala sumber termasuk sebagai pekerja atau pegawai.

#### **d. Makanan yang dikonsumsi**

Makanan sebagai salah satu indikator harus terutama melihat pada dua hal, yakni porsi dan kualitas dari makanan yang dikonsumsi. landasan teori adalah sebagai berikut makanan orang miskin lebih banyak memakai pendapatannya untuk

konsumsi makanan daripada non makanan seperti pakaian sepatu atau mobil.

**e. Tempat Tinggal**

Tempat tinggal bisa dalam arti rumah dan lokasi di mana Rumah itu berada yang harus difokuskan adalah bentuk dan kualitas. landasan teorinya adalah pada umumnya bentuk dari rumah dimiliki orang miskin lebih kecil dan sederhana dibanding rumah orang kaya.

**f. Pendidikan Formal**

Digunakan sebagai indikator-indikator kemiskinan dari aspek pendidikan adalah salah angka melek huruf penduduk berumur 15 tahun ke atas, rata-rata sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, angka partisipasi sekolah jumlah anak yang terdaftar di sekolah atau indeks pembangunan manusia (IPM).

**g. Infrastruktur Dasar Rumah Tangga**

Yang dimaksud infrastruktur dasar rumah tangga adalah seperti air bersih, sanitasi layak, listrik yang cukup, telekomunikasi dan telepon yang baik

**h. Kesehatan**

Untuk menggambarkan kemiskinan di wilayah atau masyarakat dua komponen penting dari aspek kesehatan yang harus diukur.komponen pertama adalah akses ke pelayanan kesehatan yang layak atau baik.komponen kedua adalah kondisi kesehatan rata-rata masyarakat

**D. Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan**

Dasar teori dari hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kaki pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan banyak faktor lain selain pertumbuhan ekonomi atau pendapatan yang juga berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di suatu wilayah/negara seperti misalnya derajat pendidikan penduduk/tenaga Kerja, penambahan jumlah kesempatan kerja yang tercipta oleh pertumbuhan ekonomi,struktur ekonomi,harga.

Tingkat pendapatan perkapita semakin rendah tingkat kemiskinan dalam perkataan lain, negara dengan tingkat PN perkapitanya yang lebih tinggi cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tingkat PN perkapitanya lebih rendah .

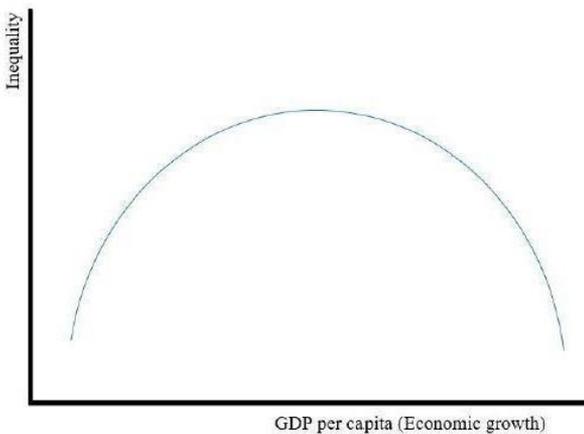
Hasil estimasi dari dolar dan kraay (2000) menunjukkan bahwa elastisitas pertumbuhan PDB dari pendapatan perkapita dari kelompok miskin adalah 1%, yang artinya pertumbuhan rata-rata output sebesar 1% membuat 1% peningkatan pendapatan dari masyarakat miskin titik sedangkan, hasil estimasinya dari Timmer (1997) memakai teknik-teknik ekonometrik yang sama melaporkan bahwa elastisitas tersebut hanya sekitar 8%, yang artinya kurang dari proporsional keuntungan bagi kelompok miskin dari pertumbuhan ekonomi. hasil estimasi ini didukung oleh banyaknya studi lain seperti World Bank (2005) yang juga menunjukkan adanya suatu hubungan negatif antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

PPG secara umum didefinisikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang membuat penurunan kemiskinan yang signifikan titik dalam usaha memberikan relevansi analisis dan operasional terhadap konsep tersebut, di dalam literatur muncul dua pendekatan- pendekatan pertama memfokuskan pada keyakinan bahwa orang-orang miskin Pasti mendapat keuntungan dan pertumbuhan ekonomi walaupun tidak proporsional. artinya, pertumbuhan ekonomi memihak kepada orang miskin jika dibarengi dengan pengurangan kesenjangan pangsa pendapatan Dari sekelompok miskin meningkatkan bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi.

### **E. Pertumbuhan Ekonomi dan Kesenjangan Pendapatan**

Data tahun 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak NSB, terutama negara-negara yang proses pembangunan ekonominya sangat pesat dan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti:

- Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan.
- Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan perkapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dan kaum kaya.
- Literatur mengenai evolusi atau perubahan kesenjangan pendapatan pada awalnya didominasi oleh apa yang disebut hipotesis Kuznets dengan memakai data lintas negara dan data deret waktu dari sejumlah survey/observasi di setiap negara.



Kurva Kuznets

Simon Kuznets menemukan adanya suatu relasi antara kesenjangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita yang berbentuk U terbalik. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dan distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi perdesaan ke suatu ekonomi perkotaan, atau dari ekonomi pertanian (tradisional) ke ekonomi industri (modern).

## F. Analisis Empiris

### 1. Kemiskinan

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan selama era Orde Baru (1996-1998) memberi suatu kontribusi yang besar terhadap pengurangan Statistik resmi dari BPS, menunjukkan persentase kemiskinan pada tingkat nasional menurun Secara signifikan dari sekitar 40% persen ke hampir 17,5 persen selama periode 1976- 1996, dan penurunan besar terjadi selama tahun 1970-an hingga awal 1980-an dengan 13% poin, sedangkan selama periode 1981-1993, laju penurunannya hanya sekitar 16% poin.

Tabel 2. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia menurut Daerah, Tahun 1976-2009

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta)			Persentase Penduduk Miskin		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1976	10,0	44,2	54,2	38,8	40,4	40,1
1978	8,3	38,9	47,2	30,8	33,4	33,3
1980	9,5	32,8	42,3	29,0	28,4	28,6
1981	9,3	31,3	40,6	28,1	26,5	26,9
1984	9,3	25,7	35,0	23,1	21,2	21,6
1987	9,7	20,3	30,0	20,1	16,1	17,4
1990	9,4	17,8	27,2	16,8	14,3	15,1
1993	8,7	17,2	25,9	13,4	13,8	13,7
1996	9,42	24,59	34,01	13,39	19,78	17,47
1998	17,60	31,39	48,99	21,92	25,72	24,23
1999	15,64	32,33	47,97	19,41	26,03	23,43
2000	12,30	26,40	38,70	14,60	22,38	19,14
2001	8,60	29,30	37,90	9,76	24,84	18,41
2002	13,30	25,10	38,40	14,46	21,10	18,20
2003	12,20	25,10	37,30	13,57	20,23	17,42
2004	11,40	24,80	36,20	12,13	20,11	16,66
2005	12,40	22,70	35,10	11,68	19,98	15,97
2006	14,49	24,81	39,30	13,47	21,81	17,75
2007	13,56	23,61	37,17	12,52	20,37	16,58
2008	12,77	22,19	34,96	11,65	18,93	15,42
2009	11,91	20,62	32,53	10,72	17,35	14,15

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Pada tahun 2013 (Maret), secara rata-rata tingkat kemiskinan di wilayah barat Indonesia mencapai sekitar 10,01 persen, dengan tingkat tertinggi di Aceh 17,6 persen dan terendah di DKI Jakarta 3,55 persen. Sedangkan di wilayah timur Indonesia tercatat rata-rata sekitar 17,25 persen dengan tertinggi di Papua 31.13 persen dan terendah di Maluku Utara 7.50 persen. Struktur ini relatif tidak berubah hingga saat ini. Menurut pulau, berdasarkan data terakhir,

Maret 2017, Maluku dan Papua paling tinggi tingkat kemiskinannya, yakni 21,45 persen; disusul kemudian oleh Bali dan Nusa Tenggara dengan 14,71 persen, Sulawesi 11,05 persen, Sumatera 10,97 persen, Jawa 10,01 persen, dan terendah Kalimantan 6,25 persen (BPS, 2017a). Struktur ini menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi di Indonesia antara wilayah barat yang relatif lebih maju (terutama pulau Jawa dan wilayah timur yang relatif terbelakang. Ketimpangan ini juga bisa dilihat dari peranan wilayah dalam pembentukan PDB, yang selalu kontribusi terbesar berasal dari Jawa (di atas 50 persen) dan pada peringkat kedua Sumatera (di atas 20 persen).

Bahwa kemiskinan di Indonesia lebih besar di kawasan timur daripada di kawasan barat. Sesuai PP No. 131 Tahun 2015 mengenai penetapan daerah tertinggal untuk periode 2015-2019, jumlah daerah tertinggal di Indonesia mencapai 122 dan sebagian besarnya berada di timur Indonesia. Ada lima provinsi di kawasan timur yang paling banyak daerah tertinggalnya, yakni Papua, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat (NTB) (Tono, 2017).

Selain tingkat kemiskinan, ada dua hal lain yang juga harus diperhatikan dalam membahas soal kemiskinan di Indonesia, yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Kedalaman atau intensitas kemiskinan yang diukur oleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P) menunjukkan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas miskin (garis kemiskinan yang berlaku), sedangkan keparahan kemiskinan yang diukur dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P) menunjukkan ketimpangan pengeluaran dari penduduk paling miskin, atau yang makin jatuh di bawah garis kemiskinan yang berlaku. Semakin besar nilai kedua indeks ini di sebuah negara mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan di negara tersebut.

## **2. Kesenjangan**

Kalau dilihat pada tingkat agregat dengan memperhatikan perkembangan sejumlah variabel-variabel ekonomi makro selama Orde Baru hingga saat ini, seperti misalnya laju pertumbuhan PDB rata-rata per tahun, peningkatan PN per kapita, diversifikasi

ekonomi, dan pangsa ekspor non-migas, diakun ada keberhasilan dari pembangunan ekonomi selama ini, walaupun sempat terganggu oleh dua kali krisis ekonmi. Akan tetapi, keberhasilan suatu pembangunan ekonomi tidak dapat hanya diukur dari laju pertumbuhan output stau peningkatan pendapatan secara agregat atau per kapita. Tetapi, bahkan lebih penting, harus dilihat juga dari pola distribusi dari peningkatan pendapatan tersebut. Misalnya, menjelang pertengahan 1997, beberapa saat sebelum krisis keuangan Asia terjadi, tingkat PN per kepala di Indonesia sudah melebihi 1000 dolar AS dan tingkat ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan 30 tahun yang lalu. Atau, sekarang ini tingkat PN per kapita sudah jauh lebih besar dibandingkan pada era Orde

Baru. Namun, apa artinya kalau hanya 10 persen saja dari jumlah penduduk di tanah air yang menikmati 90 persen dari jumlah PN. Sedangkan, sisanya (80 persen) hanya menikmati 10 persen dari PN. Atau, kenaikan PN selama masa itu hanya dinikmati oleh kelompok 10 persen tersebut, sedangkan pendapatan dari kelompok masyarakat yang mewakili 90 persen dari jumlah penduduk tidak mengalami perbaikan yang berarti. Oleh karena itu, pola distribusi pendapatan sebagai suatu variabel juga harus diamati perkembangannya selama proses pembangunan berjalan. Dengan mengikutsertakan distribusi pendapatan dalam analisis keberhasilan pembangunan ekonomi, maka pembangunan ekonomi di Indonesia selama itu dapat dikatakan berhasil sepenuhnya apabila tingkat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat miskin dengan kelompok masyarakat kaya bisa diperkecil.

Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi RT dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan alat ukur/ indikator yang umum digunakan adalah koefisien Gini yang nilainya antara 0 (tidak ada kesenjangan) dan 1 kesenjangan penuh). Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan (proksi) untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Walaupun diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai suatu kelemahan yang serius: data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan, atau tidak mencerminkan tingkat

pendapatan yang sebenarnya. Jumlah pengeluaran konsumsi seseorang tidak harus selalu sama dengan jumlah pendapatan yang diterimanya, bisa lebih besar atau lebih hal. Demikian pula pengertian pendapatan dengan pengertian kekayaan. Kekayaan seseorang bisa jauh lebih besar dan pada pendapatannya. Atau, seseorang bisa saja tidak punya pekerjaan (pendapatan tetapi bisa sangat kaya karena ada warisan keluarga. Banyak pengusaha-pengusaha muda di Indonesia kalau diukur dari tingkat pendapatan mereka tidak terlalu berlebihan tetapi mereka sangat kaya karena perusahaan di mana mereka bekerja adalah milik mereka (atau orang tua mereka). Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di banyak NSB lainnya masih relatif sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang mempunyai pekerjaan di sektor inform atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif.

Sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa pemerintahan Orde Baru selain berhasil menekan angka kemiskinan, juga berhasil menjaga tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan untuk tidak meningkat secara berarti pada saat ekonomi mengalami pertumbuhan pesat, yang biasanya terjadi pada awal periode pembangunan. Selama 1965-1970, rata-rata laju pertumbuhan PDR di Indonesia masih sangat rendah, sekitar 2,7 persen, dan koefisien Gini rata-rata per tahun sebesar 0,35. Selama 1971- 1980, laju pertumbuhan PDB jauh lebih besar, rata-rata 6 persen per tahun dengan koefisien Gini rata-rata per tahun sedikit di atas 0,4. Ini berarti selama periode itu, pertumbuhan memang sangat baik, namun kesenjangan pendapatan yang diukur dengan distribusi pengeluaran konsumsi semakin memburuk. Sedangkan selama 1981-1990, pertumbuhan PDB 5,4 persen per tahun dan koefisien Gini rata-rata per tahun sedikit di atas 0,3. Walaupun ada variasi antara tahun-tahun tertentu, perubahan koefisien Gini tersebut menandakan bahwa dibandingkan 1960-an hingga 1970-an, tingkat ketidak-merataan pembagian pendapatan di tanah air selama dekade 80-an menunjukkan penurunan. Sebagaimana negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara lainnya, koefisien Gini

di Indonesia juga meningkat selama awal 1990-an, tetapi kemudian menurun lagi secara tajam menjadi 0,32 tahun 1998, dan naik sedikit menjadi 0,33 tahun 1999 dan relatif stabil hingga awal tahun 2000-an (Tambunan, 2015). Memakai pengertian dari Spicker (2006), yang dikutip dari Fanggal (2015), Indonesia mengalami kesenjangan hierarkis atau vertikal maupun horisontal yang divisil. Pengertian pertama tersebut adalah kesenjangan pendapatan dan kekayaan. Sedangkan kesenjangan horisontal (atau struktural) disebabkan oleh perbedaan kelompok masyarakat didasarkan atas kelas, ras, etnik, warna kulit, gender, umur, atau letak geografis. Menurut Fanggal (2015), penghasilan kelompok masyarakat terkaya di Indonesia (yakni 40 persen dari total populasi yang menguasai 10 persen PDB) tumbuh terus, sementara pendapatan dari kelompok menengah mengalami stagnasi, dan pendapatan dari kelompok paling bawah mengalami kontraksi. Sementara itu, kesenjangan horisontal (atau kesenjangan struktural) tidak berubah sejak proklamasi kemerdekaan 1945 dalam banyak hal, dan ini membuat kesenjangan pendapatan sulit dihilangkan

## **G. Faktor-faktor Penyebab**

### **1. Kemiskinan**

Penyebab utama kemiskinan seseorang atau sebuah kelompok masyarakat atau sebuah desa tidaklah mudah, harus dibedakan antara Penyebab langsung dan tidak langsung, faktor-faktor yang terlibat atau yang dapat di observasi dan tidak terlihat. Ada dua faktor penyebab langsung kemiskinan, (i) yaitu kurang, hilang atau tidak adanya kesempatan kerja dan (ii) rendahnya upah atau pendapatan riil faktor pertama menyebabkan seseorang tidak memiliki sumber pendapatan karena tidak bekerja dan faktor kedua menyebabkan seseorang pekerja memiliki pendapatan namun tidak mencukupi kebutuhan minimum sehari-hari. Tidak adanya pekerjaan bagi seseorang bisa disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari pendidikan si pencari pekerja yang rendah atau tidak memiliki keterampilan sesuai kebutuhan sehingga lamarannya selalu ditolak. Faktor-faktor ini dapat dianggap sebagai penyebab penyebab langsung terjadinya pengangguran dan berarti kemiskinan.

Sedangkan penyebab tidak langsung kemiskinan seseorang adalah Misalnya ekonomi mengalami kelesuan atau respirasi yang mengakibatkan tidak adanya perusahaan- perusahaan baru atau bahkan menyebabkan banyak perusahaan yang ada terpaksa gulung tikar sehingga terjadi pemberhentian tenaga kerja secara besar-besaran Penyebab langsung rendahnya pendapatan riil bisa karena ada dua kemungkinan, pertama, akibat kenaikan harga-harga kebutuhan pokok inflasi sementara nilai upah nominal atau pemasukan bulanan tetap. Ini adalah kasus di mana kenaikan harga menyebabkan upah atau penghasilan dalam nilai riil merosot titik. kedua, pemotongan gaji yang terpaksa dilakukan perusahaan akibat merosotnya penjualan, namun jumlah pekerja ingin tetap dipertahankan. Misalnya dalam kasus pertanian, penghasilan merosot Karena produksi merosot atau gagal panen kemungkinan kedua ini sesuai prinsip penentuan upah berdasarkan produktivitas semakin banyak barang yang dihasilkan seseorang pekerja per hari semakin besar upah nominal yang diterima perhari. Jadi ini adalah kasus mengenai nilai real penghasilan yang menurun bukan karena kenaikan harga melainkan karena penurunan nilai nominalnya.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya upah atau penghasilan riil secara tidak langsung adalah Misalnya gagal panen Sehingga harga-harga kebutuhan pokok makanan meningkat, yang akhirnya menyebabkan laju inflasi meningkat atau otonomi mengalami kelesuan yang membuat penjualan menurun atau harga barang bahan baku meningkat tajam yang memaksa perusahaan mengurangi produksi.

## **2. Kesenjangan**

Secara teoritis, kesenjangan pendapat, atau perbedaan pendapat antara dua orang atau dua kelompok orang, dipengaruhi oleh perbedaan-perbedaan dalam banyak hal seperti perbedaan dalam kesempatan mendapatkan pekerjaan. Selain itu praktik praktik diskriminasi terkait gender, umur suku agama alumni dan lainnya juga menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan.

Dari uraian diatas ini dapat dipahami bahwa kesenjangan pendapatan tidak dapat dilepaskan dari kebijakan-kebijakan

ekonomi khususnya kebijakan fiskal sistem perpajakan dan subsidi.

Selain itu, ketimpangan dalam distribusi pendapatan bisa disebabkan oleh kesenjangan ekonomi hipotesisnya adalah bahwa di daerah yang pembangunan ekonominya pesat kesempatan kerja lebih terbuka luas dibandingkan di daerah yang ekonominya mengalami stagnasi.

Di Indonesia, perbedaan pola distribusi pendapatan antara di perkotaan dengan di pedesaan atau lebih rendahnya kesenjangan di desa dibandingkan di kota disebabkan oleh sejumlah faktor titik pertama akibat arus penduduk atau tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan. A.Lewis (1954), Perpindahan orang dari pedesaan ke perkotaan memberi suatu dampak positif terhadap perekonomian di pedesaan, kesempatan kerja produktif, tingkat produktivitas dan pendapatan rata-rata masyarakat di pedesaan meningkat. Sedangkan di perkotaan pada suatu saat akhirnya tidak mampu menampung suplai tenaga kerja yang meningkat terus setiap tahunnya, sedangkan sebagian besar adalah pendapatan dari pedesaan yang akhirnya berakibat pada peningkatan pengangguran dan menurunnya laju pertumbuhan tingkat upah atau gaji di pihak lain.

Kedua, struktur pasar dan besarnya distorsi yang berbeda di pedesaan dengan di perkotaan titik di pedesaan jumlah sektor relatif lebih kecil dibandingkan di perkotaan, dan sektor-sektor yang ada di pedesaan lebih kecil dibandingkan sektor yang sama di perkotaan.

Ketiga, dampak positif dari proses pembangunan ekonomi sosial. Dampak tersebut bisa dalam beragam bentuk diantaranya:

- a. Semakin banyak kegiatan ekonomi di pedesaan di luar sektor pertanian.
- b. Tingkat produktivitas dan pendapatan riil tenaga kerja di sektor pertanian meningkat.
- c. Potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di pedesaan semakin baik dimanfaatkan oleh penduduk desa pemakaiannya semakin optimal ( tambunan 2015 ).

Proses transisi ekonomi menuju ekonomi modern atau perkotaan yang membuat sektor-sektor produktif semakin mendominasi ekonomi nasional di satu sisi, dan semakin terpusatnya kegiatan-kegiatan dari sektor tersebut di wilayah tertentu karena kondisi dari wilayah itu paling menguntungkan (infrastruktur, SDM). Pada saat Belanda meninggalkan Indonesia Pulau Jawa adalah wilayah Indonesia yang paling maju dalam banyak hal termasuk pembangunan infrastruktur dan SDM. Pemerintah Indonesia juga meneruskan tradisi kolonisasi yang menjadikan Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan keuangan sejarah dunia menunjukkan bahwa wilayah yang menjadi pusat pemerintahan. Secara alami akan menarik kegiatan-kegiatan ekonomi ke wilayah tersebut jadi dalam kasus Indonesia, pulau Jawa dan DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor Depok Tangerang Bekasi (bodetabek) (tambunan 2015) dua indikator kunci yang umum digunakan untuk melihat ke Wilayah mana di Indonesia kegiatan-kegiatan ekonomi cenderung terpusatkan adalah pembentukan atau pertumbuhan PDB daerah (PDRB) dan distribusi PDB menurut wilayah (misalnya provinsi). Besaran PDRB dari suatu wilayah terbentuk oleh kombinasi antara total output yang dihasilkan (sisi penawaran agregat) oleh semua faktor ekonomi dan besarnya permintaan (sisi permintaan agregat) di wilayah tersebut. Tinggi rendahnya output yang bisa dihasilkan oleh semua faktor ekonomi yang ada di wilayah tersebut sangat tergantung pada faktor produksi yang ada di wilayah tersebut. Seperti bahan baku.

Sementara itu, dari sisi permintaan agregat, tinggi rendahnya PDRB dari suatu wilayah ditentukan oleh kombinasi dari jumlah dan struktur produk serta pendapatan riil per orang di wilayah tersebut. Dalam kata lain dari sisi permintaan agregat, wilayah dengan PDRB yang rendah mencerminkan sedikitnya jumlah penduduk atau lebih banyaknya orang miskin dibandingkan orang kaya atau kombinasi dari keduanya di wilayah tersebut. Menurut suatu penelitian yang dikutip oleh Parikesit (2010) tingkat konsumsi penduduk DKI Jakarta adalah 4 kali Wilayah lain di Indonesia.

## **H. Kebijakan Anti Kemiskinan**

Untuk mengetahui Kenapa diperlukan kebijakan anti kemiskinan dan pemerataan distribusi pendapatan perlu diketahui terlebih dahulu Bagaimana pola hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, kelembagaan, dan penurunan kemiskinan. Kebijakan-kebijakan langsung adalah ke bijakan dalam bentuk Berbagai macam program yang khusus dibuat untuk mengurangi kemiskinan jadi sasarannya adalah penduduk miskin. sedangkan kebijakan tidak langsung adalah kebijakan ekonomi yang sasarannya bukan penduduk miskin, tetapi mempunyai pengaruh positif terhadap pengurangan kemiskinan titik misalnya kebijakan perdagangan yang membatasi impor suatu produk dengan harapan industri dalam negeri yang membuat produk tersebut bisa berkembang pesat (Tambunan, 2015).

# KEBIJAKAN FISKAL, KEBIJAKAN MONETER DAN UTANG LUAR NEGERI

# 12

## A. Kebijakan Fiskal

1. Menaikan pengeluaran ( $\Delta G > 0$ ) atau dan mengurangi tarif pajak pendapatan ( $\Delta T < 0$ ) jika sistem pajak pendapatan yang berlaku adalah seperti persamaan (7,3). ini yang dimaksud dengan kebijakan fiskal ekspansif.
2. Kebijakan fiskal kontraktif adalah mengurangi pengeluaran ( $\Delta G > 0$ ) atau meningkatkan pendapatan pajak lewat menaikan tarif pajak ( $\Delta T > 0$ ).

### Kurva IS

suatu garis yang menghubungkan sejumlah titik keseimbangan di sektor ril, yaitu pada investasi = tabungan, padad tingkat pendapatan dan suku bunga yang berbeda.

### Kurva LM

suatu garis yang menghubungkan sejumlah titik keseimbangan di sektor moneter (pasar uang), yakni pada saat permintaan uang (L) = penawaran uang (M), pada tingkat pendapatan dan suku bunga yang berbeda.

## B. Efek Dari Kebijakan Fiskal

1. Efek Jangka Pendek adalah efek awal atau langsung dari kebijakan itu sendiri.
2. Efek Jangka Panjang adalah efek awal ditambah efek-efek

selanjutnya atau disebut efek pengali atau penggandaan dari kebijakan tersebut.

Kurva LM

suatu garis yang menghubungkan sejumlah titik keseimbangan di sektor meneter (pasar uang), yakni pada saat permintaan uang (L) = penawaran uang (M), pada tingkat pendapatan dan suku bunga yang berbeda.

### **C. Pengertian APBN**

APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia yang menjadi rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN disetujui oleh DPR dan terdiri dari 3 komponen utama, yaitu pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara.

APBN sangat berguna untuk pembangunan daerah maupun pembangunan desa. Landasan Hukum mengenai APBN tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 yang mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.

### **D. Pendapatan Negara**

Pendapatan negara didapat melalui penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan untuk APBN biasanya melalui kepabean & cukai, penerimaan pajak, dan hibah. Pajak menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari APBN. Pasalnya pajak memiliki kontribusi besar dalam pembentukan APBN tiap tahunnya. Penerimaan pajak terbilang paling besar ketimbang komponen-komponen lainnya yang ada dalam APBN. Selain melalui penerimaan perpajakan, pendapatan negara juga didapat melalui penerimaan negara bukan pajak dan lainnya. Pendapatan tersebut antara lain adalah pendapatan Badan Layanan Umum (BLU),

pendapatan Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan dari kekayaan negara dan hibah yang didapat. Belanja Negara Besar kecilnya belanja negara dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

- Kebutuhan penyelenggaraan negara.
- Risiko bencana alam dan dampak krisis global.
- Asumsi dasar makro ekonomi.
- Kebijakan pembangunan.
- Kondisi akan kebijakan lainnya.

### **E. Pembiayaan Negara**

Besaran pembiayaan negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni asumsi dasar makro ekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi dan kebijakan lainnya.

1. Pembiayaan negara terbagi menjadi 2 jenis pembiayaan, yakni pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan dalam negeri dan pembiayaan non perbankan dalam negeri (hasil pengelolaan aset, pinjaman dalam negeri neto, kewajiban penjaminan, surat berharga negara neto, dan dana investasi pemerintah).
2. Sedangkan pembiayaan luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek, penerusan pinjaman, dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang terdiri atas jatuh tempo dan moratorium.

APBN mempunyai dua komponen besar, yaitu anggaran pengeluaran dan anggaran pendapatan. Selanjutnya, kedua komponen tersebut, masing-masing mempunyai banyak sub-komponen. Anggaran pendapatan terdiri atas berbagai macam pajak, retribusi, royalti, bagian dari laba BUMN, dan berbagai pendapatan non-pajak lainnya. Sedangkan anggaran pengeluaran terdiri atas dua sub-komponen besar, yakni pengeluaran pemerintahan pusat, dan pengalangan untuk pemerintah daerah.

Salah satu jalur pemerintah bisa mempengaruhi atau memainkan peran ekonominya adalah dengan kebijakan fiskal. Hal itu dilakukan dengan menaikkan atau mengurangi pengeluarannya

yang ditandai dengan variabel  $G$ , atau menaikkan atau menurunkan tariff pajak yang ditandai dengan variabel  $T$ , dan ini semua tercerminkan oleh besar kecilnya defisit APBN.

Indikator-indikator seperti perkembangan jumlah pengeluaran (konsumsi) pemerintah ( $G$ ) dan defisit APN (umum disebut deficit anggaran) jangka panjang sering digunakan untuk mengukur sejauh mana peran pemerintah lewat kebijakan fiskalnya didalam perekonomian sebuah negara. Meningkatnya defisit APBN bisa diartikan sebagai penambahan  $G$  yang melebihi penambahan  $T$  atau untuk jumlah  $G$  yang sama, pengurangan  $T$ , seperti telah dibahas sebelumnya, besarnya  $G$  neto atau defisit  $G-T$  mencerminkan kebijakan fiskal ekspensif, sebaliknya kebijakan fiskal kontraktif apabila  $G < T$  atau  $G \uparrow < T \uparrow$ .

## **F. Kebijakan Moneter**

### **Teori dan Model**

Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank central dalam bentuk persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu.

Uang mempunyai peran sentral dalam perekonomian modern. Jika tidak ada uang tidak mungkin ekonomi bisa berjalan karena tidak ada permintaan atau konsumsi rumah tangga ( $C$ ). Tetapi disisi lain, jika terlalu banyak uang beredar di masyarakat menyebabkan terlalu banyak permintaan. Jika produksi atau penawaran terbatas, maka laju inflasi meningkat, laju inflasi yang meningkat tinggi berpengaruh negative bagi pertumbuhan ekonomi. Menaikan harga menjadi insentif untuk industry untuk meningkatkan produksinya. Tapi jika harga terlalu tinggi permintaan akan merosot. Oleh karena itu betapa pentingnya kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas peredaran uang.

Untuk memahami efektivikasi kebijakan moneter terhadap ekonomi Indonesia, perlu terlebih dahulu dipahami empat hal pokok:

1. Mekanisme kerja dari pasar uang, atau bagaimana terjadinya permintaan dan penawaran uang dan keseimbangan antara keduanya.

2. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi permintaan dan penawaran uang.
3. Sistem moneter yang diterapkan di Indonesia
4. Hubungan antara uang yang beredar di masyarakat dengan laju pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter disetiap negara sepenuhnya adalah tanggung jawab Otoritas

Moneter (OM) atau bank sentral (BS), yakni suatu entitas yang memiliki wewenang untuk mengendalikan jumlah uang beredar pada suatu Negara dan memiliki hak untuk menetapkan suku bunga dan parameter lainnya yang menentukan biaya dan persediaan uang. Sistem moneter di suatu Negara atas BS dan bank-ban yang menciptakan uang giral dan uang kuasi yang adalah bank-bank umum yang mempunyai kedudukan khusus dalam system keuangan karena dapat menciptakan kedua jenis uang tersebut.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas dari suatu kebijakan moneter, perlu diketahui dulu bagaimana relasi antara sektor riil dan sektor moneter. Secara garis besar hubungan antara kedua sector tersebut terjadi lewat dua jalur: permintaan uang (konsumsi), misalnya, meningkat menyusul pertumbuhan output/pendapatan di sector riil dan investasi menurun akibat suku bunga meningkat, atau dalam prosesnya sebagai berikut:

Jika OM/BS bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi lewat penurunan suku bunga yang membuat volume investasi meningkat (karena investasi menjadi lebih murah) dan juga jumlah konsumsi bertambah (karena minjam dari bank untuk membiayai konsumsi lebih murah atau menabung di bank lebih rugi karena penghasilan bunga lebih rendah), maka dikatakan kebijakan moneter efektif. Untuk menurunkan tingkat bunga maka suplai atau jumlah uang yang beredar di masyarakat (MI) harus diperbanyak. Hal ini dicerminkan oleh pergeseran dua kurva, yakni kurva  $^5$  dan kurva LM ke kanan. Proses penambahan jumlah MI yang beredar di ekonomi hingga akhirnya membuat laju pertumbuhan PDB meningkat disebut mekanisme transmisi kebijakan moneter.

## **G. Analisis Empiris**

Di Indonesia, sebelum krisis keuangan Asia 1997/1998, OM sepenuhnya di tangan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral Indonesia. Semua bank dan lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia, berada di bawah kendali BI, yang mewakili kewenangan dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan monete, mengatur dan menjaga kelancaran system bayaran dan mengawasi bank (sesuai UU nomer 23 tentang BI). Namun betapa melihat strategisnya peran BI tersebut di satu sisi, dan di sisi lain, pengalaman buruk yang Indonesia pernah mengalami masa krisis 1998 yang membuat system keuangan Indonesia porak poranda, dengan kurs rupiah yang mengalami depresiasi paling besar dalam sejarah dan inflasi yang tinggi. Melalui UU no 21 tahun 2011, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membentuk sebuah undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang secara umumnya sedikit mengambil ahli fungsi dari BI, utamanya dalam penyelenggaraan sampai dengan pengawasan jasa keuangan.

Efektivitas BI Rate sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter dalam pengelolaan inflasi sangat tergantung pada reaksi masyarakat, yang di cerminkan oleh antara lain perubahan jumlah uang yang beredar. Misalnya apabila suku bunga tabungan naik sebagai respons terhadap kenaikan BI Rate, namun jumlah tabungan masyarakat di perbankan tidak bertambah, maka kenaikan BI Rate dengan tujuan menekan laju inflasi sama sekali tidak efektif. Dalam kata lain, perkembangan suku bunga berhubungan erat dengan perkembangan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

## **H. Utang Luar Negeri**

### **1. Penyebab Utama: Suatu Persektif Teori**

Tingginya ULN dari banyak NSB, termasuk yang pernah dialami Indonesia, disebabkan terutama oleh tiga jenis defisit: defisit transaksi berjalan (TB) atau tanpa melihat komponen lainnya dari TB, defisit neraca perdagangan,  $X$  lebih kecil daripada  $M$ , defisit investasi ( $I-S$  gap), yakni dana yang dibutuhkan untuk membiayai  $I$  di dalam negeri lebih besar daripada  $S$ , dan defisit fiskal (*fiscal gap*).

Dari faktor-faktor tersebut, defisit TB sering disebut di dalam literatur sebagai penyebab utama membengkaknya ULN dari banyak NSB. Besarnya defisit TB melebihi surplus neraca modal (CA) (kalau saldonya memang positif) mengakibatkan defisit neraca pembayaran (BoP), yang berarti juga CD berkurang. Apabila saldo TB setiap tahun negatif, maka CD dengan sendirinya akan habis jika tidak ada sumber-sumber lain (misalnya modal investasi dari luar negeri), seperti yang dialami oleh negara-negara paling miskin di benua Afrika. Padahal devisa sangat dibutuhkan, terutama untuk membiayai impor barang-barang modal dan pembantu untuk kebutuhan kegiatan produksi di dalam negeri (Tambunan, 2015).

## **2. Analisis Empiris**

Sesuai definisi internasional yang diterapkan oleh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF), ULN terdiri atas tiga komponen besar: (i) utang jangka panjang, (ii) utang jangka pendek, dan (in) kredit IME. Utang jangka panjang terdiri atas dua jenis utang: (i) utang jangka panjang yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga-lembaga publik yang otonom, serta utang jangka panjang yang dibuat oleh sector swasta yang digaransi oleh pemerintah, dan (ii) utang jangka panjang yang dibuat oleh sektor swasta yang tidak digaransi pemerintah. Utang jangka pendek adalah utang dengan jangka waktu satu tahun atau kurang yang dibuat oleh sektor swasta.

Kredit IMF adalah kredit yang diberikan kepada pemerintah untuk membiayai defisit neraca pembayaran. Berbeda dengan kredit IMF, ULN publik digunakan untuk membiayai program-program seperti pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, dan proyek-proyek pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, gedung sekolah, pembangkit listrik, dan irigasi teknis.

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Indonesia tidak pernah lepas dari ketergantungan pada ULN, walaupun tidak selalu mengalami krisis ULN. Krisis ULN yang pernah dialami Indonesia sejak era Orde Baru adalah pada saat krisis keuangan Asia 1997/1998, pada saat mana jumlah ULN swasta Indonesia yang jatuh tempo sangat banyak yang membuat banyak perusahaan nasional

yang memiliki UN dalam jumlah dolar AS yang besar mengalami gagal bayar.

Selain itu, akibat dengan dolar AS yang dimiliki oleh Bi hampir luder akibat intervensinya yang terkena di pariralas untuk merahan nilai tukar rupiah yang waktu itu terus merosot pemerintah Indonesia terpaksa membuat utang baru dalam jumlah yang besar dari IMF dan juga dari Bank Dunia untuk membiayai pemilihan ekonomi.

Selama era Orde Baru, ULN digunakan pemerintah Indonesia untuk membiayai defisit anggaran yang berarti sangat berpengaruh terhadap kondisi APBN Namun, akibat pengalaman buruk dari krisis 1997/1998, fokus dari kebijakan fiskal bergeser ke upaya pengurangan ketergantungan pemerintah terhadap ULN. Sebagai alternative pembiayaannya, sejak itu hingga sekarang ini pemerintah terus berusaha mendanai defisit APBN lewat utang dalam negeri yakni dengan menerbitkan obligasi atau yang umum dikenal dengan sebutan Surat Utang Negara (SUN).

Berdasarkan data dari ADB (2017), beberapa gambar berikut ini memperlihatkan perkembangan UIN Indonesia. Di Gambar 7.17 dapat dilihat tren perkembangan jumlah ULN Indonesia selama periode 2000 2015. Tada tahun 2000, jurulah ULN Indonesia tercatat sebanyak 144 miliar dolar AS dan meningkat ke 308,5 miliar dolar AS pada tahun 2015. Yang menarik di sini adalah bahwa selama periode tersebut, ULN public (termasuk utang swasta yang dijamin pemerintah dan tidak termasuk kredit dari IMF) mengalami suatu penurunan yang cukup besar dari sekitar 70,03 miliar dolar AS pada tahun 2000 ke sekitar 160 miliar dolar AS pada tahun 2015. Di gambar tersebut jelas kelihatan jelas perbedaan jumlah ULN pemerintah dengan jumlah ULN swasta yang cenderung membesar, yang mulai terlihat sejak tahun 2006. Rasio ULN sebagai persentase dari pendapatan nasional bruto (PNB) di Gambar 7.18 menunjukkan tren yang menurun dari hampir 100 persen pada tahun 2000 ke 28 persen pada tahun 2016, yang membuat Indonesia masuk ke dalam kategori rendah, negara-negara dengan tingkat UIN yang dibandingkan, misalnya Jepang yang rasionya di atas 200 persen, atau AS lebih dari 100 persen (Gambar 7.19). Di dalam kelompok

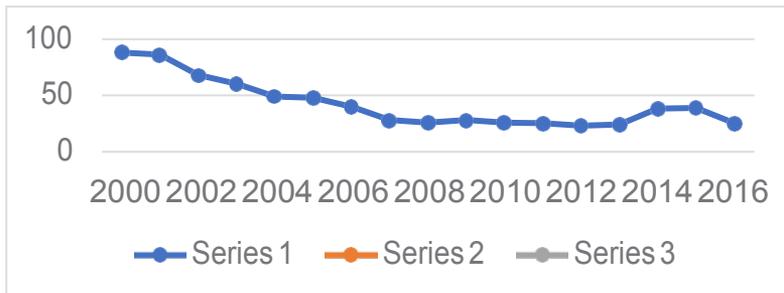
negara-negara yang sama, pada tahun 2015 Indonesia termasuk negara dengan ULN per kapita yang lebih rendah daripada PD per kapitanya. Sedangkan Jepang misalnya, ULN per kapita jauh di atas PDB per kapitanya (Gambar 7.20). Setelah sempat naik sedikit pada tahun 2006, rasio beban bunga ULN terhadap total pendapatan dan hibah Indonesia pada tahun 2015 turun ke 9,9 persen (Gambar 7. 21). Dalam hal ini, Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara-negara setara seperti Meksiko (11,4%), Filipina (13,8%), Mesir (23,9%), dan Brazil (34,0%) Terakhir, debt service ratio DSR) ULN Indonesia cenderung meningkat kembali dalam beberapa tahun terakhir (Gambar 7.22). DSR (rasio jumlah bunga dan cicilan ULN yang dibayar setiap tahun terhadap nilai ekspor barang dan jasa setiap tahun, Indonesia pada tahun 2015 tercatat sekitar 32,1 persen, yang artinya dari setiap satu dolar AS hasil ekspor, 32 senya digunakan untuk bayar bunga dan cicilan utang Jadi, tinggal sekitar 68 sen yang bisa gunakan untuk maksud- maksud lain, misalnya pembiayaan impor.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

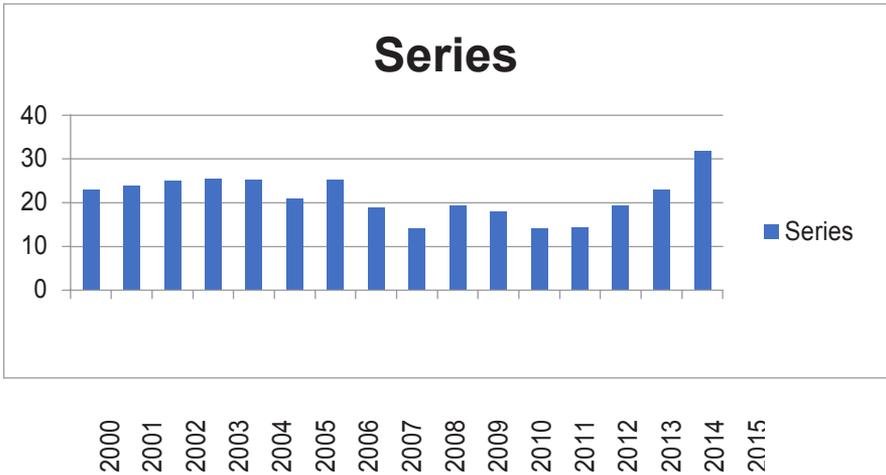
**Gambar Jumlah**

Indonesia dan ULN Publik, 2000-2015 (Juta Dolar AS)

**7.17: ULN**



**Gambar 7.18: Rasio Jumlah ULN terhadap PNB, 2000-2016 (%)**



**Gambar 7.22: DSR ULN Indonesia, 2000-2015 (%)**

## I. PERAN SEKTOR MONETER DI INDONESIA

### a. Perkembangan Inflasi di Indonesia

- Perkembangan yang berulang menimpa perekonomian kita mencapai puncaknya dengan “tiga angka” pada masa 100 Menteri dan memberikan gambaran klasik dengan berlakunya teori kuantitas uang. Pada masa orde baru, inflasi memasuki alam baru akibat langkah-langkah positif yang diambil pemerintah untuk mengatasinya. Defisit APBN yang dulunya merupakan sumber utama kenaikan uang dalam peredaran dapat dialihkan menjadi surplus, walaupun anggaran domestik dari APBN merupakan arus inflasioner yang besar (Oppusunggu, HMT, 1985).
- Sejak akhir tahun 1980-an, tingkat inflasi rata-rata per tahun di Indonesia mulai tinggi lagi walaupun belum pernah mencapai sampeid I atas 10,0%. Selama periode 1993 – 1995 laju inflasi sebagai berikut : 9,8% (1993), 9,2% (1994), 8,6% (1995). Angka ini tertinggi di antara negara-negara ASEAN, misalnya Malaysia: 3,6% (1993), 3,7% (1994), 3,2% (1995). Inflasi di Malaysia, Singapura dan Thailand relatif rendah dan merupakan negara-negara di

ASEAN yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak harus dengan laju inflasi yang tinggi pula, seperti halnya yang dialami Indonesia (Tulus, T.H. Tambunan, Dr. 1996).

- Laju inflasi selama periode 1997 – 2002 sebagai berikut : 11,1% (1997), 77,6% (1998), 2,0% (1999). Laju inflasi selama tahun 1998/1999 mencapai 45,9%. Meningkatnya tekanan haarga terutama berasal dari sisi penawaran sebagai akibat depresiasi rupiah yang sangat tajam pada tahun 1997/1998. tiga tahun terakhir laju inflasi : 9,3% (2000), 12,5% (2001) dan turun 10,0% (2002). Kondisi moneter yang stabil menyebabkan tingkat inflasi IHK selama tahun 2002 cenderung menurun hingga 10,03%. (Laporan Tahunan BI, 1997/1998, 1999 – 2002)

#### b. Cara Menghitung Tingkat Inflasi

- Sejak April 1979 angka inflasi dihitung oleh Biro Pusat Statistik (BPS) berdasarkan perubahan Indek Harga Konsumen (umum) gabungan 17 kota- kota besar di seluruh Indonesia. Sebelum itu inflasi dihitung berdasarkan Indek Biaya Hidup (umum) kota Jakarta yang meliputi 62 jenis barang dan jasa. Sedang Indeks Harga Konsumen IHK meliputi 115 – 150 jenis barang dan jasa (Widodo, Hg. Suseno Triyanto, 1995).
- Sejak April 1989 angka inflasi dihitung berdasarkan perubahan IHK umum gabungan dari 27 kota-kota besar (sesuai jumlah propensi) di seluruh Idnoensia. Jenis bararnng dan jasa yang diliput dewasa ini sekitar 400 item, terdiri dari : (1) bahan makanan, (2) makanan jadi, minuman dan rokok, (3) sandang, (4) transportasi dan komunikasi, (5) pendidikan rekreasi dan olah raga, (6) perumahan, (7) kesehatan.

c. Penyebab Inflasi Secara Umum

(1) Cost – Rust Inflation (CP)

CPI adalah faktor penyebab inflasi dari sisi penawaran. Selain biaya produksi lainnya, ongkos tenaga kerja juga sering menjadi salah satu penyebab utama CPI, misalnya kenaikan UMR di semua propinsi.

(2) Demand – Pull Inflation (DPL)

- DPI adalah faktor penyebab inflasi dari sisi permintaan. Menurut teori moneter eksese permintaan ini disebabkan terlalu banyaknya uang beredar (M1) di masyarakat, sedangkan jumlah barang di pasar sedikit. Peningkatan permintaan agregat domestik bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya oleh monetger perbankan dalam bentuk ekspansi kredit atau penurunan suku bunga pinjaman dan deposito.
- Sebab lain terjadinya inflasi :
  - a) Imported Inflation (depresiasi Rp..., harga barang LN)
  - b) Administrasi Goods (naiknya harga BBM, tarif listrik)
  - c) Output Gap (Perbedaan output potensial dan aktual)
  - d. Faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi

(1) Meningkatnya Kegiatan Ekonomi

Meningkatnya kegiatan ekonomi mendorong peningkatan permintaan agregat yang tidak diimbangi dengan meningkatnya penawaran agregat karena adanya kendala struktural perekonomian. Indikatornya : masih rendahnya kapasitas terpakai sektor industri pengolahan (39% - 51%) dan menurunnya produksi tanaman bahan makanan (sumbangan pada PDB berkurang 1,1%) pada tahun 2001.

(2) Kebijakan pemerintah di bidang harga dan pendapatan

Kebijakan pemerintah dalam tahun 2001 menaikkan harga barang dan jasa seperti BBM, listrik, air miinum dan rokok serta menaikkan upah minimum tenaga kerja swasta dan gaji pegawai negeri diperkirakan memberikan tambahan inflasi IHK sebesar 3,83%.

### (3) Melemahnya Nilai Tukar Rupiah

Pengaruh kuat depresiasi nilai tukar rupiah diketahui dari hasil penelitian bank Indonesia, antara lain :

- Perilaku harga cenderung mudah meningkat karena pengaruh melemahnya nilai tukar rupiah
- Perilaku harga cenderung sulit untuk turun apabila nilai tukar rupiah menguat, seperti pada bulan Agustus menguat 4,0%, bulan Juli menguat 21,0%, namun harga hanya turun (deflasi) sebesar 0,24%.

### (4) Tingginya ekspektasi inflasi masyarakat

Tingginya inflasi IHK tidak lepas dari pengaruh ekspektasi inflasi oleh produsen dan pedagang serta konsumen.

Tingginya ekspektasi inflasi pada produsen dan pedagang sepanjang tahun 2001 terutama dipengaruhi oleh tingginya inflasi tahun 2000 yang mencapai 9,35%. Sedangkan ekspektasi para konsumen terutama dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan harga barang-barang yang dikendalikan pemerintah dan ekspektasi nilai tukar rupiah. (Laporan Bank Indonesia Tahun, 2001).

## KEBIJAKAN/TINDAKAN MENGENDALIKAN INFLASI

Bank Indonesia telah menempuh berbagai upaya untuk mencapai sasaran inflasi :

### 1. Menyerap kelebihan likuiditas

Untuk meredam melemahnya nilai tukar rupiah terhadap inflasi BI berupa menyerap kelebihan likuiditas melalui instrumen operasi pasar terbuka.

### 2. Melakukan Sterilisasi Valuta Asing

BI melakukan kebijakan pembatasan transaksi rupiah oleh bukan penduduk.

### 3. Mengurangi ekspektasi inflasi yang tinggi

BI menetapkan sasaran inflasi yang rendah pada awal tahun.

## J. PERKEMBANGAN UANG PRIMER DAN UANG BEREDAR

### 1. Perenana Uang Dalam Perekonomian

- Fungsi dasar uang adalah : (1) uang sebagai alat tukar (medium of exchange); (2) uang sebagai alat penyimpan nilai atau tenaga beli (Store of value). Sedangkan fungsi tambahannya meliputi : (3) uang sebagai satuan hitung (unit of account) dan (4) uang sebagai pengukur nilai (measure of value); (5) uang sebagai alat pengukur utang atau pembayaran di saat yang akan datang (standard for deferred payment) (Sri Mulyani Indrawati, 1988)

- Financial Deepening

Pembahasan tentang masalah moneter dalam suatu negara sering kali harus dimulai dengan pembahasan tentang financial deepening. Karena konsep ini akan membawa kita kepada observasi yang lebih mendalam tentang besar kecilnya suatu sistem keuangan dalam suatu negara.

Semakin tinggi suatu perekonomian maka semakin besar perran sistem keuangan, karena semakin banyak pula penggunaan uang dalam berbagai transaksi perekonomian. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa M1/PDB dan M2/PDB yang merupakan proksi dari financial deepening mengalami peningkatan yang semakin besar sejak tahun 1995 (Sjahrir. 1995).

## DAFTAR PUSTAKA

- Basri, F. (2002). *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Basuki, A. T., & Nano P. (2016). *Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (Dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dewi, M. D. K, & Setiawina, N. D. (2015). *Pengaruh Kurs Dollar, Harga, dan Inflasi terhadap Volume Ekspor Kepiting Indonesia*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4 Vo. 7
- Dumairy. **Perekonomian Indonesia**. Penerbit Erlangga, Jakarta, 1996.
- Elisha, L. C. (2015). *Analisis Ekspor Kopi Indonesia ke Amerika Serikat dengan Pendekatan Error Correction Model*. EDAJ Vol. 4 No. 4
- Fernando, Yosep. (2009). *Analisis Daya Saing dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Jagung Indonesia di Pasar Malaysia Pra dan Pasca Krisi Ekonomi*. Skripsi. Bogor. Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Food and Agricultural Organization. (2018). *Production/Yield Quantities of Maize in Indonesia*. FAOSTAT.
- Ghozali, I. (2009). *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gilarso, T. (2014). *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Dasar-dasar*

- Ekonometrika*. Jakarta:  
Salemba Empat.
- Herlambang. (2001). *Ekonomi Makro: Teori Analisis dan Kebijakan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Juliantari, D. P. E., & Setiawina, N. D. (2015). *Analisis Pengaruh Kurs Dollar Amerika Serikat, Inflasi, dan Penanaman Modal Asing terhadap Nilai Ekspor Makanan dan Minuman di Indonesia*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4 No. 12.
- Kementrian Pertanian. (2016). *Outlook Komoditas Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan Jagung*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian.
- Khalwaty, T. (2006). *Inflasi dan Solusinya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Krugman, P. R. (2005). *Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Machmud, Amir. **Perekonomian Indonesia : pasca reformasi**. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2016.
- Mankiw, G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba Empat. Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Nanga, Muana. (2005). *Makroekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nopirin. (2011). *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. Putri, R. F.A., Suhadak, & Sulasmiyati, S. (2016). *Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar terhadap Ekspor Indonesia Komiditi Tekstil dan Elektronika ke Korea Selatan (Studi Sebelum dan Setelah ASEAN Korea Free Trade Agreement Tahun 2011)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 35 No. 1
- Rosandi, A. W. (2007). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penawaran Ekspor Kopi Indonesia*. Skripsi. Bogor. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.
- Safitri, L. (2011). *Analisis Kinerja Ekspor dan Impor Tembakau Indonesia Periode 2000-2009*. Media Ekonomi Vol. 9 No. 2.

- Salvatore, D. (2005). *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Salemba Empat.
- Savitri, P. D. L., & Budhi, M. K. S. (2015). *Analisis Pengaruh Produksi Kentang, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Ekspor Kentang Indonesia Periode 1993-2013*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 4 Vo. 7.
- Suparmoko, M. (2011). *Teori Ekonomi Mikro*. BPFE: Yogyakarta.
- Simanjuntak, P. T. H., Arifin, Z., & Mawardi, M. K. (2017). *Pengaruh Produksi, Harga Internasional dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Volume Ekspor Rumput Laut Indonesia (Studi pada tahun 2009-2014)*. Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 50 No. 3.
- Sukirno, S. (2007). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2012). *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, Tulus T.H. **Perekonomian Indonesia 1965 2018**. Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor, 2018.
- Utomo, Y. P. (2015). *Eksplorasi Data & Analisis Regresi Dengan SPSS*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Widarjono, Agus. (2017). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YPKN.
- Willy, P., & Sarwono. (2014). *Analisis Daya Saing Kedelai Indonesia*. JEJAK Vol. 7 No. 2.
- Zuhdi, F., & Suharno. (2015). *Analisis Daya Saing Ekspor Kopi Indonesia dan Vietnam di Pasar ASEAN 5*. Habitat Vol. 26 No.3.